DINAMIKA MADRASAH DI INDONESIA

(Dari Era Kolonial ke Era Digital)

Dr. Hasyim Haddade, M.Ag

DINAMIKA MADRASAH DI INDONESIA

(Dari Era Kolonial Ke Era Digital)

DR. HASYIM HADDADE, M.AG.

PUSAKA ALMAIDA

2023

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hasyim Haddade
DINAMIKA MADRASAH DI INDONESIA Dari Era Kolonial ke Era Digital/ Cet. I Juni 2023
169 Hlm. ; 15,5 x 23 cm
PENERBIT: PUSAKA ALMAIDA
ISBN ;

Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.

DINAMIKA MADRASAH DI INDONESIA Dari Era Kolonial ke Era Digital

Editor;
Desain Cover;

PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad SAW, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.
Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku ini diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.
Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2023 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, Juni 2023

Rektor UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga buku yang ada di tangan pembaca yang berjudul ***Dinamika Madrasah di Indonesia (Dari Era Kolonial ke Era Digital)*** dapat kami selesaikan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Penulis tak lupa pula menyampaikan salam dan taslim kepada nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan karib kerabatnya.

Era digital adalah sebuah era atau masa yang telah mengalami perkembangan kemajuan dalam kehidupan ke arah yang serba digital. Hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan era digital pun terus berjalan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Percepatan perkembangan era digital memberi dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia. Kompleksitas persoalan yang terjadi dalam kehidupan di era digital menuntut manusia untuk mengubah pola hidupnya dengan sistem yang lebih efektif dan efesien. Kondisi ini juga memberi peluang dan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan madrasah.

Dengan kondisi tersebut, madrasah dituntut untuk melakukan inovasi dalam berbagai aspek, seperti metode, kurikulum dan sarana prasarana. Perubahan wajah madrasah dari semua aspek harus digalakkan seiring dengan konteks digitalisasi. Hal tersebut tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dengan menciptakan inovasi yang relevan dan terintegrasi.

Buku ini hadir untuk memberi gambaran tentang sejarah dan dinamika madrasah di Indonesia sejak masa penjajahan, fase integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, era orde lama, orde baru, sampai kepada model pengembangan madrasah di era digital sebagai bentuk respon terhadap tuntutan era digital yang tak terhindarkan saat sekarang ini.

Dalam proses penyusunan buku ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk sugesti, motivasi, moril ataupun materil, buku ini tidak akan dapat terwujud seperti yang ada di tangan pembaca ini. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penerbitan buku ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga segala bantuan dan pengorbanannya mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah swt. Amin.

DAFTAR ISI

PONDOK PESANTREN

Yasrib

Jl. Pesantren, Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
Sulawesi Selatan 90851 – INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, madrasah memiliki dinamika tersendiri dalam merespon berbagai tantangan zaman yang dihadapi, semenjak kehadirannya di era kolonial sampai ke era digital saat sekarang ini.

Pada masa masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih bersifat tradisional. Kemudian pada 1909 madrasah pertama di Indonesia muncul yaitu Madrasah Abadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri. Seperti Madrasah Shcoel yang didirikan pada 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh M. Talib Umar. Lalu pada 1912, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah di Yogyakarta, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum.

Berturut-turut setelah itu pada 1913 ada Madrasah Al Irsyad di Jakarta, didirikan oleh Syeikh Ahmad Sokarti. Kemudian pada 1915 muncul Diniyah Schoel di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, didirikan oleh Zainuddin Labai el Janusi. Berikutnya pada 1926, salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahab Hasbullah dan setelah itu mulai banyak mendirikan madrasah.

Madrasah adalah saksi perjuangan pendidikan yang tak kenal henti. Pada jaman penjajahan Belanda madrasah didirikan untuk semua warga. Sejarah mencatat, madrasah pertama kali berdiri di Sumatra,

Madrasah Adabiyah pada tahun 1908 yang dimotori oleh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1910 berdiri madrasah *schoel* di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan *Diniyah Schoel* sebagai lanjutan dari madrasah *schoel*. Madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang pada tahun 1907, dan Madrasah Nurul Uman didirikan H. Abdul Somad di Jambi.

Madrasah berkembang di Jawa mulai tahun 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Mualimin Wustha, dan Muallimin Ulya mulai 1919. Ada madrasah yang mengapresiasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. Ada juga model AL-Irsyad pada tahun 1913 yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan *Tahassus*. Demikian secara singkat tentang sejarah madrasah di Indonesia.

Dari jaman penjajahan, orde lama, orde baru, era reformasi sampai era pemerintahan SBY, nasib madrasah di Indonesia sangatlah memperihatinkan dan seolah-olah dianaktirikan oleh pemerintah. Madrasah masih dianggap sebagai pendidikan kelas dua. Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan Maklumat BP KNIP 22 Desember 1945 No. 15 yang menyerukan agar pendidikan di musala dan madrasah berjalan terus dan diperpesat; kemudian diperhatikan melalui keputusan BP KNIP 27 Desember 1945 agar madrasah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah dan melalui Laporan Panitia Penyelidik Pengarahan RI tanggal 2 Mei 1946 yang menegaskan, pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah dipandang perlu untuk ditingkatkan dan dimodernisasi serta diberi bantuan berupa biaya sesuai dengan keputusan BP KNIP. Perhatian pemerintah negeri ini diwujudkan dengan PP No. 33 Tahun 1949 dan PP No. 8 Tahun 1950 yang memberikan bantuan kepada madrasah dengan subsidi per siswa sebesar Rp 60,00.

Baru pada masa reformasi, UU No. 20/2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) khususnya Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, madrasah diakui statusnya sederajat dengan sekolah umum. Namun, pemerintah masih enggan memberikan bantuan, apalagi pernah beredar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Moh Ma`ruf, tanggal 21 September 2005 No. 903/2429/SJ tentang

Pedoman Penyusunan APBD 2006 yang melarang pemerintah daerah mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal termasuk dalam hal ini madrasah yang berada di bawah naungan Departemen Agama yang merupakan salah satu organisasi vertikal.

Reformasi kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada PP ini terdapat Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Anehnya, PP ini pun masih dianggap angin lalu. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perimbangan dana kepada madrasah. Dana 20% pendidikan di APBD masih menjadikan madrasah sebagai sisipan.

Sekarang ini, madrasah memasuki babak baru di era digital. Era digital dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi (Andy Nugroho, 2021). Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi/platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari.

Pasca 2 tahun pandemi berlalu, Indonesia resmi memasuki babak baru atau yang diistilahkan sebagai era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kendati masa pandemi telah berlalu berdasarkan keputusan *World Health Organization* (WHO), akan tetapi bentuk-bentuk antisipasi tetap digalakkan (Solviana, 2020). Seperti halnya di dunia pendidikan, penerapan *Blended-Learning* masih digunakan sebagai alternatif pembelajaran atau bahkan menjadi inovasi tersendiri di bidang pendidikan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman (Fadilah et al., 2021). Covid-19 di Indonesia telah mengubah paradigma masyarakat dari yang konvensional menuju berbasis pada teknologi atau teknologi pendidikan.

Teknologi pendidikan merupakan bentuk perpaduan antara aspek pembelajaran, belajar, pengembangan, manajemen, dan teknologi yang diterapkan untuk membantu memecahkan suatu

permasalahan pendidikan (Hilir & Kom, 2021). Teknologi pendidikan mempunyai peran signifikan dalam perancangan, pengembangan dan pemanfaatan berbagai sumber belajar sehingga hal tersebut dapat memudahkan dan mengakomodasi seseorang untuk belajar terlepas ruang dan waktu dengan cara dan sumber belajar apa saja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya (Efgivia, 2020).

Integrasi antara pendidikan dan teknologi dewasa ini merupakan peluang dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, lembaga pendidikan dituntut untuk mengupayakan pengembangan mutu pendidikan di era digital melalui pola integrasi pendidikan dengan ruang lingkup teknologi (Salim et al., 2020). Tak hanya jenjang pendidikan pada umumnya seperti SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Tinggi dan Perguruan Tinggi yang dituntut untuk mengembangkan mutu pendidikan di era digital, lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah juga diharapkan dapat mengembangan institusi pendidikannya dengan melakukan berbagai inovasi sebagai wujud respon terhadap tuntutan dan tantangan yang ada di era digital dewasa ini. Pengembangan madrasah di era digital adalah sebuah kemestian. Hal ini menyebabkan berbagai komponen bangsa yang terdiri atas akademisi, praktisi pendidikan madrasah tertarik melakukan penelitian dalam rangka mencara solusi terbaik dari setiap tantangan yang dihadapi madrasah dewasa ini.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengembangan madrasah di era digital di Indonesia telah dilakukan. Seperti penelitian dari Rully Rina Widyasari dan M. Mukhibat (2020) tentang Reposisi dan Reaktualisasi Pendidikan Madrasah dalam Memperkuat Eksistensi Pendidikan di Era 4.0". Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan upaya reposisi terhadap madrasah melalui perubahan pengelolaan kelembagaan ke arah yang lebih professional sesuai konteks perkembangan zaman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga langkah yang harus dilakukan lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dalam menghadapi Era 4.0 atau Era Digital, yakni *disruptive mindset, self-driving,* dan *reshape or create.* Ketiga langkah tersebut merupakan pola perubahan yang harus hadir baik dalam lembaga pendidikan maupun para tenaga pendidik dan peserta didik (Widyasari, 2020).

Senada dengan itu, madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mengembangkan mutu pendidikannya dalam menghadapi era digital (Borker, 2018). Berdasarkan data yang dihimpun dari http://emispendis.kemenag.go.id/, jumlah madrasah yang terdiri atas Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah di Indonesia dari 34 Provinsi pada tahun 2021 adalah 83.391 lembaga (Lukens-Bull, 2019).

Harus diakui bahwa secara umum kualitas madrasah memang masih jauh dari harapan. Secara sederhana bisa dilihat dari rendahnya minat para orang tua untuk menyerahkan masa depan pendidikan anak-anaknya ke madrasah. Biasanya mereka tidak menjadikan madrasah sebagai alternatif utama untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kalaupun akhirnya mereka masuk bersekolah di madrasah, biasanya itu dilakukan karena terpaksa dalam arti bahwa mereka tidak lulus di sekolah umum.

Mudah dipahami, rendahnya minat masayarakat untuk menyerahkan pendidikan anak-anaknya ke madrasah bukanlah tanpa sebab. Salah satu penyebab utamanya, adalah karena memang secara kualitatif banyak madrasah yang tidak bisa bersaing dari sekolah umum. Ada memang madrasah yang cukup berkualitas, bahkab mungkin lebih baik dari sekolah umum, tetapi tetap saja jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah madrasah secara keseluruhan. Di sisi lain, rendahnya kualitas ini juga terindikasi dari rendahnya persentase siswa madrasah yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Harus disadari bahwa globalisasi sendiri memberikan peluang sekaligus tantangan dan bahkan ancaman terhadap siapapun, apapun, dan lembaga pendidikan manapun, termasuk madrasah. Globalisasi merupakan peluang, karena siapapun yang memiliki kualitas bisa menjadi pemenang, namun globalisasi bisa menjadi ancaman, karena globalisasi bisa menenggelamkan siapapun kalau pada kenyataannya tidak bisa bersaing. Bahkan, pada titik ekstrim persaingan pada era globalisasi bisa menamatkan riwayat sebuah institusi pendidikan.

Tentu saja, madrasah tidak ingin menjadi lembaga pendidikan yang tenggelam oleh arus besar persaingan pada era globalisasi dan era digital yang seakan tidak terbendung itu. Madrasah, bahkan, seharusnya menjadikan era digital ini sebagai tantangan dan sekaligus

memanfaatkan semua peluang yang ada untuk kebaikan madrasah, secara khusus, dan kebaikan ummat ini secara keseluruhan. Madrasah, lebih jauh, sebagai institusi pendidikan yang *menisbahkan* diri dengan Islam bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa ajaran Islam bisa menjadi solusi dalam menjawab berbagai permasalahan yang terjadi hari ini dan sampai kapanpun.

Kata kunci yang harus dilakukan oleh madrasah adalah melakukan modernisasi dan transformasi sistem penyelenggaran pendidikan di madrasah dari konvensional ke arah digital. Karena modernisasi dan digitalisasi adalah suatu hal yang *inheren* dengan arus globalisasi itu sendiri. Madrasah tidak bisa bertahan dengan pola lama, dengan pola manajemen surau yang terkesan asal jadi dan kurang visioner, dan madrasah juga tidak boleh mengisolasi diri dari setiap perkembangan yang begitu cepat yang terjadi di luar dirinya.

Dalam konteks ini, madrasah harus dengan cepat melakukan evaluasi internal, menyusun berbagai program strategis untuk memperbaiki diri. Penguatan posisi madrasah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan menumbuhkan percaya diri madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dan kemudian dapat mengambil peran signifikan dalam upaya mempersiapkan generasi muda Islam Indonesia menjadi insan yang berkualitas, yang memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada Allah swt. sekaligus memiliki kecerdasan dan kemampuan yang cukup untuk tidak menjadi pecundang dalam setiap persaingan hidup di era global ini.

BAB II
EKSISTENSI MADRASAH DI INDONESIA

Pengertian, Sejarah, dan Karakteristik Madrasah

1. Pengertian Madrasah

Kata *madrasah* dalam kamus Bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat dari derivasi akar kata *darasa* yang secara literal diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata *darasa* juga bisa diturunkan kata *midras* yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata *al-midras* juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitabTaurat (Yusuf, h. 221).

Kata *madrasah* juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu *darasa*, yang berarti membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar. Dari *kedua* bahasa tersebut, kata *madrasah* mempunyai arti yang sama: yaitu sebagai tempat belajar (Yusuf).

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata *madrasah* memiliki arti sekolah, kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola* (Fajar, 1998).

Sungguhpun secara teknis, yakni dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, *madrasah* tidak berbeda dengan sekolah,

namun di Indonesia *madrasah* tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni sekolah agama, atau tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan yang dalam hal ini adalah agama Islam.

Dalam prakteknya memang ada *madrasah,* di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada *madrasah* yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut *madrasah diniyyah*. Kenyataan bahwa kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami *madrasah* sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni tempat untuk belajar agama atau tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan.

Para ahli sejarah pendidikan seperti A.L.Tibawi dan Mehdi Nakosteen (1996: 66)) mengatakan bahwa *madrasah* dalam bahasa Arab merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam (klasik) pra-modern.

Artinya, secara istilah *madrasah* di masa klasik Islam tidak sama terminologinya dengan *madrasah* dalam pengertian bahasa Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam menulis kata tersebut secara bervariasi misalnya, *schule* Atau *hochschule* (*Jerman*), *school, college* atau *academy* (Inggris). Nakosteen menerjemahkan *madrasah* dengan kata *university* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan universitas.

Ia juga menjelaskan bahwa *madrasah-madrasah* di masa klasik Islam itu didirikan oleh para penguasa Islam ketika itu untuk membebaskan masjid dari beban-beban pendidikan sekuler-sektarian. Sebab sebelum ada *madrasah*, masjid ketika itu memang telah digunakan sebagai lembaga pendidikan umum. Tujuan pendidikan menghendaki adanya aktivitas sehingga menimbulkan hiruk-pikuk, sementara beribadat di dalam masjid menghendaki ketenangan dan kekhusukan beribadah. Itulah sebabnya, kata Nakosteen, pertentangan antara tujuan pendidikan dan tujuan agama di dalam masjid hampir-hampir tidak dapat diperoleh titik temu. Maka dicarilah lembaga pendidikan alternatif untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan pendidikan umum, dengan tetap berpijak pada motif keagamaan. Lembaga itu ialah *madrasah*.

George Makdisi (1970, h. 257) berpendapat bahwa terjemahan kata *madrasah* dapat disimpulkan dengan tiga perbedaan mendasar yaitu: *Pertama*, kata universitas, dalam pengertiannya yang paling awal, merujuk pada komunitas atau sekelompok sarjana dan mahasiswa, *Kedua*; merujuk pada sebuah bangunan tempat kegiatan pendidikan setelah pendidikan dasar (pendidikan tinggi) berlangsung. *Ketiga*; izin mengajar (*ijazah al-tadris, licentia docendi*) pada *madrasah* diberikan oleh *syaikh* secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintahan.

Erat kaitannya dengan penggunaan istilah *madrasah* yang menunjuk pada lembaga pendidikan, dalam perkembangannya kemudian istilah *madrasah* juga mempunyai beberapa pengertian di antaranya; aliran, mazhab, kelompok atau golongan filosof dan ahli pikir atau penyelidik tertentu pada metode dan pemikiran yang sama (Depag, 1993).

Munculnya pengertian ini seiring dengan perkembangan *madrasah* sebagai lembaga pendidikan yang di antaranya menjadi lembaga yang menganut dan mengembangkan pandangan atau aliran dan mazdhab pemikiran *(school of thought)* tertentu. Pandangan-pandangan atau aliran-aliran itu sendiri timbul sebagai akibat perkembangan ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan ke berbagai bidang yang saling mengambil pengaruh di kalangan umat Islam, sehingga mereka dan berusaha untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya masing-masing, khususnya pada periode Islam klasik. Maka, terbentuklah *madrasah-madrasah* dalam pengertian kelompok pemikiran, mazhab, atau aliran tersebut. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar *madrasah* yang didirikan pada masa klasik itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang terkenal, misalnya *madrasah* Safi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah .

Hal ini juga berlaku bagi *madrasah-madrasah* di Indonesia, yang kebanyakan menggunakan nama orang yang mendirikannya atau lembaga yang mendirikannya.

2. Historisitas *Madrasah* di Indonesia

Penamaan lembaga pendidikan di Indonesia dewasa ini pada umumnya merupakan pinjaman dari bahasa Barat, seperti universitas dari kata *university*, sekolah dari kata *school*, akademi dari kata *academy*, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan *madrasah*. Penerjemahan kata *madrasah* ke dalam bahasa Indonesia dengan mengaitkan pada bahasa Barat dianggap tidak tepat. Di Indonesia, *madrasah* tetap dipakai dengan kata aslinya, *madrasah*, kendatipun pengertiannya tidak lagi persis dengan apa yang dipahami pada masa klasik, yaitu lembaga pendidikan tinggi, karena bergeser menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Pergeseran makna dari lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah itu, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Timur Tengah sendiri (Yatim, 1999).

Sampai saat ini belum ditemukan referensi yang menjelaskan secara pasti kapan istilah *madrasah*, yang mempunyai pengertian sebagai lembaga pendidikan mulai digunakan di Indonesia. Para peneliti sejarah pendidikan Islam pun pada umumnya lebih tertarik membicarakan sistem pendidikan tradisional Islam yang digunakan baik di masjid, surau di Minangkabau, pesantren di Jawa, dan lain-lain, daripada membicarakan *madrasah*. Dalam beberapa hal, penyebutan istilah *madrasah* di Indonesia juga seringkali menimbulkan konotasi ketidakaslian, dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid, dayah di Aceh, surau di Minangkabau, atau pesantren di Jawa, yang dianggap asli Indonesia. Berkembangnya *madrasah* di Indonesia di awal abad ke-20 M ini, memang merupakan wujud dari upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para cendikiawan Muslim Indonesia, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam asli tradisional tersebut dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping itu, menurut Maksum (1999) kedekatan sistem belajar-mengajar seperti *madrasah* dengan sistem belajar-mengajar seperti sekolah yang ketika madarash mulai bermunculan, memang sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda membuat banyak orang berpandangan bahwa *madrasah* sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak keIslaman.

Pandangan ini dikuatkan oleh banyaknya fakta yang menjadi indicator bahwa masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang *pertama* pada abad ke-7 M maupun gelombang ke-2 pada

abad ke-13 M. tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya *madrasah*. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa ketika itu ialah pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia.

Oleh karena itu, membicarakan *madrasah* di Indonesia dalam kaitannya dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, *madrasah* merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu, menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya *madrasah* di kemudian hari.

Menurut Nurcholish Madjid (1997, h. 3), lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha, sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Namun demikian, dalam proses pengislaman itu tidak bisa dihindari terjadinya akomodasi dan adaptasi.

Tegasnya, karena lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren itu di masa Hindu-Budha lebih bernuansa mistik, maka ajaran Islam yang disampaikan di pesantren pun pada mulanya bercorak atau bernuansa mistik pula, yang dalam khasanah Islam lebih dikenal dengan sebutan tasawuf. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, tasawuf memang merupakan gejala umum dan sangat dominan di dunia Islam pada umumnya. Karena penduduk Nusantara sebelum Islam memiliki kecenderungan yang kuat terhadap mistik, maka agama Islam yang disampaikan dengan pendekatan mistik atau tasawuf itu lebih mudah diterima dan dianut oleh masyarakat.

Contoh dari segi mistik ini misalnya adalah adanya konsep wirid dalam pengajian. Seorang kiai secara konsisten mengaji kitab tertentu pada saat tertentu, misalnya kitab Sanusiyah pada malam Kamis. Hal itu adalah sebagai wirid yang dikenakan kepada dirinya sendiri, sehingga menjadi semacam wajib hukumnya yang kalau ditinggalkan dengan sengaja dianggap akan mendatangkan dosa. Contoh lain dari suasana mistik ini terlihat pula dalam hubungan kiai-santri yang lebih merupakan

kelanjutan dari konsep hubungan guru-santri yang telah ada sebelum Islam datang ke Jawa, yang banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Hindu-Budha, atau sekurang-kurangnya konsep stratifikasi masyarakat Jawa sendiri. Tetapi lambat laun gejala itu semakin berkurang bersamaan dengan semakin mendekatnya pesantren ke dalam jaringan Islam di Haramain, tempat sumber Islam yang asli yang di akhir masa pertengahan menjadi pusat reformasi Islam dengan munculnya gagasan rekonsiliasi antara tasawuf dan syari'at.

Persentuhan global dengan pusat Islam di Haramain di akhir abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M itulah, menurut Malik Fadjar (1994 yang memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Maka di awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem pendidikan yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama *madrasah*. Karena itu sejak awal kemunculannya, *madrasah* di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri: digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya (Hanun Asrohah, 1999).

3. Karakteristik *Madrasah* di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, secara harfiah *madrasah* bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis *kedua*nya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal. Namun demikian Karel Steenbrink (1986) membedakan *madrasah* dan sekolah karena *kedua*nya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda.

Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah, *madrasah* memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat. Perbedaan karakter antara *madrasah* dengan sekolah itu dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis. Tujuan dari pendirian *madrasah* ketika untuk pertama kalinya diadopsi

di Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan (Hanun Asrohah, 1999), sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen, di samping untuk mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda itu. Sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an bertujuan untuk menyiapkan calon pegawai pemerintah kolonial, dengan maksud untuk melestarikan penjajahan (Aqib Suminto, 1985).

Dalam lembaga pendidikan yang didirikan kolonial Belanda, tidak diberikan pelajaran agama sama sekali. Karena itu tidak heran jika di kalangan kaum pribumi, khususnya di Jawa, ketika itu muncul resistensi yang kuat terhadap sekolah, yang mereka pandang sebagai bagian integral dari rencana pemerintah kolonial Belanda untuk "membelandakan" anak-anak mereka.

Pesantren memiliki tujuan yang lain lagi. Menurut Mahmud Junus, Djumhur, dan Steenbrink (1986) pesantren didirikan untuk menjadi basis perjuangan rakyat dalam melawan penjajah. Pesantren merupakan upaya kalangan pribumi untuk mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang sesuai dengan tuntunan agama dan kebudayaan daerah untuk melindungi diri dari pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda saat itu, melalui politik balas budi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan politik etis.

Meskipun pesantren berperan lebih dahulu dalam membendung pengaruh pendidikan kolonial, dibandingkan dengan *madrasah*, para pembaharu pendidikan Islam di Indonesia tampaknya mengakui bahwa dalam banyak hal, lembaga pendidikan Islam tradisional ini mengandung banyak kelemahan, sementara pada sisi lain lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda harus diakui memiliki banyak kelebihan. *Madrasah*, seperti kebanyakan lembaga modern lainnya, masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20 M, ini dimaksudkan sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang positif dari pendidikan pesantren dan sekolah. Lembaga pendidikan *madrasah* ini secara berangsur-angsur diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Karel A. Steenbreek, 1982).

Telah disinggung bahwa *madrasah* berbeda pengertiannya antara masa klasik Islam dengan masa ketika lembaga pendidikan tersebut masuk ke Indonesia pada sekitar awal abad ke-20 M. *Madrasah* di Indonesia menurut Azyumardi Azra (1999) merujuk pada pendidikan dasar sampai menengah, sementara pada masa klasik Islam *madrasah* merujuk pada lembaga pendidikan tinggi (*the institution of higher learning*).

Perbedaan tersebut pada gilirannya bukan hanya merupakan masalah perbedaan definisi, tapi juga menunjukkan perbedaan karakteristik antara *kedua*nya. Merujuk pada penjelasan Nakosteen (1996) motif pendirian *madrasah* pada masa klasik Islam ialah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum (sekuler), yang dianggap kurang memadai jika dilakukan di dalam masjid, sebab masjid merupakan tempat ibadah.

Namun, upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan umum di *madrasah* sejak awal perkembangannya telah mengalami kegagalan. Sebab, penekanan pada ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-diniyyah*) terutama pada bidang fikih, tafsir, dan hadis, ternyata lebih dominan, sehingga ilmu-ilmu non-agama khususnya ilmu-ilmu alam dan eksakta, tetap berada dalam posisi pinggiran atau marjinal (Azra, 1999). Hal itu berbeda dengan *madrasah* di Indonesia yang sejak awal pertumbuhannya telah dengan sadar menjatuhkan pilihan pada (a) *madrasah* yang didirikan sebagai lembaga pendidikan yang semata-mata untuk mendalami agama (*li tafaqquh fiddin*), yang biasa disebut *madrasah* diniyah salafiyah; dan (b) *madrasah* yang didirikan tidak hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, tapi juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti *madrasah* Adabiyah di Sumatera Barat, dan *madrasah* yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan PUI di Majalengka (Fajar, 1994).

Dari keterangan di atas menarik untuk dicatat bahwa salah satu karakteristik *madrasah* yang cukup penting di Indonesia pada awal pertumbuhannya ialah bahwa di dalamnya tidak ada konflik atau upaya mempertentangkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Konflik atau lebih tepat disebut perselisihan pendapat itu biasanya terjadi antara satu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan lain

yang memiliki paham keagamaan yang berbeda, dan mereka sama-sama mendirikan *madrasah*. Misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain, memiliki *madrasah*nya sendiri-sendiri untuk mensosialisasikan dan mengembangkan paham keagamaan mereka masing-masing.

Madrasah di Indonesia secara historis juga memiliki karakter yang sangat populis (merakyat), berbeda dengan *madrasah* pada masa klasik Islam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi *madrasah* pada masa klasik Islam terlahir sebagai gejala urban atau kota. *Madrasah* pertama kali didirikan oleh Dinasti Samaniyah (204-395 H/819-1005 M) di Naisapur kota yang kemudian dikenal sebagai daerah kelahiran *madrasah*. Daerah Naisapur mencakup sebagian Iran, sebagian Afghanistan dan bekas Uni-Sovyet antara laut Kaspia dan laut Aral. Dengan inisiatif yang datang dari penguasa ketika itu, maka praktis *madrasah* tidak kesulitan menyerap hampir segenap unsur dan fasilitas modern, seperti bangunan yang permanen, kurikulum yang tertata rapi, pergantian jenjang pendidikan, dan tentu saja anggaran atau dana yang dikucurkan oleh pemerintah.

Hal ini berbeda dengan *madrasah* di Indonesia. Kebanyakan *madrasah* di Indonesia pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaharuan pendidikan, setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana pembangunan dan pendidikannya pun berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat sendiri diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-anak mereka ke *madrasah* dengan biaya ringan.

Sebagai lembaga pendidikan swadaya, *madrasah* menampung aspirasi sosial-budaya-agama masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya *madrasah* di pedesaan itu menjadi petunjuk bahwa masyarakat Indonesia ternyata memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putri mereka.

Dari sudut pandang lain, hal itu juga berarti ikut meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan. Dalam hal ini patut dicatat bahwa dari 36.000 jumlah *madrasah* yang ada yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, 96 persen di antaranya dikelola oleh masyarakat secara swadaya, atau *madrasah* swasta. Sementara itu

madrasah yang mengkhususkan diri pada mata pelajaran agama, yaitu *madrasah* diniyah yang dikelola masyarakat, jumlahnya telah mencapai 22.000 (H.A. Malik Fajar, 1994).

A. Visi Madrasah

Husni Rahim (2008) mengatakan bahwa sesuai dengan karakteristik madrasah yang milik masyarakat, berbasis sekolah, *tafaqquh fi al-dien* dan lembaga kaderisasi, maka visi madrasah adalah "Islami, populis, berkualitas, dan beragam".

Visi pertama madrasah adalah Islami; Islami pada madrasah, mencerminkan pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang suasana dan kehidupan para peserta didik, pendidik dan para penghuni lainnya mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Islami merupakan identitas utama yang harus tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikan. Berbeda dengan lembaga pendidikan sekuler, menurut Rahim (2008) pendidikan di madrasah dilaksanakan dengan mengejawantahkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan dan perilaku semua komponen pendidikan mulai dari pimpinan sampai dengan siswa. Karakter Islami, yang pertama dan utama, berarti kesadaran sebagai pribadi muslim untuk menjalankan secara konsisten perintah dan larangan agama dalam segala situasi dan kondisi, termasuk di lingkungan. madrasah. Selain itu, karakater Islami berarti orientasi pendidikan yang holistik dan tidak terbatas pada cita cita praktis, karena menempatkan nilai nilai spiritual dan transedental [ketuhanan] dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Karakter Islami juga berarti strategi pembelajaran keagamaan yang tidak verbalistik sehingga memudahkan siswa untuk mengembangkan ketrampilan dan wawasan keislamannya secara terpadu. Di samping ketiga makna di atas, karakter Islami dari madrasah itu berarti ajakan dan seruan bagi lingkungan sekitar madrasah untuk meningkatkan syiar Islam melalui media pendidikan.

Ciri Islami ini tercermin baik dalam kurikulum, aktifitas madrasah, pola tingkah laku penghuni madrasah, dan suasana lingkungan madrasah. Secara formal ciri khas madrasah dinyatakan dalam kurikulum dalam mata pelajaran agama di madrasah. (Pelajaran agama yang mencakup akidah/akhlak, fikih, Quran/Hadist, sejarah Kebudayaan islam dan Bahasa Arab diberikan waktu 4 sd 7 jam pada MI dan 9 jam perminggu pada MTs dan MA. Jumlah jam yang demikian itu

masih dirasakan “kurang” sehingga masih ada suara, kurikulum 1994 sebagai kurikulum yang “mendangkalkan agama”. Pertanyaan sekarang, apakah ciri khas agama pada madrasah hanya menjadi tanggung jawab guru bidang studi agama, sehingga bila jam belajar bidang studi agama kurang berarti terjadi pendangkalan agama? Ciri khas Islam pada madrasah menjadi tanggungjawab semua orang yang terkait dengan madrasah. Mulai dari kepala madrasah (pimpinan), guru (baik bidang studi agama maupun bidang studi umum), tenaga kependidikan lainnya, BP3 , dan para siswa sendiri.) Di samping itu ciri khas Islami tersebut dituangkan pula dalam :

1. Program mafikib (Mafikib adalah singkatan untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris. Bidang studi mafikib ini merupakan aspek pendidikan yang dominan dalam peningkatan kemampuan nalar dan analisi siswa. Melalui bidang studi mafikibb siswa akan lebih mudah mengembangkan iptek.) dengan nuansa Islam. Program mafikib dengan nuansa Islam dimaksudkan menjembatani kekurang akraban dan kekurang tertarikan madrasah di Indonesia dengan bidang studi matematika, fisika, kimia, biologi dan bahasa Inggeris. Padahal di masa kemajuan Islam, ilmu tersebut diperkenalkan dan dikembangkan oleh ilmuwan Islam *(Jabir ibn Hayyan (oleh orang Barat dikenal dengan "geber" adalah ahli kimia yang diakui dunia Barat. Demikian pula Musa al Khawarizmi seorang ahli matematika yang memperkenalkan *algebra* atau *aljabar* dan memperkenalkan angka Arab.; Ibn Sina seorang ahli ketabiban (kedokteran) yang banyak menulis buku kedokteran ; Ibn al Haytam (Alhazen nama Latinnya) adalah seorang ahli fisika yang memperkenalkan lapangan optik dalam fisika dan juga penggunaan kamera. Abu Raihan al Biruni seorang ahli astronomi yang juga ahli fisika; Abbas ibn Famas termashur dalam ilmu kimia (menemukan pembuatan kaca dari batu); Ibrahim ibn Yahya ahli astronomi (menentukan perhitungan gerhana dan membuat teropong bintang); dan masih banyak lagi tokoh ilrnuwan Islam yang muncul di rnasa kejayaan Islam).

   Bidang studi mafikib berdasarkan kurikulum 1994 dirasakan sukar bagi kebanyakan guru madrasah dan pondok pesantren untuk mengajarkannya dan juga dirasakan sulit oleh para siswa. Padahal bidang studi mafikib merupakan aspek pendidikan yang sangat dominan dalam meningkatkan kemampuan nalar dan analisis siswa

dalam mempelajari dan mengembangkan iptek. Kekurang akraban madrasah di Indonesia dengan bidang studi umum (mafikib) tersebut merupakan warisan sejarah Islam di Indonesia. Seperti disebutkan di depan bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia adalah Islam yang bercorak mistik dan sufistik yang lebih mementingkan agama dari pada dunia. Oleh karena itu lembaga pendidikan madrasah pun hanya mengajarkan agama. Masuknya Belanda dengan membawa sistem sekolah yang memberikan pelajaran umum (sekuler), telah memunculkan dan mempertajam dikhotomi sekolah umum dan sekolah agama (madrasah). Lebih lebih karena madrasah dikenal sebagai benteng perlawanan terhadap Belanda. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab kekurang tertarikan madrasah terhadap bidang mafikib. Ditambah lagi faktor guru yang mengajar mafikib di madrasah kurang berkualitas. Ini pula penyebab murid murid madrasah kurang tertarik, malah menganggap pelajaran mafikib adalah "sulit dan berat”

2. Program pelajaran agama dengan nuansa iptek (Pelajaran agama dengan nuansa iptek merupakan upaya mendekatkan agama dengan iptek melalui kontekstualisasi ajaran agama terhadap iptek yang bermanfaat guna mengamalkan ajaran agama). Program memberikan nuansa iptek dalam bidang studi agama merupakan kelanjutan dari program mafikib dengan nuansa Islam. Melalui program ini dilakukan pula upaya menjembatani perpaduan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bagaimanapun juga teknologi dapat membantu pengamalan beragama.

   Bila upaya mafikib dengan nuansa agama dan bidang studi agama dengan nuansa iptek dapat berhasil, diharapkan tidak ada lagi kesan dikhotomi antara pelajaran agama dan umum ataupun dualisme antara sekolah dan madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia yang sering diperdebatkan. Pemaduan konsep mafikib dengan nuansa agama dan konsep agama dengan nuansa iptek dimaksudkan agar dapat diserapnya nilai mlai mafikib yang agamis dan nilai nilal agama yang kontekstual dalam perilaku siswa, sebagai wujud penghayatan terhadap keagungan Allah swt.

3. Program penciptaan suasana keagamaan di madrasah. Penciptaan suasana keagamaan di madrasah tidak terbatas dalam bidang proses belajar mengajar, tetapi juga dalam bidang bidang lain baik fisik dan sarana bangunan, maupun dalam pergaulan dan pakaian. Suasana keagamaan ini dapat pula berupa simbol dan kegiatan. Kehadiran masjid/mushallah menjadi ciri khas utama, sebagai pusat kegiatan keagamaan di madrasah, Di samping itu ada rnadrasah yang rnemberi ciri khas suasana ini dengan pakaian (busana muslim), tata ruang, bentuk bangunan ataupun aktifitas keagamaan seperti shalat berjamaah, membaca Alquran selama 10 menit setelah shalat berjamaah, berdoa sebelum belajar, shalat dhuha, kemampuan membaca Alquran bagi anak klas III MI dan mampu membaca dengan betul pada anak klas VI MI, ada juga kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggeris sebagai ciri khas madrasah) Namun suasana keagamaan ini tidak perlu seragam, namun diserahkan pada masing masing sekolah berdasarkan pertimbangan daerah masing masing.

Visi kedua populis; Populis pada madrasah merupakan pesan utama dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Sejak periode yang paling dini, madrasah lahir dan berkembang dengan dukungan masyarakat serta terbuka bagi semua lapisan sosial. Populis, merupakan gambaran bahwa madrasah itu lahir dan dibesarkan oleh dan untuk masyarakat. Hampir seluruh madrasah muncul atas inisiatif masyarakat yang peduli dengan anak di sekitamya yang memerlukan pendidikan. Memang pada awalnya dimulai dengan kebutuhan pendidikan agama tingkat dasar seperti belajar mengaji, belajar shalat , mendoa dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan munculnya dan berkembangya Islam di daerah tersebut. Dalam banyak kasus, sekali mengabaikan watak populisnya, madrasah akan mengalami kematian karena ditinggalkan oleh massa pendukungnya.

Watak populis dari madrasah ini sangat relevan dengan tuntutan essensial ummat manusia sepanjang masa yang membutuhkan persaudaraan, saling kasih, dan semangat memberdayakan kaum tertindas. Dengan kata lain, madrasah hendaknya dilaksanakan dalam semangat yang merakyat sehingga. melahirkan hasil pendidikan yang berprestasi dan sekaligus perduli dengan nasib sesama.

Keadaan ini pula yang menyebabkan jumlah madrasah berkembang dengan pesat dari segi kuantitatif, namun sangat lamban perkembangannya dari segi kualitas. Ini mungkin konsekuensi madrasah yang bersifat populis yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam Populis dalam visi ini ingin mengembalikan posisi bahwa madrasah itu milik masyarakat, karena itu tidak boleh menjadi "eklusif" atau "menara gading", tapi tetap mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Program keunggulan, seperti madrasah model, tidak dimaksudkan untuk membuat lembaga pendidikan itu bersifat eksklusif.

Visi ketiga berkualitas, artinya berorientasi pada mutu. Hal ini merupakan tantangan masa depan yang sangat nyata, karena penghargaan masyarakat terhadap sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikannya. Kualitas pedidikan itu tercermin dalam dua tataran: proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, affektif, dan psikomotorik. Jika gagal dalam mewujudkan visi ini, madrasah, akan tertinggal dari lembaga-lembaga pedidikan lain.

Berkualitas dicerminkan pada kegiatan dan nilai akademik yang diperoleh madrasah tersebut. Baik yang dapat dan dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai pada ulangan, kenaikan kelas, ujian akhir (NEM) maupun ujian masuk perguruam tinggi (UMPTN). Berkualitas ini tampak pula dengan banyaknya prestasi yang dicapai oleh siswa madrasah, baik dalam bidang seni, bahasa, komputer, olahraga, ketrampilan dan lain-lain. Sisi lain dari berkualitas adalah kemampuan siswa dan lulusan madrasah masuk dan bersaing dalam dunia global.

Kecenderungan baru terutama di kota besar, madrasah yang berkualitas menjadi pilihan yang menarik para orang tua. Tantangan kita bagaimana untuk menjadikan madrasah tersebut berkualitas sehingga menarik masyarakat untuk memasukan anaknya ke madrasah. Perlu kita ingat bahwa dengan makin kuatnya tuntutan akan mutu, maka madrasah yang hanya berjalan apa adanya dan tanpa disertai komitmen terhadap mutu dan keunggulan, setahap demi setahap akan ditinggalkan orang.

Visi keempat beragam; Beragam pada madrasah menunjukkan adanya fieksibilitas dalam pelaksaaan pendidikan. Madrasah sangat menghargai keragaman bentuk dan jenis pendidikan. Karakter keragaman pada madrasah menunjukkan adanya fieksibilitas dalam pelaksaaan pendidikan. Praktek penyeragaman yang terjadi selama tiga dekade terakhir disadari telah mematikan kreatifitas pengelolaan dan pengembagan madrasah. Hal ini sekaligus bertentangan dengan watak populis yang meniscayakan adanya lembaga, model, dan pendekatan pendidikan yang bervariasi sesuai dengan kompleksitas masyarakat. Pemerintah hendaknya membiarkan tumbuh dan berkembangnya aneka ragam lembaga pedidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah, majelis taklim, sampai dengan kelompok kajian usra. Dalam waktu yang bersamaan, setiap lembaga pendidikan Islam hendaknya juga dibiarkan berkembang dalam keanekaragaman tipe, mulai dari madrasah umum, madrasah kejuruan, madrasah keagamaan, sampai dengan madrasah model. Sementara itu, dalam proses pembelajarannya, pendidikan Islam dapat mengembangkan berbagai strategi yang menjamin effektifitas pedidikan. Pola pendekatan yang tuggal akan menimbulkan kejenuhan siswa dalam belajar.

B. Madrasah sebagai Sekolah Agama

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seirama dengan perkembangan bangsa Indonesia, semenjak masa kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah merubah pendidikan dari bentuk pengajian di rumah-rumah, terus ke mushollah, mesjid dan kebangunan sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini. Demikian pula dari segi materi pendidikan, telah terjadi perkembangan dari yang tadinya hanya belajar mengaji al-qur'an kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus ke pengajian kitab, lalu ke pengajaran agama di madrasah berupa mata pelajaran tauhid/ akidah, akhlak, fiqh, hadis, tafsir, sejarah Islam dan bahasa Arab.

Dari segi jenjang pendidikan, telah terjadi pula perkembangan dari belajar mengaji Quran ke jenjang pengajian kitab tingkat dasar dan

pengajian kitab tingkat lanjut, kemudian ketika sudah berbentuk madrasah telah pula berjenjang mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Madrasah Aliyah (SMA).

Masuknya penjajahan Belanda yang membawa sistim pendidikan Barat yang sekuler telah pula membuka mata umat Islam Indonesia, akan adanya sistem sekolah (*school*) yang memberi pengajaran pengetahuan umum (membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dll). Perkembangan sekolah ini mengikuti politik penjajahan, dimana untuk orang Indonesia, diberi kesempatan yang sangat terbatas untuk bisa ikut sekolah Belanda (HIS/ELS, MULO, AMS) dan untuk anak-anak kalangan bangsawan dan pejabat Indonesia rendahan, disediakan HIS (sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua.

Dalam perkembangannya anak-anak lulusan sekolah Belanda inilah yang dipakai oleh Belanda di pemerintahan dan perdagangan dan mereka nantinya membentuk kelompok elit tersendiri yang terpisah dari anak-anak lulusan madrasah yang hanya memfokuskan pengajarannya dengan pelajaran agama. Ketika mulai muncul semangat nasionalisme dan keinginan merdeka, mulailah terjadi pergaulan antara mereka yang tentunya masing-masing menghargai satu sama lain. Situasi inilah nantinya mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia yang menginginkan anak didik mereka mempunyai kemampuan pengetahuan umum tapi tetap menjadi pemeluk agama yang baik. Ini melahirkan keinganan/tuntutan adanya pendidikan agama di sekolah.

Di sisi lain madrasah yang selama ini hanya belajar agama berkeinginan juga memberikan pengetahuan umum bagi anak didiknya, sehingga lulusannya berkemampuan agama yang baik, namun berpengetahuan umum juga sebagai sarana memasuki pergaulan dunia. Ini melahirkan munculnya pengetahuan umum diajarkan di madrasah dengan membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dan olah raga).

Kesadaran untuk memperbaharui atau modernisasi pendidikan Islam ini, pada tingkat awal, direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam modern, yang selain terpengaruh gagasan pembaharuan madrasah di Timur Tengah, juga mengadopsi sistem pendidikan kolonial Belanda. Pemerakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi organisasi “modernis" Islam seperti Jami’at Khair, al

Irsyad, dan Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, pendirian lembaga pendidikan Islam ini menjadi inspirasi bagi hampir semua organisasi dan gerakan Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al Washliyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti). Dengan corak masing masing yang berbeda.

Pada awal perkembangan adopsi gagasan modernisasi pendidikan Islam ini, setidaknya ada dua kecenderungan dalam eksperimentasi organisasi organisasi Islam di atas.

Pertama, mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern (Belanda) secara hampir menyeluruh. Eksperimen ini melahirkan sekolah-¬sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam, misalnya terlihat dengan jelas pada perubahan Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Abdullah Ahmad di Padang pada 1909 menjadi Sekolah Adabiyah (adabiyah school) tahun 1915. Hanya terdapat sedikit ciri atau unsur dalam kurikulum sekolah (HIS) Adabiyah yang membedakannya dengan sekolah Belanda. Selain mengadopsi seluruh kurikulum HIS Belanda. Sekolah (HIS) Adabiyah menambahkan pelajaran agama 2 jam sepekan. Selaras dengan itu, Muhammadiyah mengadopsi sistem kelembagaan pendidikan Belanda secara konsisten dan mcnyeluruh dengan mendirikan sekolah sekolah umum model Belanda hanya dengan memasukkan pendidikan agama (istilah Muhammadiyah: MULO met de Our'an) ke dalam kurikulumnya. Selain itu, Muhammadiyah juga mencoba bereksperimen dengan sistem dan kelem-bagaan madrasah modern dengan mendirikan Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat. Hanya saja, madrasah yang dikembangkan Muhammadiyah ini tidak menjadikan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional, apakah surau atau pesantren, sebagai basisnya.

Kedua, munculnya madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Berbeda dengan eksperimen pertama, eksperimen kedua ini justru bertitik tolak dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Sistem madrasah, surau, pesantren yang secara tradisional merupakan kelembagaan pendidikan Islam indigenous, dimodernisasi misalnya dengan mengadopsi aspek aspek tertentu dari sistem pendidikan modern Belanda, misalnya kandungan kurikulum, teknik dan metodologi pengajaran. Bentuk kedua ini tampak pada eksperimen H.

Abdul Karim Amrullah yang pada 1916 menjadikan Surau Jembatan Besi lembaga pendidikan Islam tradisional Minangkabau sebagai basis pengembangan madrasah modern, yang kemudian dikenal dengan Sumatera Thawalib. Berbarengan dengan itu, Zainuddin Labay el Yunusi mengembangkan Madrasah Diniyah, yang pada awalnya merupakan "madrasah sore" untuk memberikan pelajaran agama pada murid murid sekolah "gubemment”. Prakarsa ini diikuti oleh adiknya, Rangkayo Rahmah el Yunusiah yang mendirikan "Diniah Puteri". Karakteristik yang sama dapat dijumpai pada madrasah madrasah yang didirikan oleh Jami’at al-Khair di Jakarta tahun 1905, dan kemudian madrasah yang didirikan organisasi AI Irsyad.

Termasuk dalam bentuk ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Pesantren Mambaul Ulum di Surakarta pada¬ tahun 1906. Sebagaimana pesantren lainnya, pesantren ini tetap mempunyai basis pada pendidikan dan pengajaran ilmu-¬ilmu Islam seperti al Qur'an, Hadits, Fiqh, dan Bahasa Arab. Akan tetapi, pesantren ini juga memasukkan pelajaran membaca (tulisan latin), aljabar, dan berhitung ke dalam kurikulumnya.

Rintisan Pesantren Mambaul Ulum ini diikuti beberapa pesantren lainnya. Pesantren Tebu Ireng, misalnya, pada tahun 1916 mendirikan madrasah salafiyah yang tidak hanya mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi juga mengajarkan berhitung, bahasa Melayu, ilmu bumi, dan menulis huruf latin. Model ini juga diadopsi oleh Pesantren Rejoso, Jombang yang mendirikan sebuah madrasah pada 1927.

Respons yang sama tetapi dalam nuansa yang sedikit berbeda terlihat dalam pengalaman Pondok Modern Gontor yang berdiri tahun 1926. Berpijak pada basis sistem dan kelembagaan pesantren, Pondok Modern Gontor memasukkan sejumlah mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya, mendorong santrinya mempelajari bahasa Inggris – selain bahasa Arab dan melaksanakan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler seperti olahiraga, kesenian dan sebagainya.

Kedua bentuk eksperimen ini pada dasarya terus berlanjut. Satu sisi terdapat sistem dan kelembagaan pendidikan Islam yang sebenamya pendidikan umum dengan memasukkan aspek aspek tertentu pengajaran Islam. Di sisi lain ada sistem dan kelembagaan madrasah yang menitikberatkan pengajaran agama baru kemudian

memasukkan pelajaran umum dengan keragaman corak dan orientasinya.

Organisasi-organisasi Islam lain yang bergerak di bidang pendidikan mendirikan madrasah dan sekolah dengan nama, jenis, dan jenjang yang bermacam-macam. Mathlaul Anwar di Menes, Banten mendirikan Madrasah lbtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Diniah. PUI pada tahun 1927 mendirikan Madrasah Diniah, Tsanawiyah dan Madrasah Pertanian. Perti tahun 1928 mendirikan madrasah dengan berbagai nama, di antaranya Madrasah Tarbiyah Islamiah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, dan Kuliyah Syariah. Sejak berdiri tahun 1926, NU juga mendirikan Madrasah Awaliyah, lbtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya. Sementara di Tapanuli, Medan, Al Washliyah (1930) menyelenggarakan Madrasah Tajhiziyah, lbtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul 'Ali, dan Tahassus. Di samping itu, ada madrasah yang menggunakan nama formal Islam (Kuliah Muallimin Islamiah) didirikan oleh Mahmud Yunus di Padang (1913) dan *Islamic College* didirikan oleh Pesantren Muslim Indonesia (Permi) tahun 1931.

Menilik latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan madrasah tidak hanya atas dasar semangat pembaharun di kalangan umat Islam. Kelahiran madrasah sesungguhnya juga beralas tumpu pada dua faktor penting;

Pertama, pendidikan Islam tradisional seperti surau, masjid, pesantren, dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai.

Kedua, laju perkembangan sekolah sekolah gubemen di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme, sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.

Pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya dua pola respons umat Islam yang lebih progresif, tidak semata mata defensif, terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Dengan berbagai variasi, sesuai dengan basis pendukungnya, madrasah tumbuh dan berkembang di berbagai lokasi dalam jumlah yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Dalam perkembangannya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sekarang ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975 menandakan bahwa eksistensi madrasah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Munculnya SKB 3 Menteri merupakan langkah positif untuk meningkatkan mutu madrasah; baik dari status, ijazah, maupun kurikulumnya. Pada awalnya SKB 3 Menteri tersebut juga dipermasalahkan karena komposisi pendidikan umum dan agama 70 % dan 30 %. Namun oleh Menteri Agama pada saat itu, Mukti Ali, dijelaskan bahwa dalam prakteknya kedua mata pelajaran tersebut dapat saling mengisi, sehingga sama-sama 100 % (Biografi Sosial-Politik Menteri-menteri Agama RI, 1998).

Jauh sebelum SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah telah meningkatkan penataan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Penataan itu antara lain; Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952, yang berisi klasifikasi dan penjenjangan pendidikan madrasah. Berdasarkan keputusan itu, pendidikan di madrasah dilaksanakan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat dasar 6 tahun (Madrasah Ibtidaiyah), tingkat menengah pertama 3 tahun (Madrasah Tsanawiyah), dan tingkat menengah atas 3 tahun (Madrasah Aliyah). Dalam peraturan ini disebutkan juga bahwa di ketiga tingkat madrasah tersebut minimal harus mengajarkan tiga mata pelajaran akademik yang diajarkan di sekolah umum dan mengikuti standar kurikulum Departemen Agama.

Kemudian pada tahun 1958, Kementerian Agama mengusahakan pengembangan madrasah dengan memperkenalkan model Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang ditempuh selama delapan tahun. Pendidikan Madrasah Wajib Belajar ini memuat kurikulum terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum, dan ketrampilan. Kendatipun demikian hasilnya belum optimal. Munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memperjelas posisi madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Madrasah Ibtidaiyah adalah Sekolah Dasar berciri khas Islam, Madrasah Tsanawiyah adalah SLTP berciri khas Islam dan Madrasah Aliyah adalah SMU berciri khas Islam. Konsekwensi dari semua itu bahwa madrasah harus memberikan

materi kurikulum minimal sama dengan materi kurikulum yang ada di sekolah umum.

Kini *madrasah* dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Sistem Pendidikan Nasional dan berada di bawah pembinaan Departemen Agama. Lembaga pendidikan *madrasah* ini telah tumbuh dan berkembang sehingga merupakan bagian dari budaya Indonesia, karena ia tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Kurun waktu cukup panjang yang dilaluinya, yakni kurang lebih satu abad, membuktikan bahwa lembaga pendidikan *madrasah* telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik. Karakter itulah yang membedakan *madrasah* dengan sekolah umum. Sehingga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 1989, *madrasah* didefinsikan sebagai "sekolah umum dengan ciri khas Islam", sebuah pengakuan atau sebutan yang cukup simpatik.

C. Integrasi Madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

1. Madrasah di Awal Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya terus berlanjut. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) dalam maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945 menganjurkan, bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran agar pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan". Pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat di atas, BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. (Husni Rahim, 2008)

Perhatian pemerintah RI terhadap madrasah dan pesantren ini semakin terbukti ketika Kementerian Agama resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Dalam struktur organisasinya, Bagian C adalah bagian

pendidikan dengan tugas pokoknya mengurusi masalah masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama seperti madrasah dan pesantren. Dalam kabinet Wilopo, tugas Kementerian Agama dalam bidang pendidikan dan pengajaran di samping kedua hal tersebut, ditambah lagi dengan penyelenggaraan pendidikan guru untuk pengajaran agama di sekolah umum dan guru pengetahuan umum di perguruan perguruan agama.

Namun menarik diamati, perhatian pemerintah yang begitu besar diawal kemerdekaan yang ditandai dengan tugas Departemen Agama dan beberapa keputusan BP KNIP tampaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama yaitu UU No.4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954 diundangkan, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah (umum) dan pengakuan belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. (Lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 10 ayat (2)

Dampaknya madrasah dan pesantren dianggap berada diluar sistem. Oleh karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan dibawah Menteri Agama.

Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan madrasah menurut pemerintah lebih didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan berikut ini dimana madrasah dan pendidikan keagamaan/pesantren belum dianggap bagian dari sistem pendidikan nasional dan yang baru masuk hanyalah sekolah umum Islam sebagai bagian dari sistem sekolah, seperti tampak berikut ini :
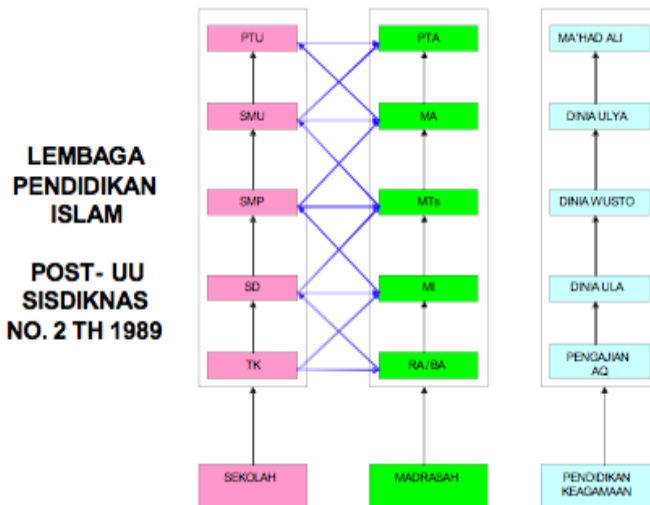
Bagan ini menggambarkan hanya sekolah yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, karena itu anak madrasah dan pendidikan keagamaan tidak dapat bergerak pindah dan melanjutkan baik secara horizontal, maupun secara diagonal ke sistem sekolah.

Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No 15 Tahun 1974.

Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.

Munculnya reaksi keras umat Islam ini disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Dan untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai konsekuensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga

menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri.

2. Munculnya SKB 3 Menteri

Dalam perkembangannya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sekarang ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Munculnya SKB 3 Menteri merupakan langkah positif untuk meningkatkan mutu madrasah; baik dari status, ijazah, maupun kurikulumnya. Pada awalnya SKB 3 Menteri tersebut juga dipermasalahkan karena komposisi pendidikan umum dan agama 70 % dan 30 %. Namun oleh Menteri Agama pada saat itu, Mukti Ali, dijelaskan bahwa dalam prakteknya kedua mata pelajaran tersebut dapat saling mengisi, sehingga sama-sama 100 % (Biografi Sosial-Politik Menteri-menteri Agama RI, 1998).

SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Meskipun demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB ini memang, status madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Dengan SKB ini pula alumni MA dapat melanjutkan ke universitas umum, dan vice versa, alumni SMA dapat melanjutkan studinya ke IAIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, dimana komposisi kurikulum madrasah 70%

mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harusi dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, bagaimanapun juga madrasah sebagai sekolah agama harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik. Namun, dengan penguasaan ilmu ilmu agama hanya 30% termasuk Bahasa Arab, tidak cukup memadai bagi alumni MA untuk memasuki IAIN, apalagi untuk melanjutkan studi di Timur Tengah dan juga menjadi calon calon ulama.

Dampak lain dari keberhasilan ini makin lemahnya penguasaan agama pada siswa madrasah, karena mereka hanya mendapatkan porsi 30% dan ini pula mengkhawatirkan beberapa tokoh Islam bahwa madrasah tidak lagi mempersiapkan calon-calon ulama di masa datang. Fakta inilah yang membuat Prof. Munawir Sadzali, ketika menjadi Menteri Agama (1983-1993), mengintrodusir – sebagai solusi terhadap apa yang disebutnya sebagai krisis ulama mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan komposisi kurikulum 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum plus pengajaran bahasa (Arab dan Inggris) secara intensif. Dengan program ini input IAIN secara kualitatif dapat ditingkatkan, dan yang lebih penting lagi menjadi support bagi kemunculan calon-calon ulama.

Sampai disini sudah tampak bahwa madrasah diinginkan untuk memberi peluang pendidikan kepada dua kebutuhan dasar ummat yaitu: Pertama, peluang bagi yang ingin memberikan pengetahuan umum sebagai fokus utama, namun porsi agama tetap sebagai identitas madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Kedua, peluang bagi yang ingin menjadikan pengajaran agama sebagai fokus utama dan pengetahuan umum sebagai tambahan (MAPK).

Undang-undang ini juga tidak menampung madrasah yang fokus utamanya pelajaran agama dan pelajaran umum sekedar tambahan yang merupakan bentuk awal dari madrasah modern di Indonesia. Di sisi lain hasil dari SKB ini belum memuaskan, karena masih sering lulusan madrasah mendapat perlakuan diskriminatif karena dianggap kemampuan umumnya belum setara dengan sekolah umum. Kenyataan itu tampak ketika lulusan madrasah mau masuk ke perguruan tinggi umum ataupun ke dunia kerja, dimana perlakuan diskriminatif sangat dirasakan oleh mereka.

Perjuangan agar mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama (integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional secara penuh), baru dicapai dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989, dimana madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah, plus pelajaran agama Islam (7 mata pelajaran). Secara operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan SD/SMP. Surat-surat Keputusan ini ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) diperkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, SK MenDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya.

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam arti penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional), tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama.

Kenyataannya beban kurikulum bagi madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dan lebih berat dibanding dengan beban belajar anak sekolah. Hal itu dikarenakan pihak madrasah dalam hal ini Departemen Agama menerjemahkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah diterjemahkan beban kurikulum madrasah adalah 100% pelajaran umum di sekolah ditambah dengan 100% pelajaran agama di madrasah. Padahal jam belajar tetap sama dan sikuensnya juga sama. Disisi lain kondisi, fasilitas dan latar belakang anak madrasah dengan anak sekolah cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kualitas anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan anak sekolah.

Namun ada juga madrasah yang memahami beratnya beban kurikulum itu, lalu mereka terpaksa menambah jam belajar hingga sore dan malam, khususnya madrasah yang dipondok pesantren seperti Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Darunnajah. Madrasah yang tidak menambah jam pelajaran ataupun tidak mensiasati makna kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah maka hasil lulusan mereka menjadi "tanggung" artinya penguasaan agama tidak memadai dan penguasaan umum juga belum mencukupi. Inilah yang kebanyakan dialami madrasah-madrasah yang akhirnya mengesankan kualitas madrasah yang rendah baik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum maupun ke perguruan tinggi agama.

Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 telah memperkuat posisi madrasah terhadap sekolah, namun disisi lain dianggap memperlemah posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang fokus utamanya agama dan pengetahuan umum sebagai tambahan. Kebijakan ini juga yang dianggap memperlemah munculnya kader-kader ulama.

Ini pula yang menjadi dasar Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama ketika itu (1983-1993) mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan kemudian dijadikan Madrasah Alyah Program Keagamaan setelah UU No. 2 Tahun 1989 yang komposisi kurikulumnya terdiri atas 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum plus pengajaran bahasa Arab dan Inggris secara intensif. Dengan program ini input IAIN secara kualitatif dapat ditingkatkan, dan yang penting lagi menjadi support bagi kemunculan calon calon ulama. Karena komposisi agamanya tetap lebih besar dari umum, maka luliusannya lebih banyak diterima di perguruan tinggi agama, khususnya di Timur Tengah.

Dilihat dari sisi ini, kehadran MAPK sejatinya adalah bentuk respon positif progresif madrasah terhadap tantangan yang dihadapi. Namun dalam kenyataannya kehadiran MAPK masih ditumpangkan menjadi bagian atau program dari MA karena politis menurut UU no.2 tahun 1989 belum memberi tempat pengakuan untuk yang jenis ini, karena jenjang dasar dan menengah pertamanya tidak diakui/tidak dimungkinkan oleh undang-undang tersebut. Demikian juga madrasah dan pesantren yang hanya semata-mata memberikan pelajaran agama tidak juga terakomodir dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ini (UU No. 2 Th 1989). Tentu hal ini masih dirasakan sebagai

bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Padahal umat menghendaki madrasah tetap memberi peluang yang sama antara madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dengan madrasah sebagai sekolah agama yang berwawasan Indonesia dan kemodernan ataupun madrasah yang semata-mata memberikan pelajaran agama. Bukankah ketiganya merupakan upaya mencerdaskan anak bangsa, namun dengan fokus yang berbeda? Jadi yang membedakan madrasah dengan sekolah umum sekarang bukan lagi pada bobot pengetahuan umumnya tapi pada kualitas dan ciri khas madrasah itu sendiri.

Sampai disini persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah terselesaikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui sama dengan sekolah. Dengan kata lain madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Hal ini menunjukkan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, karena itu anak madrasah dapat pindah dan melanjutkan pendidikan baik secara vertikal, maupun secara horizontal dan diagonal, tetapi pendidikan keagamaan di luar madrasah dan sekolah Islam masih dianggap di luar sistem.

Persoalan yang tertinggal adalah persoalan mutu madrasah yang serba tanggung. Mungkin ke depan madrasah sebagai sekolah umum dikhususkan pada penguasan bidang studi umum sebagaimana sekolah, namun ciri khas Islam ditampilkan bukan dari banyaknya mata pelajaran agama, tetapi bagaimana membuat anak didik menjadi muslim yang baik. Tentu ini menjadi tantangan berat karena harus merubah pola pengajaran agama yang cenderung kognitif ke pola afektif dan psikomotorik.

Dengan demikian porsi waktu untuk pelajaran agama dapat dikurangi, demikian juga untuk mengejar ketinggalan pelajaran umum, maka tidak semua mata pelajaran umum harus ditatap mukakan persis seperti sekolah, tapi dapat juga dengan melihat pelajaran yang lemah dan utama diberi porsi waktu yang lebih banyak sedangkan pelajaran yang kurang utama atau dapat dipelajari sendiri atau dengan sistem penugasan dan porsi tatap mukanya dikurangi. Dengan demikian beban kurikulum madrasah tidak berat sehingga penguasaan materi dapat lebih diutamakan.

Setelah persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas selesai secara sistem, maka masih ada persoalan dengan madrasah sebagai sekolah agama yang memberikan porsi utama pengajaran agama ditambah pengetahuan umum sebagai ciri ke Indonesiaan dan kemodernan belum mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional versi UU No. 2 Tahun 1989. Hal ini tampak dari data siswa yng ikut ebtan 1994/1995 ternyata murid terbanyak berada di jurusan umum (52,11%) yang mencakup IPS, IPA, dan Budaya. Sedangkan jurusan ilmu agama hanya (47,89%).

Hal ini masih mengundang perasaan yang kurang puas di kalangan umat, karena masih ada perasaan pemerintah memojokkan madrasah yang berfokus pada pengajaran agama dan dengan tambahan pelajaran umum. Juga masih terdengar pendapat yang menyatakan bahwa madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam itu sebagai upaya "mendangkalkan agama" bagi umat Islam Indonesia. Tentu prasangka ini tidak beralasan, karena memang peminat untuk memasukkan anak ke madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam jauh lebih besar dibanding dengan yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah agama yang pengetahuan agamanya lebih besar dari pengetahuan umum seperti ditunjukkan oleh data bahwa anak-anak yang memilih program pilihan agama jauh lebih kecil (48%) dari yang memilih pilihan IPS atau matematika (52%). "(yang telah disahkan Presiden pada tanggal 8 Juli 2003 setelah melalui perdebatan panjang di masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat).

Perjuangan untuk memasukkan madrasah sebagai sekolah agama (fokus utama pengajaran agama) dalam sistem pendidikan nasional baru berhasil setelah diundangkannya UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan disamping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus (pasal 15). Dalam pendidikan keagamaan ini tidak termasuk lagi madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. MI, MTs, MA dan MA Kejuruan sudah dimasukkan dalam jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan keagamaan ini diatur dalam bagian tersendiri (bagian kesembilan) pasal 30 "(yang mengatur:

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbaja samanera dan bentuk lain yang sejenis;
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskrimanasi di mata negara. Secara formal madrasah sebagai sekolah agama dan pendidikan keagamaan lainnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menampakkan bahwa sekolah islam, Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan pendidikan keagamaan lainnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu mobilitas diantara lembaga pendidikan tersebut terbuka baik mobilitas vertikal, horizontal dan diagonal.

Undang-undang sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini telah membuka peluang kembalinya kebhinekaan lembaga pendidikan islam yang diakui menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstranei, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurkulum sekolah. Madrasah sebagai sekolah agama dan berbagai jenis pendidikan keagamaan lainnya perlu menata diri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikannya secara tersendiri namun sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Setelah diundangkannya Sistem Pendidikan Nasional 2003, maka madrasah sudah bisa memilah diri menjadi tiga pola yaitu:

a. Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, seperti yang selama ini. Madrasah jenis ini harus berani menterjemahkan kurikulumnya tetap 100% walaupun umum sama dengan sekolah dan khusus sama dengan madrasah. Ini berarti pel;ajaran umum tidak semua harus diajarkan tatap muka , demikian juga pelajaran agama. Yang diajarkan hanya yang esensial (Mata pelajaran utama sekolah umum itu). Demikian juga dengan pelajaran agama, tidak semua diajarkan tatap muka. Dengan demikian anak didik dapat lebih berkonsentrasi kepada pelajaran umum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, namun mereka tetap dididik dan dilatih untuk menjadi seorang muslim yang baik. Dengan cara ini akan tampak madrasah sebagai sekolah umum yang berani bersaing kualitas dengan sekolah umum lainnya, namun mereka adalah muslim-muslim yang baik (taat menjalankan agamanya) Dengan demikian madrasah akan dikenal sebagai lembaga pendidikan Indonesia yang menghasilkan lulusan yang mengusai pengetahuan umum dengan bagus, tetapi juga sebagai muslim yang baik.

b. Madrasah sebagai sekolah agama, di mana fokus utama adalah pelajaran agama. Pelajaran umum hanya sebagai penunjang saja. Di sini murid madrasah disiapkan untuk penguasaan agama dengan baik tetapi juga mendapat tambahan masalah keindonesiaan dan kemodernan. Ini penting agar lulusan madrasah sebagai sekolah agama yang hidup dan tumbuh di bumi Indonesia, tetapi berpengetahuan luas dan berwawasan global. Madrasah seperti inilah yang akan melahirkan calon-calon ahli agama yang berwawasan luas dan global. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, maka sudah waktunya Departemen Agama segera memisahkan Madradsah Aliyah Program Keagamaan menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan yang beridiri sendiri dan terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam.

c. Madrasah sebagai sekolah kejuruan, dimana fokus pelajaran pada ketrampilan hidup (*life skill*) namun siswa dididik dan dilatih untuk menjadi seorang muslim yang baik. Untuk itu perlu ditata kurikulum yang cocok untuk menghasilkan anak didik dengan kompetensi

yang demikian itu. Sudah waktunya Departemen Agama segera memiisahkan Madrasah aliyah program Ketrampilan menjadi Madrasah Aliyah Kejuruan yang berdiri sendiri terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sebagai tindak lanjut dari UU No.20 Th 2003.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ini, telah memberi tempat yang layak bagi madrasah sebagai sekolah agama dan berbagai pendidikan keagamaan lainnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu sudah sepatutnya kesempatan penghargaan ini digunakan dengan sebaik-baiknya bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk menata diri sesuai dengan ketentuan perundangan ini. Artinya segera menata pendidikan keagamaan yang mana masuk pendidikan formal, mana yang nonformal dan mana yang informal. Demikian juga mana yang berjenjang dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, yang mana yang tidak perlu berjenjang. Dan yang lebih mendesak lagi segera memisahkan MA Program Keagamaan dan MA Program Ketrampilan menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang berdiri sendiri.

BAB III
PROBLEMATIKA MADRASAH DI INDONESIA

A. Stigma Madrasah; *The Second Class*

Secara historis, lembaga pendidikan agama Islam pertama di tanah air adalah dalam bentuk pondok pesantren. Dengan ciri *relegius oriented*, Pondok pesantren telah meletakkan basis pendidikan keagamaan yang kuat. Para santri tidak hanya dibekali pemahaman agama, tetapi juga berkewajiban menyebarkan dan mempertahankan agama Islam.

Lembaga pendidikan Islam lainnya dikenal madrasah, lebih muda usianya dari pondok pesantren. Madrasah diperkirakan lahir awal abad 20 M. ditandai munculnya madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta pada tahun 1905 dan sekolah Adabiyah yang didirikan Syekh Abdullah Ahmad di Sumatra Barat pada tahun 1909. Dalam perjalanannya lembaga pendidikan Islam itu tak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Tak mendapat kesempatan berkembang di tengah penduduk muslim terbesar di bumi nusantara.

Menteri Agama, M. Maftuh Basyuni ketika itu mengakui bahwa sekitar 92,8 persen lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama adalah swasta. Karena tak ditangani dengan baik, mutunya di bawah lembaga pendidikan yang ada di Departemen Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas 2003 memposisikan semua lembaga pendidikan yang berada di bawah Diknas dan Depag sama. Tak ada lagi dikotomi. Namun anggarannya tak proporsional.

Prof Mukhti Ali menjelaskan bahwa seharunya alokasi dana yang diberikan proporsional, karena sama-sama menjalankan pendidikan nasional. Dari total anggaran pendidikan nasional Rp 51 triliun, anggaran yang dialokasikan ke Depag di luar gaji guru hanya 4,3 triliun.

Padahal di sisi lain tuntutan pemerataan pendidikan, perluasan akses, peningkatan mutu, dan daya saing menghadapi globalisasi sudah dirasakan mendesak. Kebijakan pendidikan yang berpihak kepada kaum miskin dan madrasah swasta sangat dibutuhkan. Karena itu Depag dan Diknas harus bersinergi agar kebijakan pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan di tengah dinamika pembangunan pendidikan.

Realitas bahwa pemerintah hanya mengurusi sekolah negeri merupakan suatu fakta tak terbantahkan. Adanya UU Sisdiknas sudah seharusnya pemerintah mensejajarkan dalam memberikan bantuan. Kendati begitu Ponpes dan madrasah patut diacungi jempol karena tetap eksis dan tak mengandalkan bantuan APBN dan APBD.

Jumlah medrasah pada 2007 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) 23.517 lembaga, 93 persen di antaranya swasta. Total Madrasah Tsanawiyah (MTs) 12.054 lembaga dengan 90 persen di antaranya swasta. Kemudian Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 4.687 lembaga, 86 persennya swasta. Dari besaran angka lembaga pendidikan itu, dapat diinterpretasikan bahwa eksistensi madrasah di tanah air menentukan merah-putihnya pendidikan nasional.

- Bukan Pilihan Utama

Jangankan menjadikan madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat, untuk menyekolahkan putra-putri sebagai *institution of choice* sangat jauh. Masyarakat Indonesia masih menilai bahwa lembaga pendidikan ini bukan pilihan favorit. Di sisi lain masyarakat belum mengenalnya. Ini memang ironis, padahal madrasah sudah lama berdiri puluhan tahun di bumi nusantara.

Namun di daerah yang terkenal relegius, seperti Aceh dan Banten, madrasah cukup dikenal. Tetapi jika dilihat secara nasional tingkat favoritas masyarakat Indonesia terhadap madrasah masih rendah dibanding sekolah pada umumnya. Hal lain yang menyebabkan

madrasah tak menjadi pilihan utama karena menyangkut rendahnya prestasi akademis ilmu umum siswa madrasah dibanding siswa sekolah.

Suatu kenyataan, di madrasah ada pembedaan, yaitu ilmu umum seperti matematika, kimia dan teknologi informasi/IT serta ilmu agama yang meliputi baca Al Quran, memahami hadis dan tarekh/sejarah. Rendahnya prestasi akademis ilmu umum siswa madrasah dibanding siswa sekolah merupakan penyebab rendahnya tingkat popularitas masyarakat terhadap madrasah dibanding terhadap sekolah.

Ini terjadi lantaran kurikulum madrasah hanya berisikan 70 persen ilmu umum. Sedangkan kurikulum sekolah berisi 100 persen ilmu umum dengan asumsi mata pelajaran pendidikan agama dikecualikan. Meski pencapaian Nilai Ujian Nasional (NUN) madrasah ada yang cukup baik, namun madrasah tetap memperoleh stigma sebagai lembaga pendidikan terendah di tengah masyarakat Islam. Bagi insan madrasah memang terasa pahit, namun suatu kenyataan yang terasa pahit harus dapat diterima.

Lantas apa yang dilakukan Dirjen Pendidikan Islam, Muhammad Ali ketika itu dalam menghadapi hal itu? Ia punya beberapa kiat. Cara paling konvensional adalah menempatkan ilmu umum yang porsinya sama dengan yang diberikan di sekolah. Kemudian, ditambah dengan ilmu agama. Cara ini bagus, katanya. Tapi, hanya efektif dijalankan oleh madrasah dengan siswa yang diasramakan alias dipondokkan.

Madrasah yang eksistensinya di tengah pondok pesantren biasanya mampu menjalankan cara ini. Tapi, pada madrasah non-Ponpes yang siswanya tidak mondok, cara ini berat untuk dijalankan. Karena itu, cara modern yang bisa ditempuh adalah membenahi metode pembelajaran (*learning method*), meningkatkan mutu guru (*teacher quality*), melengkapi fasilitas belajarnya (*fascility*).

Ketiga cara ini, kata Muhammad Ali, bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi, lebih produktif dilakukan secara terintegrasi. Namun cara konvensional dan modern pun bisa dipadukan secara produktif. Kini muncul pertanyaan, masih adakah SDM di madrasah yang memiliki kemampuan. Tentu saja ada jika benar-benar dicari. Di madrasah banyak mutiara terpendam yang belum digali, diasah dan dimanfaatkan potensinya.

B. Madrasah; *As a Step Child*

Moh Ma'ruf, pada 21 September 2005 ketika itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri No.903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006. SE ini menimbulkan kontroversi, terutama dikalangan pegiat pendidikan Islam. SE dinilai anti-lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren).

Pada lampiran II SE tersebut, yakni pada bagian yang mengatur anggaran belanja daerah disebutkan, "Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengalokasian anggaran APBD yang diperuntukkan membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperbolehkan."

Sebagaimana diketahui, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan berhubungan secara vertikal dengan Departemen Agama karena tidak termasuk wewenang yang diotonomikan. Konsekuensinya, sesuai dengan SE tersebut, pemerintah daerah tidak berhak mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk membantu madrasah dan pesantren. Anggaran untuk kedua lembaga tersebut berasal dari pos APBN melalui Depag (sekarang kemenag).

Wakil Ketua komisi VIII DPR RI, Yoyoh Yusroh Ketika itu secara tegas menolak SE tersebut dan meminta pemda untuk tetap memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan. Sikap serupa juga disuarakan dua organisasi massa Islam, NU dan Muhammadiyah.

Sementara itu Menteri Agama, Maftuh Basyuni, menilai SE Mendagri lahir dari kesalahpahaman dalam memandang madrasah. Menag pun secara tegas meminta Mendagri untuk meninjau ulang SE tersebut. Lebih lanjut Menag menyatakan seharusnya pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih kepada madrasah dan pesantren karena selama beberapa dekade yang lalu kedua lembaga pendidikan tersebut dianaktirikan oleh pemerintah.

Penolakan atas SE tersebut wajar bila melihat kondisi lembaga pendidikan keagamaan yang jauh tertinggal dari lembaga pendidikan umum. Data kelulusan siswa Madrasah membuktikan ketertinggalan

tersebut. Untuk tahun ajaran 2004/2005, dengan standar kelulusan 4,26, tingkat kelulusan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs, setingkat SMP) hanya 79,20 persen, sedangkan SMP sebanyak 80,52 persen. Untuk Madrasah Aliyah (MA, setingkat SMA) sebanyak 71,35 persen di bawah SMA/SMK yang berjumlah 74,39 persen.

1. Problem Klasik

Bila diamati dan di lihat lebih cermat, terdapat problem klasik di balik persoalan SE tersebut, yaitu problem dualisme pendidikan. Di satu sisi, terdapat lembaga pendidikan umum berada di bawah naungan Depdiknas, dan di sisi lain Depag yang membina lembaga pendidikan keagamaan. Ini merupakan problem klasik yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda dan belum terpecahkan hingga kini.

Untuk memperlemah persatuan bumiputra, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik devide et impera, yang diaplikasikan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah umum semisal *Hoofdenschool* (sekolah raja), *De Scholen de Eerste Klasse* (sekolah angka satu), De Scholen de Tweede Klasse (sekolah angka dua), MULO, Stovia, dan sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut didirikan sebagai antitesa dari lembaga pendidikan agama (pesantren) yang saat itu telah mengakar kuat dalam masyarakat pribumi.

Selain alasan strategis politis, upaya Belanda tersebut juga didasari episteme sekularisme Barat modern. Akibat dualisme ini adalah lahirnya lulusan yang berbeda, bahkan bertentangan pola pikir dan pola lakunya. Lulusan pesantren biasa disebut kaum sarungan (santri) dengan gaya berpikir tradisional-religius, berbeda dengan lulusan sekolah Belanda yang suka berpikir dan bersikap seperti laiknya orang Eropa.

Upaya mempertemukan, setidaknya menjembatani dikotomi pendidikan tersebut telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Tetapi sayangnya, solusi yang diupayakan tetap berada dalam lingkaran logika dikotomik kolonialisme Belanda.

Sedianya, pembentukan Departemen Agama, yang salah satu tugasnya membina sekolah agama, dan Departemen Pendidikan yang mengurusi sekolah-sekolah warisan Belanda, dimaksudkan untuk tujuan mulia

tersebut. Tetapi sejarah di kemudian hari mencatat lain, institusionalisasi lembaga pendidikan dalam dua departemen yang berbeda, menjadikan polarisasi pendidikan Indonesia semakin mengental.

2. Jatah Anggaran

Catatan sejarah yang menyimpang ini tidak lepas dari sikap diskriminatif yang dipraktikkan pemerintah. Selama beberapa dekade pasca-kemerdekaan, lembaga pendidikan di bawah Depag mendapatkan jatah anggaran jauh dibawah anggaran yang diterima lembaga pendidikan yang dinaungi Diknas. Sebagai perbandingan, pada tahun 1993/1994 terdapat 24.979 MI, yang sebagian besarnya, yakni 24.372 (97,6 persen) dimiliki lembaga non-pemerintah (swasta). Padahal, di saat yang sama, SD swasta di bawah naungan Diknas hanya sebesar 6 persen. Pada tingkat SLTP, terdapat 7.499 (92 persen) MTs swasta dari 8.081 MTs yang ada, dan di tingkat SLTA terdapat 88 persen (2.573) MA swasta dari jumlah total MA sebanyak 2.923. Seakan tobat dari kesalahan kebijakannya, pemerintah kemudian 'dipaksa' mengembalikan madrasah dan pesantren dalam posisi sederajat dengan lembaga pendidikan dalam naungan Diknas. Puncak 'pemaksaan' tersebut terjadi dengan disahkannya UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN).

Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan, secara jelas menyebutkan tidak adanya perbedaan lembaga pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ini artinya, sesuai dengan Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah, terutama Bagian Keempat, Pasal 10 dan 11, lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Depag berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan lembaga di bawah Diknas tanpa diskriminasi.

Meski demikian, lagi-lagi solusi tersebut tidak bisa keluar secara penuh dari logika dikotomisme warisan Belanda. Setidaknya, SE Mendagri tanggal 21 September 2005 tersebut telah membuktikan kesimpulan ini.

Sering dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap otonomi daerah, maka sebagian besar urusan pemerintah

akan didesentralisasikan kepada daerah setempat. Di antara urusan yang didesentralisasikan adalah masalah pendidikan.

Adapun tujuan adanya desentralisasi adalah :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, sekaligus juga mengurangi campur tangan pusat dalam hal-hal lokal dan memberi peluang untuk kordinasi di tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka terhadap usaha pembangunan sosial ekonomi.
3. Menyusun program-program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal agar lebih realistis.
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri. (Emil J. Sady dalam Tjokroamidjaja, 1978).

Dengan kebijakan desentralisasi tersebut, maka ada beberapa konsekwensi yang harus ditanggung, antara lain :

1. Implikasi administrasi, yakni pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi.
2. Implikasi kelembagaan, yakni kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan unit-unit daerah.
3. Implikasi keuangan, yakni kebutuhan dana yang lebih besar bagi derah untuk dapat melaksanakan fungsinya di bidang pembangunan.
4. Implikasi pendekatan perencanaan, yakni button-up dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Dalam urusan pendidikan yang semula di-sentralisasi dari pusat, termasuk semua kurikulum ditentukan oleh pusat, maka pada saat otonomi sudah efektif dilaksanakan, kurikulum lokal justru lebih banyak. Sebagai konsekwensi lain dari sistem desentralisasi adalah juga masalah dana pendidikan. Bila pada saat sentralisasi dana pendidikan banyak dicover dari pusat, maka sekarang tergantung dari pemerintah daerah dan masyarakat. *Community Based Education* merupakan pendidikan yang berbasis masyarakat yang berkembang sebagai konsekwensi dari rencana otonomi daerah yang dengan sendirinya akan terdapat otonomi terhadap bidang lain termasuk pendidikan. Jika dilihat kaitannya dengan madrasah, maka sistem sentralisasi yang ada selama ini akan dirubah menjadi desentralisasi.

Adapun hal-hal yang akan didesentralisasikan adalah:

a. Masalah yang menyangkut bidang akademik, di antaranya adalah masalah kurikulum yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing, demikian juga masalah EBTANAS yang kemungkinan nantinya akan diganti dengan ujian tersendiri di masing-masing madrasah. Khusus untuk tingkat SD/MI EBTANAS sudah dihapus. Sehingga praktis yang menyelenggarakan ujian akhir adalah lembaga masing-masing.
b. Masalah yang menyangkut bidang non akademik, seperti membuat perencanaan keuangan, administrasi, personalia dan sebagainya.

Dalam kerangka desentralisasi dan globalisasi, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

a. Menata mental kita, yang semua hanya menerima matang, baik dana maupun kurikulum, harus dirubah dengan sikap mental suka memberi, menghasilkan dan berkreasi. Persoalan perubahan mentalitas ini sangat penting. Karena selama hampir 33 tahun kita selalu dibiasakan dengan budaya atas 'petunjuk atasan'. Di negara ini hampir tidak ada ruang gerak untuk mengembangkan kreatifitas, semua harus atas persetujuan atasan. Guru mengajar harus sesuai petunjuk pusat. Demikian pula yang berhak mengevaluasi juga pusat, sehingga peran guru tidak lebih dari robot yang dimainkan oleh pusat. Akibatnya kita selalu terbiasa dengan menerima matang, karena memang tidak boleh meramu sendiri.
b. Meningkatkan kualitas akademik dengan membekali siswa terhadap kemampuan umum yang dapat menjadi alat dalam persaingan ke depan, misalnya bahasa Inggris dan sebagainya. Salah satu indicator keberhasilan sebuah lembaga pendidikan adalah bila alumninya dapat terserap dalam lapangan pekerjaan atau dapat melanjutkan di sekolah/perguruan tinggi yang favorit. Untuk itu, maka peningkatan kualitas akademik mutlak dilaksanakan.
c. Perlu dipersiapkan guru-guru yang berkualitas, personalia yang profesional dan menunjang terhadap desentralisasi ini. Sumber daya manusia yang mengelola sebuah lembaga adalah kunci keberhasilan lembaga itu sendiri. Untuk itu, maka lembaga harus memeberikan dukungan kepada guru dan pegawai agar lebih berkualitas melalui peningkatan pelatihan, peningkatan pendidikan dan ruang gerak yang lebih kreatif.

d. Perlu peran serta BP-3 secara maksimal. BP3 bukan hanya sekedar alat sekolah untuk mengumpulkan dana, akan tetapi ia juga dapat berperan sebagai pengendali mutu madrasah dan penyumbang ide-ide untuk kemajuan madrasah. Pemahaman masyarakat bahwa pendidikan adalah urusan sekolah, urusan guru, urusan yayasan, harus segera diluruskan. Bahwa urusan pendidikan semestinya adalah tanggungjawab orang tua, ditambah masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu konsekwensinya adalah apabila orang tua menginginkan lembaga pendidikan yang bonafid dan berkualitas, maka harus seimbang dengan biaya yang disumbangkan kepada lembaga pendidikan tersebut. Karena tidak mungkin maju sebuah lembaga pendidikan yang tidak dikelola secara professional dan dana yang memadai. Logikanya, agar guru yang mengajar dapat berkonsentrasi mengajar dengan baik, maka harus ditunjang dengan sarana dan prasarana. Artinya kebutuhan lembaga terpenuhi, demikian juga kebutuhan keluarga guru juga terjamin. Sehingga ketika mengajar tidak terlintas dalam pikiran ‘bagaimana keluarga kami makan besok’.

C. Marginalisasi Madrasah

1. Termarginalkan

Madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang dalam sejarah sangat konsisten melahirkan intelektual intelektual bermoral karena nilai-nilai keagamaan sangat subur dalam sistem pendidikan yang juga media perjuangan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Islam secara fundamental. Seharusnya proses pembelajaran dan pendidikan yang dianut sistem madrasah perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan memberikan porsi perhatian yang seimbang mengingat peranannya yang sangat krusial. Di beberapa daerah, keberadaan madrasah seakan termarginalkan dari kebijakan pemerintah setempat dalam pengembangannya yang tidak tersentuh sedikitpun dari orientasi konsep kemajuan yang digagas oleh pemerintah setempat, agar lebih komperhensif dalam membangun dunia pendidikan khususnya meningkatkan iptek maupun imtaq. Tidak masuknya madrasah dalam konsep 'Cerdas' merupakan pengingkaran

terhadap UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1).

Kemudian pada pasal 11 ayat 1 disebutkan pula, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Merujuk kepada ketentuan di atas, seharusnya madrasah juga harus menjadi bagian realisasi konsep kemajuan guna memacu peningkatan potret kualitas dan kuantitas pendidikan khususnya tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Alangkah naifnya bila madrasah, lembaga pendidikan Islam sebagai 'dapur' utama menciptakan dan melahirkan generasi berakhlak karimah yang menjadi pondasi kemajuan bangsa tidak mendapatkan perhatian dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan yang jelas-jelas memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi atau perbedaan sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.

2. Peranan Madrasah

Ada hal yang menarik penggalan dari visi Bupati Deli Serdang di atas yang ingin menjadikan kabupaten ini sebagai daerah yang religius. Dari kacamata Islam, menjadikan daerah yang relegius merupakan kewajiban setiap muslim sehingga setiap desah nafas, tutur kata, langkah dan semua aktivitas seorang muslim kental dengan nuansa religius.

Peranan madrasah untuk menjadikan daerah ini sebagai kabupaten religius sangat jelas. Lembaga pendidikan Islam ini menawarkan konsep pendidikan prinsipil (paling dasar) terhadap pemahaman tentang ajaran Islam yang mewajibkan semua umatnya berakhlak mulia. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa misi pertama dirinya diutus ke dunia yakni memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia dan wadah interpretasinya (tafsiran) adalah madrasah.

Ketika peranan madrasah dimarginalkan, bisa dipastikan implikasi (dampak) negatifnya akan menjadi 'wabah' yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat sebagai konsekuensi tidak kuatnya atau melemahnya peranan madrasah sehingga terjadi dekadensi (keterpurukan) moral bangsa kita karena dipimpin dan dihuni orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Karena itu, di dalam pemahaman literatur Islam disebutkan bahwa adab (akhlak yang baik) kedudukannya lebih ketimbang ilmu. Fakta menjawab dengan jelas, karena tidak amanahnya para pemimpin bangsa Indonesia dalam memandu negara ini, kehancuran dan bencana menjadi bagian dari pemandangan mata kita setiap hari bahkan mungkin pernah kita rasakan. Karena itu, sudah saatnya Bupati Deli Serdang memberikan porsi perhatiannya terhadap lembaga pendidikan madrasah di daerah yang dipimpinnya untuk menghidupkan kembali peranannya agar bisa menjadi kabupaten religius.

Beberapa paradigma 'basi' namun tetap relevan sepanjang masa yang harus menjadi prioritas yakni, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi membangun secara bersama-sama, memformulasikan sistem pembinaan yang lebih strategis, meningkatkan kesejahteraan para gurunya serta mem*back up* program ini menjadi 'Gerakan Membangun Madrasah' lewat dukungan dana APBD Kabupaten Deli Serdang sebagaimana aplikasi konsep Cerdas dan GDSM sekaligus memenuhi tuntutan amanah UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Gerakan Membangun Madrasah tidak saja akan meningkatkan kualitas pendidikan agama sebagai pondasi utama khususnya umat Islam di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki korelasi penting dengan visi yang diusung, melainkan akan membawa perubahan baru perwajahan pembangunan karena meletakkan asas pembangunannya berakar pada akhlak mulia.

D. Problem Besar Madrasah

Prof Dr H Ki Supriyoko, M.Pd. mengatakan bahwa salah satu kekeliruan kebijakan pendidikan yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja pendidikan (*educational performance*) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kalau kita berbicara

mengenai peningkatan mutu pendidikan dan masalah-masalah kependidikan lainnya seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah.

Muhammad Nuh (mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo), dalam salah satu acara pada sebuah pondok pesantren di Jawa Timur bahkan sempat menyatakan bahwa sekarang ini pemerintah hanya mengurusi sekolah negeri. Sudah saatnya sekolah negeri dan sekolah dalam pondok pesantren (notabene madrasah) disejajarkan dalam hal bantuan yang diberikan. Pada sisi lain Pak Menteri juga memuji bahwa madrasah dalam pondok pesantren dapat dijadikan contoh pendidikan yang tidak mengandalkan bantuan dari APBN maupun APBD.

Adanya pandangan yang tidak memperhitungkan potensi madrasah dalam penentuan kinerja pendidikan nasional jelas tidak tepat, bahkan keliru sama sekali. Di samping eksistensinya sudah sangat mapan maka jumlahnya pun sangat signifikan dalam belantara pendidikan di Indonesia.

Berapa jumlah madrasah di Indonesia? Menurut catatan Departemen Agama (2007), jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai 23.517 lembaga, 93 persen di antaranya swasta. Total Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 12.054 lembaga dengan 90 persen di antaranya swasta. Lalu, Madrasah Aliyah (MA) jumlahnya 4.687 lembaga, 86 persen di antaranya swasta. Dari angka-angka ini diinterpretasi bahwa eksistensi madrasah di Indonesia sangatlah menentukan merah-putihnya pendidikan nasional.

E. Problema Kemadrasahan

Problema besar pertama yang dihadapi madrasah di Indonesia sekarang ini adalah belum optimalnya tingkat favoritas masyarakat terhadap lembaga madrasah itu sendiri. Hal ini memang kenyataan. Jangankan madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat, untuk memadrasahkan (menyekolahkan) putra-putri atau istilah menterengnya menjadi *institution of choice* saja belum banyak muncul, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak. Ini lucu karena eksistensi madrasah di

Indonesia setidaknya sudah puluhan tahun. Jadi, tidak dapat disebut 'bayi' kemarin sore.

Memang benar di kalangan tertentu, terutama kalangan pesantren, minat masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi dan angka statistik pun telah menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Meski demikian secara nasional tingkat favoritas masyarakat kita terhadap madrasah lebih rendah dibanding sekolah pada umumnya.

Problema besar kedua menyangkut lebih rendahnya prestasi akademis ilmu umum siswa madrasah dibanding siswa sekolah. Sependapat atau tidak, banyak warga madrasah yang membedakan pengetahuan, ilmu, dan keterampilan menjadi dua; yaitu ilmu umum (seperti matematika, kimia dan teknologi informasi (TI) serta ilmu agama (seperti membaca Alquran, memahami Hadis, dan Tarekh. Secara hipotetik lebih rendahnya prestasi akademis ilmu umum siswa madrasah dibanding siswa sekolah inilah yang menyebabkan lebih rendahnya tingkat favoritas masyarakat terhadap madrasah dibanding terhadap sekolah. Kenapa hal itu terjadi? Ini muncul karena kurikulum madrasah hanya berisikan 70 persen ilmu umum, sedangkan kurikulum sekolah berisi 100 persen ilmu umum dengan asumsi mata pelajaran pendidikan agama dikecualikan.

Sebenarnya pencapaian nilai ujian nasional (NUN) madrasah cukup membanggakan. Ilustrasi riilnya sebagai berikut. Secara nasional pencapaian rata-rata NUN tertinggi tahun 2006 untuk SMA program IPA sebesar 28,97 oleh SMA Negeri 1 Bangil Pasuruan, untuk MA program IPA sebesar 27,57 oleh MA Ibadurrahman Stabat. Peringkat kedua sebesar 28,38 untuk SMAN Genteng dan 27,21 untuk MA Jeumala Amal. Peringkat ketiga sebesar 28,33 oleh SMA Negeri 1 Pandaan dan 27,10 oleh MA Negeri Bangkalan, dan seterusnya. Untuk SMA dan MA jurusan IPS dan bahasa petanya sama saja. Demikian pula untuk SMP dan MTs.

Pencapaian rata-rata NUN siswa madrasah memang lebih rendah daripada siswa sekolah, tetapi terpautnya relatif kecil. Sebenarnya hal ini membanggakan bagi madrasah mengingat substansi ilmu umum di dalam kurikulum madrasah hanya 70 persen. Apakah masyarakat kita dapat memahami kebanggaan tersebut? Pada umumnya tidak! Mereka tahunya pencapaian prestasi akademis siswa

madrasah lebih rendah daripada siswa sekolah. Bagi insan madrasah, memang hal ini terasa pahit, tetapi harus dapat diterima.

F. Solusi kreatif

Bagaimana memecahkan problema besar kemadrasahan tersebut? Ada beberapa cara yang perlu dipertimbangkan. Cara yang paling konvensional adalah menyampaikan ilmu umum yang porsinya sama dengan yang diberikan di sekolah, kemudian ditambah dengan ilmu agama. Cara ini bagus, tetapi hanya efektif dijalankan oleh madrasah dengan siswa yang diasramakan alias dipondokkan.

Madrasah yang eksistensinya di tengah pesantren biasanya mampu menjalankan cara ini secara produktif. Namun, pada madrasah non-pesantren yang siswanya tidak menginap, cara ini sangat berat untuk dijalankan.

Cara modern yang bisa dijalankan adalah membenahi metode pembelajaran (*learning method*), meningkatkan mutu guru (*teacher quality*), atau melengkapi sarana dan fasilitas belajarnya (*facility*). Ketiga pembenahan ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Tetapi, lebih produktif dijalankan secara terintegrasi. Lebih daripada itu bahkan cara konvensional dengan cara modern tersebut pun bisa dipadukan secara produktif.

Apakah ada SDM di madrasah yang dapat menjalankan cara tersebut di atas? Tentu saja ada, bahkan banyak! Masalahnya di madrasah itu sendiri banyak mutiara terpendam yang belum digali, diasah, dan dimanfaatkan potensinya.

G. *Quo Vadis* Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang merepresentasikan komitmen umat Islam Indonesia dalam bidang pendidikan. Eksistensi madrasah diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional yang tidak dibedakan dari lembaga pendidikan umum sejenis sebagaimana diatur pasal 17 dan 18 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan yuridis itu menjadi modal potensial bagi peningkatan peran madrasah dalam upaya pembangunan sektor pendidikan yang berkeadilan.

Dewasa ini, terdapat 5,9 juta anak yang sedang belajar di bangku madrasah. Mayoritas (85,2%) dari mereka berlatar kehidupan keluarga miskin dan kurang beruntung sehingga 10% dari jumlah tersebut mengalami putus sekolah (Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005-2006). Anak-anak dari kaum miskin itu adalah warga negara Indonesia asli yang nasibnya kurang beruntung. Mereka memiliki kapasitas otak yang sama dengan anak-anak yang lebih beruntung, tetapi ruang memori dan sensitivitas syaraf otak mereka terhadap pengetahuan masih belum banyak diberdayakan.

Genealogi madrasah memang lahir dari masyarakat pinggiran yang kemudian menjadi ciri identitas historis yang sulit dipisahkan dari dinamika madrasah dewasa ini. Kenyataan bahwa lebih dari 70% madrasah berada di pedesaan dapat menjadi gambaran betapa faktor geografis menjadi penghambat akses pendidikan bermutu bagi mayoritas siswa madrasah.

Selain itu, populasi madrasah swasta yang mencapai 91,4% tidak hanya dapat dimaknai dari besarnya peran masyarakat sebagai sesuatu yang mengagumkan, tetapi juga perlu dilihat dari dampak efek domino status tersebut. Madrasah swasta di negeri ini masih sulit diidentikan dengan jaminan kualitas, walaupun sejumlah kecil berhasil menegasikan diri dari kenyataan ini dan tampil sebagai lembaga kompetitif.

1. Anatomi Persoalan

Madrasah, sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, dihadapkan pada sejumlah persoalan yang tidak mudah dipecahkan. Persoalan itu menyangkut masalah klasik seperti kelemahan infrastruktur, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas calon siswa, kurikulum, proses pembelajaran, dan manajemen kelembagaan. Masalah tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh kondisi awal yang melibatkan banyak aspek.

Pendirian madrasah swasta, misalnya, seringkali kurang mempertimbangkan pemenuhan aspek mutu pelayanan pendidikan. Patron individual atau kelompok yang mendirikan madrasah kurang memperhitungkan risiko-risiko yang akan muncul kemudian. Inisiatif semacam ini memang layak diapresiasi, tetapi kenyataan bahwa sulitnya upaya peningkatan mutu madrasah lebih banyak diakibatkan

oleh sejumlah variabel kelemahan, terutama pada madrasah berstatus swasta.

Dari sisi pengembangan kurikulum, tampaknya madrasah masih akan terus dihadapkan pada dilema dikotomi keilmuan. Madrasah menghadapi dua pilihan sulit antara dua kebutuhan yang berbeda selama rekonstruksi dan sistematisasi tujuan metafisik pendidikan Islam belum terumuskan dengan baik.

Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama dan pengamalan ajaran Islam, namun di sisi lain ia harus mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak semuanya dapat dipecahkan dengan ilmu agama.

Persaingan antara lembaga pendidikan juga menjadi persoalan yang dihadapi madrasah ketika kompetisi itu dilandasi pertarungan identitas. Pertarungan identitas berlaku pada disparitas sekolah umum dengan madrasah, negeri dengan swasta, afiliasi dengan nonafiliasi, dan simpul-simpul pembeda lainnya. Bahkan kepentingan identitas ironisnya dapat terjadi pada tataran kebijakan departemen yang sama-sama mengelola pendidikan.

Persoalan demikian berimbas pada kurang proporsionalnya perhatian terhadap madrasah dan madrasah swasta acapkali menjadi *victim* atas perhelatan berbagai kepentingan.

Ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah juga perlu diperjuangkan. Kini, ada kecenderungan bahwa ikatan emosional terhadap madrasah semakin luntur seiring dengan menguatnya pertimbangan rasional dalam menentukan preferensi pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, anggapan lama yang selalu mengedepankan kuatnya ikatan emosional terhadap madrasah boleh jadi hanyalah sebuah romantisme karena dalam kenyataannya madrasah dihadapkan pada tantangan yang makin sulit dalam merebut simpati masyarakat luas, terlebih pada masyarakat perkotaan.

2. Kebijakan dan Anggaran

Mengatasi celah antara kemestian dan kenyataan, Dirjen Pendidikan Islam semasa Yahya Umar lebih banyak menggunakan logika kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) yang berpihak pada kaum

miskin dan swasta. Kebijakan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk beasiswa siswa miskin, beasiswa kuliah S-1 bagi santri/siswa miskin, tunjangan guru non-PNS, dan bantuan bagi madrasah swasta.

Kebijakan tersebut sebenarnya sudah tepat, tetapi anggaran bidang pendidikan untuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dirjen Pendidikan Islam tahun 2007 senilai Rp 7 triliun tampaknya belum cukup untuk mengubah tradisi bantuan "hujan gerimis" menjadi bantuan "hujan lebat" kepada madrasah. Logikanya sederhana. Angka sebesar itu diperuntukkan bagi banyak komponen pendidikan seperti gaji guru dan tenaga kependidikan, dana BOS, BKM, BOS buku, anggaran tupoksi 4 direktorat Depag pusat dan bidang Mapenda serta Pontren di 32 Kanwil Depag Provinsi.

Dapat dibayangkan, jika 57,1% dari anggaran sebesar itu digunakan untuk gaji guru dan 25,7% untuk program BOS, dana yang dikelola untuk tupoksi Dirjen Pendis di tingkat pusat dan daerah hanya 17,1% atau sekitar Rp 1,2 triliun, suatu jumlah yang tidak besar untuk melayani semua kebutuhan pendidikan Islam formal, nonformal, PAI di sekolah umum, dan pendidikan tinggi Islam.

Keterbatasan anggaran tampaknya menjadi salah satu penyebab sulitnya Depag mengurus madrasah. Karena itu, kebijakan pemberian bantuan kepada madrasah hanya mampu mengubah kebijakan "hujan gerimis" menjadi "hujan lebat yang dilokalisasi" melalui sejumlah bantuan kompetitif seperti bantuan kontrak prestasi dan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Cara ini tampaknya dianggap lebih tepat ketimbang "kue" APBN itu dibagikan rata kepada sasaran banyak dengan jumlah yang sangat kecil.

Saat ini, anggaran pendidikan Islam di Depag diprediksi 20% dari anggaran pendidikan di Depdiknas (bukan dari APBN). Namun, dengan proporsi itu masih dirasakan terlalu kecil untuk mendongkrak mutu pendidikan di madrasah yang notabene --meminjam istilah Maslow-- masih dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sarana, prasarana, kualitas guru, input siswa, dan proses pembelajaran yang memprihatinkan menjadi problema klasik madrasah yang menjadi pekerjaan rumah Direktorat Jenderal Pendis pada masa mendatang.

3. Strategi jalan keluar

Untuk mengatasi madrasah agar tidak termarjinalkan dari konstelasi dinamika pendidikan nasional, kiranya ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Pertama, Depag perlu mengupayakan strategi yang lebih tepat untuk pembangunan tiga pilar kebijakan sebagaimana diterakan dalam rencana strategi (renstra) pendidikan Depag (juga dalam renstra Depdiknas). Tiga pilar dimaksud adalah pemerataan, kualitas, dan tata kelola pendidikan.

Tiga pilar itu perlu secara konsisten dan berpihak pada kaum marjinal. Dengan kata lain, kebijakan afirmatif yang berlaku selama ini perlu diperkuat agar muara kebijakan pendidikan semakin berpihak pada kaum miskin dan madrasah swasta.

Kedua, Depag dan Depdiknas perlu bersinergi agar kebijakan pendidikan tidak melahirkan ekses yang tidak diharapkan. Kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas guru, kurikulum pendidikan, bantuan infrastruktur, buku ajar, dan kebijakan inovatif lainnya perlu dilakukan dalam koridor koordinasi antar departemen. Secara sistemik, koordinasi ini dapat dituangkan dalam renstra pendidikan bersama sehingga implementasi pendidikan semakin menampakkan keadilan proporsional.

Ketiga, pemda provinsi, dan kabupaten/kota perlu memberikan pelayanan berkeadilan dalam membagi anggaran APBD untuk sektor pendidikan. Masalah perbedaan kebijakan makro pendidikan antara Depag (sentralisasi) dan Depdiknas (desentralisasi) dapat diselesaikan melalui kearifan pemegang kebijakan di tingkat lokal. Madrasah harus disertakan dalam segala klausul perda pendidikan agar lebih berkeadilan.

Keempat, bantuan luar negeri baik hibah (*grant*) maupun pinjaman (*loan*) perlu lebih ditekankan pada sasaran masyarakat madrasah. Seringkali bantuan internasional hanya memandang madrasah sebagai pelengkap program. Padahal hakikat bantuan adalah untuk pihak yang benar-benar membutuhkan, seperti kondisi madrasah saat ini.

Karena itu, selama bantuan luar negeri seperti bantuan dari WB, AusAID, USAID, ADB, JICA, JBIC, dan sebagainya belum mengutamakan bantuan bagi madrasah, dapat dikatakan mereka belum sepenuhnya *pro-poor.*

Kelima, masyarakat perlu secara proaktif memajukan madrasah. Apabila sebuah keluarga menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, mereka perlu menyisihkan penghasilannya untuk membantu madrasah. Cara ini diyakini dapat melahirkan kepedulian sosial yang pada gilirannya dapat membantu daya tahan dan kemajuan madrasah pada masa mendatang. Tanpa peran serta masyarakat, madrasah akan sulit bersaing dengan waktu untuk mengejar ketertinggalannya.

Risalah ini tidak dimaksudkan untuk membuat stigmasi negatif terhadap madrasah ataupun menjadi sebuah moratorium total terhadap kebijakan Depag, melainkan sebagai refleksi kristis terhadap nasib madrasah yang masih membutuhkan peran serta semua pihak.

Lebih dari itu, apa yang diuraikan di atas dapat dijadikan pelajaran agar pengakuan *de jure* sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dapat dibuktikan secara *de facto* melalui upaya pelibatan semua pihak.

N
U
LP MA'ARIF NU
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
Nahdlatul 'Ulama

BAB IV
DINAMIKA PEMBERDAYAAN MADRASAH

A. Keunikan Madrasah

Madrasah adalah sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang unik. Keunikan madrasah diawali dengan hampir terbesar jumlah madrasah adalah milik swasta. Berbeda halnya dengan sekolah di lingkungan Pendidikan Nasional (Diknas). Pada tingkat sekolah dasar, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri hanya 4,8% dibanding dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang berjumlah 95,2%. Keadaan ini berbanding terbalik dengan Sekolah Dasar Negeri yang berjumlah 93,11% dan Sekolah Dasar Swasta 6,89%. Pada tingkat SMP, keadaannya tidak jauh berbeda. Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri 24,3% dan Madrasah Tsanawiyah Swasta 75,7% sedangkan di Diknas SMP Negeri 44,9% berbanding 55,9% Sekolah Swasta. Hal yang sama pada tingkat SMU, dimana jumlah Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 30% dan Madrasah Aliyah Swasta berjumlah 70%. Di Diknas keadaannya serupa, SMU Negeri 30,5% dan SMU Swasta berjumlah 69,4%.(Husni Rahim, 2008)

Keunikan kedua, madrasah adalah lembaga pendidikan yang populis, yang ditampakkan dengan madrasah tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang membentuk, membina dan mengembangkannya. Oleh karena itu dari segi kuantitas perkembangannya sangat pesat, namun dari segi kualitas perkembangnnya sangat lambat. Ini mungkin konsekuensi madrasah yang bersifat populis yang selalu cendrung memekar dan belum sempat mendalam. Keterikatan masyarakat terhadap madrasah sepanjang sejarah pendidikan Islam di Indonesia lebih ditampakkan

sebagai ikatan emosional yang tinggi. Ikatan ini muncul karena bertemunya dua kepentingan yaitu pertama; hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperanserta dalam meningkatkan pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya dan kedua; motivasi keagamaan yakni keinginan agar anak-anak mendapat pendidikan agama yang cukup di samping pendidikan umum. Kuatnya ikatan emosional masyarakat ini telah menyebabkan madrasah menjadi lebih masif, lebih populis dan lebih mencerminkan suatu gerakan masyarakat karena itu madrasah lebih banyak di pedesaan dan daerah pinggiran, lebih dimotivasi secara intrinsik bahwa belajar itu sebagai suatu kewajiban dan lebih tanpa pamrih atau dengan kata lain. Motivasi agama ini didukung pula oleh ajaran wakaf yang memberi dorongan bahwa tanah/sarana yang telah diwakafkan akan terus mengalir amalnya, walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hampir seluruh tanah madrasah adalah wakaf. Keterikatan emosional ini disatu sisi merupakan potensi dan kekuatan bagi madrasah dalam arti rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggungjawab (*sense of responsbility*) masyarakat yang tinggi.

Hal ini juga dapat menjadi faktor penting untuk menjamin sustainabilitas madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang populis.Tapi di pihak lain, ia dapat menjadi kendala. Karena merasa sebagai pemilik dan sebagai pendiri yang membina madrasah semenjak awal, sebagian masyarakat mungkin tidak akan begitu mudah menerima ide-ide reformasi yang diluncurkan dari atas, kecuali dalam keadaan terdesak-- misalnya masyarakat dan/atau yayasan merasa tidak mampu lagi membina sekolah dengan baik karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan manajemen. Dengan kata lain setiap reformasi madrasah akan berjalan lamban.

Keunikan lain yang menarik dari madrasah bahwa jumlah siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-laki. Keadaan ini berbanding terbalik pada sekolah umum, siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Pada madrasah Ibtidaiyah, jumlah murid perempuan 52% dan murid laki-laki 48%, sedangkan di Sekolah Dasar, murid perempuan 48% dan murid laki-laki 52%. Pada tingkat Tsanawiyah, jumlah murid perempuan 53% dan murid laki-laki 47%, sedangkan murid perempuan di SMP 45% dan murid laki-laki 55%. Demikian pula pada tingkat Aliyah. Murid perempuan 55% dan laki-laki 45%. Keadaan ini berbeda dengan di

Diknas yang murid laki-lakinya 53% dan murid perempuan 47% (Husni Rahim,2008)

Keadaan ini memberi makna bahwa orang tua yang menyekolahkan anak perempuannya di madrasah merasa aman dalam arti moral. Ini memberi petunjuk dalam pandangan para orang tua bahwa madrasah masih dianggap sebagai benteng moral putri-putrinya. Namun sayangnya madrasah belum menjanjikan peluang yang lebih luas untuk lapangan kerja. Banyaknya murid wanita pada madrasah dilatarbelakangi oleh pandangan sosiologis masyarakat Islam Indonesia bahwa tugas utama wanita adalah sebagai ibu rumah tangga, yang diharapkan mempunyai jiwa keagamaan yang cukup memadai sehingga mampu membina rumah tangga dengan baik dan mendidik anak-anak dengan baik pula. Dengan kata lain anak wanita yang sekolah di madrasah akhlaknya/moralnya dianggap akan lebih baik dari yang di sekolah umum.

Hal yang sebaliknya terhadap anak laki-laki, di mana anak laki-laki diharapkan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, maka memerlukan pendidikan umum yang memudahkan ia mencari pekerjaan. Dengan demikian menurut persepsi masyrakat, bahwa madrasah mempunyai kelebihan dalam bidang pendidikan akhlak/moral, namun lemah dalam bidang pengetahuan umum dan sebaliknya sekolah umum mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan umum sebagai bekal mencari nafkah, namun lemah dalam pembinaan akhlak/moral. Berdasarkan alasan itu, maka para orang tua lebih menyukai anak laki-lakinya sekolah ke sekolah umum dengan alasan melalui sekolah umum, dimana pelajaran umumnya lebih banyak dan kualitasnya lebih baik, maka lapangan kerja lebih terbuka dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga lebih memungkinkan. Kenyataan ini menjadi tantangan madrasah untuk meningkatkan kualitas bidang studi umum dengan tetap mempertahankan kekuatannya sebagai benteng moral sebagai ciri khas madrasah.

Keunikan lain lagi dari madrasah adalah lokasi madrasah yang kebanyakan berada di daerah pinggiran, pedesaan, daerah terpencil, daerah miskin dan tertinggal. Ini sesuai dengan akar sejarah madrasah yang lahir dari inisiatif masyarakat di mana mereka tidak mampu

mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang letaknya jauh dan sekolah dengan bayaran mahal. Juga karena faktor ekonomis di mana anak harus membantu orang tua dalam mencari nafkah yang dalam hal ini madrasah memberi alternatif pendidikan sore/malam.

Madrasah berdiri biasanya, di mana tidak ada sekolah umum milik Diknas di daerah itu. Oleh karena itu ketika pemerintah melalui program INPRES SD mendirikan hampir di seluruh daerah dimana madrasah telah ada, menimbulkan dilema baru bagi orang tua dan berakibat di beberapa daerah madrasahnya mati dan di beberapa daerah lainnya SD Inpresnya yang tutup). Sebagai konsekuensi madrasah yang menerima murid dari kalangan rakyat bawah, maka hampir saeluruh madrasah hanya memungut bayaran sekolah "sekedarnya". Malah kadang-kadang cukup dibayar dengan singkong, pepaya dan sejenisnya.

Dana yang dapat dikumpulkan masyarakat muslim dalam pengembangan madrasah sangat terbatas, sementara biaya pendidikan semakin mahal, sehingga tuntutan untuk terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan madrasah ketinggalan terus. Pada umumnya madrasah swasta berada dalam keadaan serba kekurangan karena menampung siswa-siswa dari keluarga ekonomi lemah. Akibatnya biaya untuk menunjang proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai fasilitas dan teknologi tidak dapat dilaksanakan. Data Emis 2001 menunjukkan alokasi dana untuk proses belajar mengajar di madrasah hanya 5,6%, dana terbesar pada gaji dan honor serta pemeliharaan Ini pula yang menyebabkan kualitas siswa madrasah tetap tertinggal.

Keunikan lainnya adalah adanya keanekaragaman madrasah baik dari segi jenis pendidikan, penyebaran maupun kualitasnya. Keanekaragaman madrasah tampak dalam berbagai program yang muncul seperti pada Madrasah Aliyah, ada program keagamaan, program ketrampilan, program kejuruan di samping madrasah dengan program sekolah umum yang berciri khas Islam. Dari aspek penyelenggara, maka ada madrasah yang bernaung dalam organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan lain-lain. Juga ada yang merupakan milik keluarga, milik perorangan atau yayasan. Juga ada yang menjadi bagian dari pondok

pesantren. Dari aspek kualitas sangat beragam pula, dari yang berkualitas sekedarnya sampai yang berkualitas unggul.

B. Strategi Pemberdayaan Madrasah

Pengembangan madrasah pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, karena realitas di lapangan menunjukan kondisi madrasah belum sama kualitasnya dengan Sekolah sekolah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang Undang nomor: 2 tahun 1989, sekolah sekolah di bawah Kementerian Agama baik yuridis maupun struktur sama dengan persekolahan yang diselenggarakan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Akan tetapi berhubung komponen input madrasah jauh lebih rendah dari sekolah pada umumnya, baik jumlah maupun mutunya, maka proses dan outputnya juga tidak sama. Oleh sebab itu perbaikan terhadap kondisi madrasah kian hari kian dirasakan pentingnya, bahkan jika dihubungkan dengan tuntutan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan, maka pengembangan madrasah sudah dipandang sangat mendesak.

Kebutuhan terhadap pengembangan madrasah juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Keberhasilan pernbangunan yang pernah diraih oleh bangsa Insonesia, sampai pada fingkat tertentu, harus diakui telah mendorong terjadinya pergeseran dan perubahan tingkat kebutuhan masyarakat. Bagi golongan yang berpenghasilan menengah ke atas, perhatian tidak lagi sepenuhnya ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat fisik material semata; melainkan berpindah kepada pemenuhan kebutuhan nonfisik, mental, dan spiritual. Kebutuhan tersebut antara lain meliputi: pelayanan pendidikan dan pencarian nilai nilai keagamaan. Dalam hal ini keberadaan, fungsi dan peran Madrasah dapat menjadi pilihan. Adapun bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, peran Madrasah itu diharapkan dapat membantu perbaikan status sosial ekonomi masyarakat dengan mengantarkan mereka ke jalur pembangunan.

Kecenderungan global yang berkembang hingga saat ini juga sernakin mempertegas perlunya pengembangan madrasah. Secara historis kehadiran madrasah lebih berperan sebagai jembatan yang mengantarkan kelompok kelompok masyarakat dari lingkup pergaulan

lokal ke dalam tata pergaulan fingkat nasional. Sementara peran tersebut belum sepenuhnya berhasil, saat ini tumbuh pula tuntutan baru yang lebih tinggi, yakni untuk mengantarkan masyarakat ke dalam tata pergaulan internasional (global).

Kesepakatan antara pemerintah dengan lembaga lembaga keuangan internasional seperti: *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) dalam pengembangan madrasah, tidak lain sebagai upaya untuk menjawab tuntutan tersebut di atas. Faktor dana yang selama ini dikeluhkan oleh para pembina dan penyelenggara madrasah, diharapkan sedikit dapat menjadi penghantar ke arah perbaikan dan pengembangan madrasah secara lebih sistematis, sehingga kegiatan¬kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan madrasah bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna. Atau dengan kata lain program pembinaan pada masa yang akan datang dapat menciptakan kondisi madrasah yang lebih baik, setidaknya sama dengan sekolah pada umumnya.

Sebagai suatu inovasi dalam sistem pendidikan Islam, ada beberapa problematika yang dihadapi oleh madrasah:

1. Dengan inovasi struktur dan kurikulum yang diajarkan, madrasah seolah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan dari pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah umum karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem pendidikan klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.
3. Muatan kurikulum yang relatif sama dengan muatan kurikulum di sekolah, menjadikan madrasah kurang memiliki jati diri sebagai lembaga yang mencetak ahli-ahli agama.
4. Dengan penegerian beberapa madrasah yang ada, mengakibatkan berkurangnnya peran serta masyarakat terhadap madrasah. Ada suatu anggapan bahwa setelah dinegerikan, maka semua tanggungjawab berada pada pemerintah, sehingga masyarakat lepas sama sekali.

5. Kendatipun status madrasah sudah disamakan dengan sekolah umum, namun dalam realitasnya keberadaan madrasah tetap dianggap sebagai pendidikan kelas dua, baik dari segi kualitas akademik, maupun sarana dan dan prasarananya.

Dengan melihat berbagai data dan fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan madrasah dengan segala dinamikanya, maka madrasah harus diberdayakan.

1. Pemberdayaan Madrasah melalui Manajemen Berbasis Madrasah

Salah satu modal sosial yang dimiliki madrasah adalah semangat dan loyalitas yang cukup baik dari para guru dan tenaga kependidikan lain, meski dengan imbalan yang kurang memadai. Banyak guru madrasah cukup bersemangat untuk mengelola madrasah secara profesional dan terus berupaya meningkatkan kualitas diri dengan jalan mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Sebagian di antaranya mencoba melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Modal sosial ini tampaknya terkait dengan faktor ideologis, yaitu madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

Melihat kondisi madrasah dalam konteks diterapkannya manajemen berbasis madrasah, upaya-upaya pemberdayaan madrasah menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga pendidikan Islam ini.

Upaya pemberdayaan madrasah dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pelatihan manajemen berbasis madrasah bagi para pengelola madrasah. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan pengelola madrasah. Kedua, riset aksi partisipatoris untuk memetakan kekuatan, tantangan, hambatan, dan peluang madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis madrasah. Ketiga, pendampingan terhadap pengelola madrasah dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah.

Upaya-upaya itu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan madrasah, misalnya perguruan tinggi di daerah dan lembaga-lembaga sosial lain.

Madrasah biasanya tumbuh berdasarkan potensi yang ada dari suatu kelompok masyarakat, atau pihak tertentu yang memiliki

kepedulian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Demikian pula pengembangan selanjutnya sangat ditentukan oleh sejauhmana pihak penyelenggara mampu secara terus menerus menggali potensi tersebut, serta melipatgandakan kekuatan kekuatan yang sudah tersedia di madrasah.

Selama ini pemberian bantuan umumnya dipahami sebagai sumbangan pihak luar kepada Madrasah. Karena sifat kehadirannya datang dari luar madrasah, sering terjadi bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu manfaat pemberian bantuan tidak dapat dioptimalkan bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Demikian pula pernberian bantuan acapkali menimbulkan ketergantungan. Perbaikan dan pengembangan Madrasah hanya dapat dilakukan selama ada bantuan. Akan tetapi sebaliknya, semua program pengembangan ikut berhenti bersamaan dengan dihentikannya pemberian bantuan.

Sikap ketergantungan kepada bantuan, serta pemberian bantuan yang tidak tepat sasar selama ini, justeru sangat merugikan perkembangan Madrasah. Oleh sebab itu pola bantuan yang mulai diterapkan sejak tahun anggaran 1997/1998, lebih diarahkan kepada tumbuhnya upaya strategis yang mendorong seluruh jajaran pembina dan penyelenggara Madrasah, agar meningkatkan kernampuannya dalam menggali sendiri potensi dan kekuatan yang ada pada madrasah.

Kebutuhan terhadap pengembangan madrasah sesungguhnya bukan kepentingan pihak pemberi bantuan (pemerintah dan donatur), melainkan tuntutan dari Madrasall itu sendiri. Dengan demikian seluruh aspek yang berkaitan dengan bantuan dan pengembangan menjadi tanggung jawab pihak madrasah yang bersangkutan. Pihak madrasah oleh karena itu berkewajiban untuk mengidentifikasi kebutuhan kebutuhannya, merencanakan pengembangan, melaksanakan program, melakukan pemantauan, dan menilai sejauhmana rencana pengembangan telah terlaksana dan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan bantuan yang dibiayai oleh Proyek proyek, maka jenis jenis bantuan yang dibutuhkan oleh madrasah, dengan sendirinya tidak ditentukan oleh pemimpin proyek maupun

jajarannya. Pemimpin proyek bersama pengelola proyek lainnya hanya melakukan penilaian terhadap usulan mana yang layak mendapatkan bantuan. Apabila suatu usulan disetujui dan dilaksanakan, pemimpin proyek berhak melakukan pemantauan, penilaian, dan meminta pertanggungjawaban terhadap apakah antuan yang diberikan telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

2. Pemberdayaan melalui Bantuan Pembinaan secara Terpadu

Pemberian bantuan kepada madrasah biasanya juga dilakukan secara terpisah pisah, kurang melihat kaitan dengan unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian. Bantuan gedung umpamanya tidak dikaitkan dengan kebutuhan peralatan; bantuan peralatan pendidikan tidak disatukan dengan batuan pelatihan tenaga guru, begitu pula bantuan keuangan tidak dihubungkan dengan bantuan pengelolaan administratif kemadrasahan. Dari sinilah antara lain dapat rnenyebabkan timbulnya beberapa kasus, seperti: peralatan laboratorium yang tidak dapat didayagunakan berhubung tidak ada tenaga pengelola, buku siswa yang menumpuk di kantor kepala Madrasah; atau ruang belajar yang berubah fungsi menjadi sarana olah raga.

Bantuan yang diberikan kepada madrasah saat ini diharapkan dirancang sebagai suatu paket terpadu guna mencapai tujuan pengembangan ke arah mana suatu program pengembangan dijalankan, serta untuk tujuan apa pengembangan itu dilakukan, sepenuhnya dirumuskan dan diketauhi oleh pihak madrasah. Dengan demikian keterpaduan paket bantuan juga sangat ditentukan oleh pihak Madrasah yang bersangkutan.

3. Orientasi Pembinaan kepada Peningkatan Mutu Pembelajaran

Bantuan acap kali dipersepsikan hanya sebagai dukungan fisik material, umpamanya rehab gedung (bangunan) dan pemberian beasiswa. Bentuk bantuan seperti itu memang sangat dibutuhkan, karena secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi perbaikan suasana dan kelancaran kegiatan di madrasah yang bersangkutan.

Sebetulnya bantuan utama yang paling dibutuhkan madrasah adalah yang dirancang secara langsung dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Selain keterbatasan sarana dan fasilitas

pendidikan, madrasah selama ini menghadapi masalah terbatasnya kemampuan guru dalam mengelola kegiatan di kelas. Keterbatasan itu banyak sekali penyebabnya, seperti: tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, perbedaan latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diasuh, tidak aktualnya kernampuan dan pengetahuan yang dimiliki, dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan bantuan peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga lainnya, seperti: pemberian kesempatan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, penataran, kursus kursus, penambahan wawasan melalui studi banding, dan lain lain, Dengan adanya kegiatan peningkatan tersebut, diharapkan guru menjadi lebih mampu dan lebih terampil menghadapi situasi belajar yang dialami oleh siswa.

4. Kerjasama dengan IAIN/UIN dalam Program Pemberdayaan Madrasah

Memahami persoalan sebagaimana yang diuraikan terdahulu, dituntut sebuah kerangka kerja yang benar benar strategis dalam melaksanakan pembinaan terhadap madrasah.

IAIN/UIN sebagai salah satu institusi akademis, dalam hal ini menempati posisi yang sangat diharapkan oleh semua pihak, untuk ikut merumuskan pola pembinaan dan perannya yang aktif dalam mengembangkan madrasah. Lahirnya Program Studi Manajemen di Fakultas Tarbiyah dapat ikut mempercepat proses itu. Oleh karenanya tema tema dasar yang menjadi akar problem pemberdayaan madrasah seharus menjadi persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian.

Apabila berbagai pelayanan terhadap persoalan dasar tersebut menjadi persoalan utama pula bagi IAIN, maka dengan sendirinya peluang kerjasama antar unit di Kementerian Agama, bukan saja menjadi mungkin; melainkan sudah merupakan keharusan.

C. Akselerasi Peningkatan Mutu Madrasah

Judul di atas secara tersirat mengandung tiga hal: persoalan mutu madrasah merupakan persoalan serius, mutu madrasah tertinggal dibandingkan lembaga pendidikan lainnya (sekolah), dan

perlu upaya-upaya strategis atau kiat-kiat khusus agar madrasah dapat mengejar ketertinggalannya.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun demikian, perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai "*forgotten community*". Pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan *Center for Informatics Data and Islamic Studies* (CIDIES) Departemen Agama dan data base EMIS (*Education Management System*) Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA)) sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri. Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah. Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup, bahkan sering disebut *lâ yamûtu walâ yahya* (tidak hidup dan perlu banyak biaya (agar tidak mati)). Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5, 5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia.

Persoalannya adalah, bagaimana mempercepat peningkatkan mutu 36.105 madrasah dan 5,5 juta siswanya? Peningkatan mutu pendidikan secara merata adalah persoalan mutlak bagi eksistensi sebuah bangsa dengan tanpa membedakan identitas kultural masyarakatnya. Menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua atau menomorduakan peningkatan mutu bagi madrasah setelah lembaga persekolahan tidak dapat dibenarkan dalam

perspektif apapun, bahkan kalau hal itu terjadi marupakan wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi bumerang bagi bangsa dan Negara. Ketertinggalan suatu kelompok masyarakat dari sebuah bangsa pada umumnya terbukti menjadi batu sandungan dan sumber masalah bagi perjalanan bangsa itu sendiri. Fenomena terorisme dan separatisme misalnya, bukan semata dikarenakan persoalan ideologis, melainkan lebih karena ketertinggalan dalam berbagai aspek dan merasa terlupakan/terpinggirkan. Atas dasar itulah kita perlu mencontoh Negara seperti Singapura yang berupaya keras meningkatakan mutu madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Melayu agar sejajar dengan lembaga pendidikan pada umumnya.

Dalam konteks ini, penulis menyatakan kekaguman kepada Yahya Umar, atas tekatnya untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah. Dirjen yang berlatarbelakang Depdiknas ini barangkali terkejut melihat kondisi obyektif madrasah yang sebagian terbesar masih tertinggal dibanding dengan sekolah di satu sisi dan perlakuan pemerintah yang menomor-duakan madrasah selama ini.

Untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah secara efektif, diperlukan pemahaman terhadap hakekat dan problematika madrasah. Madrasah sebenarnya merupakan model lembaga pendidikan yang ideal karena menawarkan keseimbangan hidup: iman-taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Di samping tu, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan memiliki akar budaya yang kokoh di masyarakat, madrasah memiliki basis sosial dan daya tahan yang luar biasa. Atas dasar itu apabila madrasah mendapatkan sentuhan menejemen dan kepemimpinan yang baik niscaya akan dengan mudah menjadi madrasah yang diminati masyarakat. Seandainya mutu madrasah itu sejajar saja dengan sekolah, niscaya akan dipilih masyarakat, apalagi kalau lebih baik. Abdul Jalil, mantan kepala madrasah berprestasi (MIN, MTsN dan MAN) Jalan Bandung Malang pernah mengatakan kepada penulis, bahwa memajukan madrasah sebenarnya lebih mudah dibanding dengan sekolah. Hal ini disebabkan semangat keagamaan komunitas madrasah dan dukungan wali murid, dan pemerhati pendidikan madrasah. Ia mencontohkan, untuk menggali dana masyarakat, madrasah dapat memperolehnya dari zakat, infak, sedekah, wakaf, tasyakuran dan lain sebagainya (Tobroni, Disertasi 2005).

Persoalannya, kondisi sebagian besar madrasah sedang menghadapi persoalan serius. Menurut Yahya Umar, madrasah diibaratkan sebagai mobil tua sarat beban. Kurikulum madrasah adalah 130 % dari kurikulum sekolah karena komposisi kurikulum 70:30 (umum: agama) dan mata pelajaran umum madrasah sama dengan yang ada di sekolah. Apabila dilihat dari missinya, di samping sebagai sekolah juga sebagai lembaga dakwah. Sedangkan apabila dilihat dari kondisi guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan faktor-faktor pendukung lainnya kondisinya serba terbatas, untuk tidak mengatakan sangat memprihatinkan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kondisi madrasah sebagian besar menghadapi siklus negatif atau lingkaran setan tak terpecahkan (*unsolved problems*): kualitas *raw input* (siswa, guru, fasilitas) rendah, proses pendidikan tidak efektif, kualitas lulusan rendah, dan kepercayaan *stakeholder* terutama orangtua dan pengguna lulusan rendah.

Upaya apa yang paling strategis atau kiat-kiat yang paling jitu dalam mempercepat peningkatan mutu madrasah? Menurut Yahya Umar, kalau madrasah diibaratkan mesin, maka ada tiga hal yang hendak dilakukan direktoratnya: menyehatkan mesin, mengurangi beban dan merubah beban menjadi energi. Pertama, menyehatkan mesin. Mesin dalam sebuah organisasi pendidikan dapat berwujud budaya organisasi dan proses organisasi. Madrasah yang sehat adalah yang memiliki budaya organisasi yang positip dan proses organisasi yang efektif (Robins, 1996:289).

Dalam mewujudkan budaya madrasah yang baru, diperlukan konsolidasi idiil berupa reaktualisasi doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan, pembelokan dan penyempitan makna. Konsep tentang ihlas, jihad, dan amal shaleh perlu direaktualisasikan maknanya dan dijadikan *core values* dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dengan landasan nilai-nilai fundamental yang kokoh, akan menjadikan madrasah memiliki modal social (*social capital*) yang sangat berharga dalam rangka membangun rasa saling percaya (*trust*), kasih sayang, keadilan, komitmen, dedikasi, kesungguhan, kerja keras, persaudaraan dan persatuan. Dengan *social capital* yang baik, akan memunculkan semangat berprestasi yang tinggi, terhindar dari konflik yang seringkali menjadi hama bagi perkembangan madrasah. Lembaga pendidikan madrasah juga perlu tampil dengan nama, semangat, semboyan dan performen baru.

Misalnya dengan nama baru seperti MI Putera Harapan, MTs Tunas Bangsa, MA Insan Mulia, dan lain sebagainya.

Kedua, kurangi beban. Madrasah memang sarat beban, apabila dilihat dari missi, muatan kurikulum, dan beban-beban sosial, budaya dan politik. Penyelenggaraan kurikulum madrasah perlu diformat sedemikian rupa agar tidak terpaku pada formalitas yang padat jam tetapi tidak padat misi dan isi. Orientasi pendidikan tidak lagi pada *having* tetapi *being*, bukan *schooling* tetapi *learning*, dan bukan *transfer of knowledge* tetapi membangun jiwa melalui *transfer of values* lewat keteladanan. Metode belajar yang mengarah pada, *quantum learning*, *quantum teaching* dan *study fun* dan sebagainya perlu dikritisi. Budaya Belajar Bangsa Indonesia tidak harus mencontoh model Eropa seperti bermain sambil belajar, guru hanya sebagai fasilitator, menekankan proses dari pada hasil, mengutamakan alat belajar dan lain sebagainya. Budaya belajar Bangsa Indonesia yang banyak berhasil membesarkan orang justru yang mengembangkan sikap kesungguhan, prihatin ihlas, tekun dan sabar. Siswa madrasah harus dididik menjadi generasi yang tangguh, memiliki jiwa pejuang, seperti sikap tekun, ulet, sabar, tahan uji, konsisten, dan pekerja keras. *Multiple intelligence (intellectual, emotional dan spiritual quotient*) siswa dapat dikembangkan secara maksimal justru melalui pergumulan yang keras, bukan sambil bermain atau dalam suasana fun semata.

Ketiga, merubah beban menjadi energi. Pengelola madrasah baik pimpinan maupun gurunya haruslah menjadi orang yang cerdik, lincah dan kreatif. Pemimpin madrasah tidak sepatutnya hanya berperan sebagai administrator, pilot atau masinis yang hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, melainkan harus diibaratkan seorang sopir, pendaki atau *entrepreneur* yang senantiasa berupaya menciptakan nilai tambah dengan cara mendayagunakan kekuatan untuk menutupi kelemahan, mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, dan merubah ancaman menjadi tantangan (analisis swot). Keterbatasan sumber daya (manusia, material, finansial, organisasi, teknologi dan informasi) yang dimiliki madrasah bagi pemimpin yang berjiwa *entrepreneur* dan pendaki (*climber*) justru menjadi cambuk, lahan perjuangan (jihad) dan amal shaleh. Ibaratnya, beban berat di sebuah mobil dapat dirubah menjadi energi apabila sopirnya cerdas dalam memilih jalan yang menurun. Intinya, cara merubah beban menjadi energi adalah dengan cara berfikir dan berjiwa

besar, positif, kreatif dan tidak kenal menyerah. Memang salah satu karakteristik madrasah adalah berkembang secara evolutif, dimulai dari sebuah pengajian di mushallah/masjid kemudian menjadi madrasah diniah dan akhirnya menjadi madrasah.

Proses evolusi madrash selama ini ada yang berlangsung dengan baik dan ada yang jalan ditempat, tetapi sangat jarang yang mati. Semua itu tergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya.

Melihat kondisi madrasah di atas, pemerintah seharusnya tidak lagi menomorduakan madrasah, melainkan memperlakukannya secara khusus agar 36.105 madrasah dan 5,5 juta siswanya dapat mengejar ketertinggalannya dan tidak lagi menjadi *forgotten community*. Mungkin pemetintah selama ini berasumsi: tanpa dibantu pun madrasah sudah dapat hidup.

Asumsi ini memang tidak terlalu salah, akan tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak membantunya. Atas dasar itulah penulis sangat mendukung kebijakan Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Yahya Umar yang akan memberdayakan madrasah, terutama madrasah swasta dalam tiga hal: memberdayakan murid, guru dan madrasah.

D. Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan Alternatif

Di Indonesia dikenal berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam, seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah umum bercirikan Islam, Perguruan Tinggi Islam dan jenis-jenis pendidikan Islam luar sekolah, seperti Taman Pendidikan al-Qur'an, Pesantrenisasi dan sebagainya. Kesemuanya itu, sesungguhnya merupakan aset dan salah satu dari konfigurasi sistem pendidikan nasional Indonesia. Melalui keberadaannya, diharapkan dapat membangun dan memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal.

Namun kenyataannya masih belum demikian, bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaiang dalam membangun umat yang besar ini. Memang terasa janggal atau bahkan mungkin juga lucu, karena dalam suatu komunitas masyarakat muslim yang besar pendidikan Islam seperti Madrasah kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara

optimal. Mungkin ada benarnya juga, pepatah yang mengakatakan bahwa *ayam mati kelaparan di lumbung padi*. Ini artinya, kenyataannya pendidikan Islam belum mendapat kesempatan yang luas dan seimbang dengan umatnya yang besar di bumi Indonesia ini.

Sekalipun demikian, dalam kurun waktu belakangan ini, terlihat pendidikan Islam model madrasah mulai mengalami kemajuan. Hal ini terbukti dengan semakin bertambah jumlah dan masuknya pendidikan madrasah ke dalam *mainstream* pendidikan nasional. Misalnya saja, madrasah sekarang ini, sejak ibtidaiyah sampai aliyah, sejak tahun 1975 sudah mendapat pengakuan setara dengan sekolah umum setingkat dan sudah mengunnakan kurikulum nasional sesuai dengan standar sekolah umum.

Sejak saat itu, madrasah tidak lagi sebagai pendidikan khusus mengaji atau mendalami masalah-masalah keagamaan sebagaimana dulunya. Madrasah bahkan sudah membuka jurusan IPA, sosial, keterampilan dan lain-lain. Selain itu, munculnya beberapa jenis serta model pendidikan yang ditawarkan, dapat dilihat sebagau pergulatan lembaga-lembaga model madrasah.

Namun tantangan yang dihadapi madrasah masih kompleks dan berat, karena dunia madrasah juga dituntut untuk memberikan konstribusi bagi kemoderenan dan tendensi globalisasi. Dengan begitu, maka mau tidak mau pendidikan Islam dituntut menyusun langkah-langkah perubahan yang mendasar, termasuk melakukan versifikasi dan diferensiasi keilmuan dan atau mencari pendidikan alternatif yang inovatif.

Kondisi ini menuntut madrasah untuk bekerja serius dalam mengembangkan organisasi, manajemen, kurikulum dan sistem pembelajarannya. A.Mukti Ali menyatakan, bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan model madrasah di Indonesia dewasa ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor penguasaan sistem, metode, bahasa sebagai alat, ketajaman interpretasi, kelembagaan, manajemen, dan penguasaan ilmu dan teknologi.

Sementara A. Syafii Maarif, menggambarkan situasi pendidikan Islam model madrasah di Indonesia sampai awal abad ini tidak banyak berbeda dengan perhitungan kasar yang dikemukakan di atas. Sistem pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren yang berkembang di

nusantara ini dengan segala kelebihannya, sesungguhnya belum disiapkan untuk membangun peradaban (A. Syafii Maarif, 1996: 5).

E. Mengembangkan Madrasah dengan Serius dan Berani

Berkaitan dengan hal ini, maka madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, harus didesak untuk melakukan inovasi yang tidak hanya berkaitan dengan perangkat kurikulum dan manajemen saja, tetapi juga menyangkut dengan startegi dan taktik operasionalnya. Strtaegi dan taktik itu, menuntut perombakan model-model pendidikan sampai dengan institusi-institusinya, sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti pedagogis, sosiologis dan kultural dalam menunjukkan perannya (M. Arifin, 1991:3).

Mencermati kondisi tersebut, maka penataan sistem dan model-model pendidikan madrasah di Indonesia adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Sistem pengembangan hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang paling mendesak sesuai dengan prioritas dan senteral yang akan menjadi model dasar usaha pengembangan model-model pendidikan Islam, dengan tidak meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah dan madrasah, masjid, pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah lainnya tetap dipertahankan keberadaannya. Yahya Muhaimin (mantan Menteri pendidikan Nasional), juga "menawarkan sebuah *mindmp* tentang basis-basis pendidikan, yaitu pendidikan berbasis keluarga (*family-based education*), pendidikan berbasis komunitas (*community-based education*), pendidikan berbasis sekolah (*school-based education*), dan pendidikan berbasis tempat kerja (*workplace-based education*) (Yahya Muhaimin, 2000: 1).

Dari pandangan Yahya Muhaimin tersebut, apabila dicermati model-model pendidikan Islam sekarang ini sekurang-kurangnya berbasis pada empat jenis lembaga pendidikan Islam yang dapat mengambil peran dalam memberdayakan umat, yaitu pendidikan Islam berbais pondok pesantren, pendidikan Islam berbasis pada mesjid, pendidikan Islam berbasis pada sekolah atau madrasah, dan pendidikan Islam berbasis pada pendidikan umum yang bernafaskan Islam. Lembaga pendidikan yang berbasis pada pondok pesantren, sebagai model pendidikan Islam yang dapat mengembangkan atau memperluas sistem pendidikan nonformalnya pada pelayanan pendidikan yang

meliputi berbagai jenis bidang misalnya, seperti pertanian, peternakan, kesehatan, kesenian, kepramukaan, iptek, dan pelbagain keterampilan, kemahiran dan sebagainya. Pondok pesantren, seharusnya memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara wajar dan sistematis, sehingga apa yang disajikan kepada masyarakat akan tetap terasa bermuara pada pandangan dan sikap Islami, dan terasa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Begitu juga mengenai aktivitas mesjid harus dijadikan basis pembinaan umat. Materi-materi kajian pendidikan Islam yang disampaikan lewat khotbah jum'ah dan ceramah-cemah harus dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi realitas umat yang dihadapi dan mengantisipasi kondisi perubahan masa depan. Pondok pesantren dan mesjid perlu menggalang kerjasama dengan para ulama dan para cendekiawan muslim yang di luar atau yang tergabung dalam perguruan tinggi yang ada di sekitarnya.

Adapun peran jenis pendidikan yang berbais pada madrasah dan pendidikan umum yang bernafaskan Islam, adalah dalam upaya menemukan pembaruan dalam sistem pendidikan formal yang meliputi metode pengajaran baik agama maupun umum yang efektif. inovasi dibidang kurikulum, alat-alat pelajaran, lingkungan yang mendidik, guru yang kreatif dan penuh dedikasi dan sebagainya sangat diperlukan (Suroyo, 1991: 77-78). Karel Steenbrink, menyatakan bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia cukup variatif. Tetapi Steenbrink, mengkategori pendidikan tersebut dalam tiga jenis, yaitu pendidikan Islam yang berbasis pada pondok pesentrean, madrasah dan sekolah. Ketiga jenis pendidikan ini diharapkan menjadi "modal" dalam upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan sebagai suatu paradigma didaktik-metodologis. Sebab, pengembangan keilmuan yang integral (*interdisipliner*) akan mampu manjawab kesan dikotomis dalam lembaga pendidikan Islam selama ini berkembang.

Pada sisi lain, muncul pula jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim dengan model pesantrenisasi dan TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an). Pendidikan pesantrenisasi sebagai jenis pendidikan Islam yang muncul sebagai kekuatan pendidikan Islam, walaupun dilaksanakan secara insidental pada setiap bulan Ramadlan, tetapi terencana dan terprogram oleh sekolah-sekolah. Artinya, pada liburan bulan Ramadlan peserta didik dikonsentasikan pada suatu tempat untuk mendapatkan ceramah-ceramah agama Islam dan paraktek-praktek ibadah selama satu minggu atau lebih. Tetapi

sayangnya pendidikan model ini belum ditintak lanjuti dan dievaluasi efiktitas dan efisiensi prosesnya baik dari kurikulum dan materi, metode, pengajar, waktu pelaksanaan dan organisasi. Kemudian, terdapat pula TPA, sebagai kekuatan pendidikan Islam yang muncul dengan metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan *output* yang mampu membaca al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Dapat disaksikan produk TPA dengan bangga di wisuda oleh seorang Menteri bahkan tidak tanggung-tanggung oleh Presiden zaman Presiden Soeharto. Tetapi sampai saat ini belum terpikirkan tindak lanjut dari usaha pendidikan ini, karena selesai wisuda selesailah usaha pendidikan tersebut. Tetapi, harus diakui bahwa jenis pendidikan Qur'an ini, merupakan hasil inovasi dari model pengajaran al-Qur'an model lama. "Model pendidikan TPA yang ada sekarang merupakan hasil inovasi pendidikan dan perbaikan model pengajaran al-Qur'an tempo dulu itu. Maka dalam model TPA, seorang peserta didik tidak perlu berlama-lama belajar membaca al-Qur'an. Dalam waktu singkat ia telah dapat menguasainya, maka apabila dilihat dari segi didaktik metodik, TPA lebih efektif dan efisien dari pada model pengajaran al-Qur'an model lama (Hajar Dewantoro,1997:90).

Perkembangan yang mencolok pada tahun 90-an adalah munculnya sekolah-sekolah elite Muslim yang dikenal sbagai "sekolah Islam". Sekolah-sekolah itu mulai menyatakan dirinya secara formal dan diakui oleh banyak kaum muslim sebagai sekolah unggulan atau sekolah Islam unggulan. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut sekolah-sekolah tersebut adalah "SMU Model" atau Sekolah Menengah Umum [Islam] Model. Dapat saja disebut, sekolah Islam al-Azhar yang berlokasi di komplek Masjid Agung al-Azhar di Kebayoran Baru Jakarta, dengan beberapa cabang seperti Cirebon, Surabaya, Sukabumi, Serang, Semarang dan sebagainya. Sekolah al-Izhar di Pondok Labu, Jakarta, SMU Insan Cendekia di Serpong dan SMU Madinah di Parung. Selain itu, masih muncul pula madrasah elite lain yang juga menjadi madrasah favorit, sebagai contoh adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Malang, Jawa Timur (Azyumardi Azra,1999:75-79). Sekokolah Dasar (SD) Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta yang menjadi Sekolah Dasar bercirikan Islam yang menjadi faforit dan menjadi sekolah percontohan dan mungkin masih banyak sekolah-sekolah Islam dan Madrasah di daerah lain yang belum disebutkan dalam pembahasan ini.

Sekolah-sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai "sekolah elite" Islam, karena sejumlah alasan yang mendasarinya. Alasan pertama bahwa sekolah-sekolah tersebut bersifat elite dari sudut akademis, dalam beberapa kasus hanya siswa-siswa terbaik yang dapat diterima sekolah-sekolah tersebut melalui seleksi yang kompetitif. Guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut hanyalah mereka yang memenuhi persyaratan yang dapat diterima dan melalui seleksi secara kompetetif. Sekolah-sekolah tersebut dikelolah dengan manajemen yang baik dengan memiliki berbagai sarana pendidikan yang jauh lebih baik dan lebih lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang komputer, masjid dan sarana olahraga. Semua itu membuat peserta didik di sekolah-sekolah tersebut jauh lebih baik secara akademis bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah Islam lainnya dan bahkan dengan sekolah umum yang disekolah oleh pemerintah.

Dari perkembangan sekolah-sekolah ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan para ahli pendidikan Islam mulai percaya bahwa kualitas pendidikan madrasah dapat ditingkatkan, artinya bahwa pendidikan berkualitas yang ditawarkan madrasah akan dapat "dibeli" oleh kalangan orang tua Muslim. Maka tanpaknya, kita harus berusaha melakukan koreksi secara cepat dan cermat tentang program-program pendidikan pendidikan Islam yang sedang dijalankan, sehingga perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum dalam konfigurasi pendidikan nasional dapat dipersempit, artinya, secara kualitas pendidikan Islam harus mendapat kesempatan yang luas dan seimbang dengan umatnya yang besar di bumi Indonesia ini. Apabila kita menginkan pendidikan Islam dapat bersaing dengan pendidikan lain, tentu saja persoalan visi, misi, tujuan, fungsi, metode, materi dan kurikulum, orientasi, manajemen dan organisasi pendidikan Islam, harus dikoreksi, direvisi dan bahkan direformasi secara berani, sehingga pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang menarik minat peserta didik tanpa mengurangi prinsip-prinsip ajaran dari sumber pokok Islam yaitu Qur'an dan Hadis. Apabila persoalan tersebut dilakukan secara baik, terencana dan terprogram, pendidikan Islam akan menjadi lebih solid dalam memberdayakan umat Islam di Indonesia dan siap menghadapi tantangan globalisasi serta tantangan reformasi diberbagai bidang kehidupan berupa demokrasi pendidikan, membangun etos kerja, profesionalisme, memiliki kemampuan emosional dan moralitas agar dapat membangun masa depan yang

lebih baik, lebih maju, damai, adil dan lebih sejahtera, sehingga terwujud masyarakat baru Indonesia yang *rahmatan lil'alamin*.

Upaya mencari pola atau model alternatif pendidikan Islam di Indonesia, hendaknya pengembangan pendidikan Islam menitikberatkan atau berorientasi kepada visi dan misi, fleksibilitas, relevansi pendidikan di sekolah dan pendidikan di luar sekolah. Artinya keluwesan sistem dan kerjasama antara bentuk lembaga pendidikan Islam itu, akan melahirkan model alternatif baru dewasa ini dan masa mendatang. Dalam upaya mencari model alternatif pendidikan Islam yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia, paling tidak ada tiga pendekatan yang ditawarkan sebagai pola alternatif pendidikan Islam, yaitu pendekatan sistemik, suplemen dan pendekatan komplementer. [1] Pendekatan *sistemik*, yaitu perubahan harus dilakukan terhadap keseluruhan sistem pada lembaga pendidikan Islam formal yang ada, dalam arti terjadi perubahan total. [2] Pendekatan *suplementer*, yaitu dengan menambah sejumlah paket pendidikan yang bertujuan memperluas pemahaman dan penghayatan ajaran Islam secara lebih memadai. Langkah ini yang sering dilakukan dengan istilah yang populer adalah "tambal sulam". [3] Pendekatan *komplementer*, yaitu dengan upaya mengubah kurikulum dengan sedikit radikal untuk disesuaikan secara terpadu (Suroyo,1992:64). Artinya, untuk kondisi sekarang ini, perubahan kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan pada kompetensi yaitu kompetensi *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan atau kemahiran), kompoetensi *ability* (memiliki kemampuan tertentu), komptensi sosial-kultural, dan kompetensi spritual *ilahiyah*.

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan masyarakat global, ada beberapa persoalan mendasar internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara tuntas, yaitu :

Pertama, harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa al-Qur'an, berupa persolan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus dijauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Integrasi tersebut dengan sekaligus menciptakan perangkat lunah yaitu kerangka filosofis yang jelas dan baku. Ahmad Syafii Maarif, menyatakan bahwa pendidikan

Islam harus dijauhkan dari buaian *hellenisme* yang diberi jubah Islam dan harus berada pada sumbu Islam, al-Qur'an, Hadis dan karir yang pernah diraih nabi Muhammad Saw. Maka tidak perlu berteriak, mari Islamkan ilmu modern", yang hanya akan mengulangi hal serupa, yaitu pendidikan Barat yang dijustifikasikan dengan ayat-ayat Qur'an.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kali harus dimiliki adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan memperkosa proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari al-Qur'an dan al-Hadis untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas muslim ini, (Ahmad Syafii Maarif, 1997: 67).

Memang diakui, bahwa untuk mengikis habis persoalan dikotomik bukan hal yang mudah, karena akan berhadap dengan kontraversi pemikiran antar pemikiran kovensional (tradisional) dengan pemikiran kontemporer modern. Tetapi pada sisi lain, diakui bahwa secara malu-malu pendidikan Islam telah melakukan perubahan dengan mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Misalnya saja, kebijakan konvergensi yang diambil Departemen Agama dengan memperkecil perbedaan antara pola pendidikan di lembaga umum dan lembaga agama awalnya direspons pendidikan Islam secara malu-malu, istilah Azyumardi "malu-malu kucing" dan istilah Karel Steembrink, "menolak sambil mengikuti". Artinya, pada akhirnya pendidikan Islam juga melakukan proses adaptasi dengan mengembangkan sistem mengikuti pendidikan umum. Maka kita harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa al-Qur'an. Azyumardi, menekankan bahwa perubahan bentuk dan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perubahan zaman. Menurutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memiliki visi keislaman, kemoderenan, keknian, masa depan dan kemanusian agar *compatible* dengan perkembangan zaman.

Kedua, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Artinya lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi atau memenuhi keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal itupun, masih dirasakan apabila pendidikan Islam "dipandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan spritual, etika dan moral" (A. Malik

Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*:52). *ilahiyah*. Memang diakui, bahwa peserta didik secara verbal kognitif dapat memahami ajaran Islam dan terampil dalam melaksanakannya, tetapi kurang menghayati kedalaman maknanya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral *ilahiyah*.

Selain persoalan tersebut, pendidikan Islam sekarang ini juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yakni persoalan reformasi dan globalisasi menuju masyarakat Indonesia baru. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana upaya untuk membangun paradigma baru pendidikan Islam, visi, misi, dan tujuan, yang didukung dengan sistem kurikulum atau materi pendidikan, manajemen dan organisasi, metode pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetetif dan proaktif dalam dunia masyarakat modern, global dan informasi. Perubahan yang perlu dilakukan pendidikan Islam, yaitu:

1. Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat Indonesia baru yang dilandasi dengan nilai-nilai *ilahiyah,* kemanusia [*insaniyah*], dan masyarakat, serta budaya.
2. Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah agar mampu menyerap aspirasi masyarakat, dapat mendayagunakan potensi masyarakat, dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas.
3. Meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayagunakan potensi masyarakat.

Dari uraian di atas, menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendesain model-model pendidikan alternatif

yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Muncul pertanyaan model-model pendidikan Islam yang bagaimana? Yang diharapkan dapat menghadapi dan menjawan tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural menuju masyarakat Indonesia baru. Untuk menjawab pertanyaan ini, meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang digunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik, humanistik, pragmatik* dan *berakar pada budaya kuat* (A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam,*:37). Tawaran Hasim Amir ini, yang dikutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai konsep pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia, yaitu :

Pertama, pendidikan *integralistik,* merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Pendidikan yang berorientasi pada *Rabbaniyah* (Ketuhanan), *insaniyah* (kemanusiaan) dan *alamiyah* (alam pada umumnya), sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin,* serta pendidikan yang menggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang memiliki integritas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memlihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan (*Teosentris*), artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut. Konsep kemanusiaan, artinya dengan konsep ini dapat dikembangnya antropologi dan sosiologi pendidikan Islam, dan konsep alam dapat dikembangkannya konsep pendidikan *kosmologi* dan ketiga konsep ini harus dikembangkan seimbang dan integratif.

Kedua, pendidikan yang *humanistik,* merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai

manusia (humanisasi), yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan *fitrah*nya. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya.

Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk (*khairu ummah*). Maka, manusia "yang manusiawi" yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

Ketiga, penddidikan *pragmatik* adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spritual *ilahiyah*. Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanausiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan siatuasi yang tidak manusiawi.

Keempat, pendidikan yang *berakar pada budaya,* yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain (A. Malik Fadjar,1999:37-39). Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan,

perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat.

Selanjutnya, dari keempat model yang dikemukakan di atas, dapat ditarik lagi pada disain model pendidikan Islam yang lebih operasional, yaitu:

Pertama, mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian, visi, misi dan tujuan pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajmen pendidikan, organisasi dan sumber daya pendidikan (guru dan tenaga administrasi) harus disesukan dengan kebutuhan serta sesuai misi, visi dan tujuan pendidikan tersebut. Model pendidikan umum Islami, kurikulumnya bersifat integratif antara materi-materi pendidikan umum dan agama, sehingga mampu mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif. Atau meminjam istilah Fazlur Rahman, yaitu model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, untuk melahirkan intelektualisme muslim yang tangguh, walaupun Ahmad Syafii Maarif, menolah hal ini yaitu kita tidak perlu berteriak untuk mengislamkan ilmu modern.

Kedua, model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada disain pendidikan keagamaan seperti sekarang ini. Artinya, harus mendisain ulang model pendidikan Islam yang berkualitas dan bermutu, yaitu : [1] dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas, [2] kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan, [3] metode pembelajaran diorientasikan pada upaya pemecahan kasus (*problem solving* dan bukan dominasi ceramah, [4] manajemen pendidikan diorientasi pada manajemen berbasis sekolah, [5] organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Maka pendidikan Islam akan mampu bersaing dengan mampu mempersiapkan dan melahirkan mujtahid-mujtahid yang tangguh, berkualitas dan berkaliber dunia dalam bidangnya sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Disain model pendidikan seperti ini, harus secara "selektif menerima" pendidikan produk barat, berarti harus mendisain model pendidikan yang betul-betul sesuai dengan konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial-budaya Indonesia. Kata Fazlur

Rahman, apabila kita ingin membangun pendidikan Islam yang berkualitas, harus kembali kepada al-Qur'an dan Qur'an harus ditempatkan sebagai pusat intelektualisme Islam (Fazlur Rahman, 1985:1).

Ketiga, model pendidikan agama Islam tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga, mesjid dan lingkungan masyarakat (tempat-tempat pengajian dan Masjid) dalam bentuk kursur-kursus, kajian-kajian keagamaan, keterampilan beribadah dan sebagainya. Pendidikan agama akan menjadi tanggungjawab orang tua dan masyarakat atau meminjam konsep Yahya Muhaimin yang dikemukakan terdahulu bahwa pendidikan berbasis keluarga (*family-based education*) dan pendidikan berbasis pada masyarakat (*community-based education*). Pendidikan Islam, dapat ditanamkan dan disosialisasikan secara intensif melalui basis-basis tersebut, sehingga pendidikan agama sudah menjadi kebutuhan (*need*) dan based dalam pribadi peserta didik. Maka dalam proses belajar mengajar di sekolah pendidikan agama telah menjadi kebutuhan dan prilaku (*afektif)* dan *psikomotorik* yang aktual, bukan lagi berupa pengetahuan (*knowledge*) yang dihafal (*kognitif)* dan diujikan secara kognitif pula.

Keempat, disain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yakni: [1] dimensi dialektika, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek, dan [2] dimensi ketunduhan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alami, juga menjembatani dalam memahamai fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha Pencipta (M. Irsyad Sudiro, 1995:2). Berati pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, artinya pendidikan harus membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Keempat model pendidikan Islam yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain dan model pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun paradigma pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia. Kecenderungan perkembangan

semacam, dalam upaya mengantisipasi perubahan zaman dan merupakan hal yang wajar-wajar saja. Sebab kondisi masyarakat sekarang ini lebih bersifat praktis-pragmatis dalam hal aspirasi dan harapan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan tidak statis atau hanya berjalan di tempat dalam menatap persoalan-persoalan yang dihadapi pada era masyarakat modern, post masyarakat modern dan masyarakat global.

Dengan demikian, apapun model pendidikan Islam yang ditawarkan dalam masyarakat Indonesia, pada dasarnya harus berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai *ilahiyah,* pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai demokrasi, masyarakat dan lingkungan sosiokulturalnya yang terus berubah dengan cepat, sebab pada saat yang sama pendidikan secara sadar juga digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik, ekonomi secara keseluruhan.

F. Madrasah; *The Center of Excellence*

Persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan (Haedar Nashir, 1999) dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang.

Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai 'sapi perah', madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren,

madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari.

Dengan metode pengajaran modern yang disertai *audio visual aids*, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, misalnya, penuh dengan putra putri konglomerat, sekali daftar tanpa mikir bayar, lengkap sudah fasilitas didapat. Ma'had Al-Zaitun yang berlokasi di daerah Haurgelis (sekitar 30 KM dari pusat kota Indramayu), yang baru berdiri pada tahun 1994, juga telah menjadi incaran masyarakat modern kelas menengah ke atas, bahkan sebagian muridnya berasal dari negara-negara sahabat, seperti Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dengan demikian, model pendidikan madrasah di lingkungan pesantren telah memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

Model-model pondok pesantren modern seperti itu, kini telah bermunculan di berbagai daerah. Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal misalnya, juga ada pondok pesantren "Darul Amanah" yang mengutamakan penguasaan bahasa asing yakni Bahasa Arab dan Inggris. Pondok Pesantren yang didirikan oleh para alumni Pondok Pesantren Modem Gontor Ponorogo pada tahun 1990 itu telah menampung sekitar 1300 santri (siswa).

Melihat kenyataan seperti itu, tuntutan pengembangan madrasah akhir-akhir ini dirasa cukup tinggi. Pengembangan madrasah di pesantren yang pada umumnya berlokasi di luar kota dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah kota, baik di kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan *performance* pakaian para

santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam (Al-Abrasyi, 1970; Jalaluddin dan Said, 1996).

Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non madrasah) yang menjadi anak emas pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya selama lebih dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-cita (perundang-undangan). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui berbagai cara baik kurikuler (Pendidikan Nasional dan Ketahanan Nasional atau PPKN) maupun ko kurikuler (Penataran P-4) telah melahirkan elit politik yang tidak mampu tampil sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik) bahkan memberikan kesan korup dan membodohi rakyat. Kegiatan penataran dan cerdas cermat P-4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) tidak lebih dari aktivitas ceremonial karakteristik. Disebut demikian karena kegiatan tersebut telah meloloskan para juara dari peserta yang paling mampu menghafal buku pedoman dan memberikan alasan pembenaran, bukan mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancsila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para peserta penataran atau cerdas cermat P-4 berlomba-lomba menghafal butir-butir Pancasila tanpa berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Itulah di antara faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas bangsa ini (Dradjat, 1971).

Setelah kebobrokan moral dan mental merebak dan merajalela, orang baru bangun dan sadar bahwa pendidikan moral yang selama ini dilakukan lebih berorientasi pada pendidikan politik pembenaran terhadap segala pemaknaan yang lahir atas restu regim yang berkuasa. Upaya pembinaan moral yang bertujuan meningkatkan harkat dan

martabat manusia sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam perundang-undangan telah dikesampingkan dan menjadi jauh dari harapan.

Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom (1956) yang dikenal dengan nama *Taxonomy of Educational Objectives*, yang mencakup tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Meskipun demikian, keberhasilan output (lulusan) pendidikan hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat pun, jika ia dapat mengerjakan tes PAl (Pendidikan Agama Islam) dengan baik maka ia bisa lulus (berhasil), dan jika nilainya baik, maka ia pun dapat diterima pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan *outcome* (*performance)* seorang alumni Madrasah, bagaimanapun nilai raport dan hasil ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan yang menjadi tempat ia belajar. Karena itulah keberhasilan out-come disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik. Bagi lembaga pendidikan "Madrasah", kedua standar keberhasilan (*output dan outcome*) yang mencakup tiga domain *taxonomy of educational objectives*, tidak dapat dipisahkan. Di samping Madrasah mendidik kecerdasan, ia juga membina moral dan akhlak siswanya (Al-Abrasyi, 1970; Abdullah, 1994).

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah. Madrasah juga lebih *survive* dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih eksis dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik

pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.

Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remidial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada.

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan.

Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasai masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.

Akhirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisir tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

BAB V
PENGEMBANGAN MADRASAH DI ERA DIGITAL

A. Digitalisasi Madrasah; Sebuah Keniscayaan

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital (Wawan Setiawan, 2021).

Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri.

Mencermati berbagai tantangan yang ditimbulkan era digital harus disikapi dengan serius, menguasai, dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, mengusai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Anak-anak dan remaja harus dipahamkan dengan era digital ini baik manfaat maupun madaratnya. Orang tua harus pula dipahamkan agar dapat mengontrol sikap anak- anaknya terhadap teknologi dan

memperlakukannya atau menggunakannya dengan baik dan benar. Pengenalan tentang pemanfaatan berbagai aplikasi yang dapat membantu pekerjaan manusia perlu dikaji agar diketahui manfaat dan kegunaannya serta dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien terhindar dari dampak negatif dan berlebihan. Demikian juga pemerintah melakukan kajian mendalam era digital ini dalam berbagai bidang tidak terkecuali bidang pendidikan madrasah.

Dalam konteks perkembangan era digital sekarang ini, maka digitalisasi madrasah menjadi sebuah keniscayaan. Siapapun tak bisa mengelak dari derasnya arus perkembangan teknologi digital saat ini, sehingga lembaga pendidikan madrasah juga harus menyadari untuk memulai proses *onboarding* ke platform digital. Maka kemudian madrasah digital pun menjadi kewajaran bukan semata tuntutan zaman.

Transformasi digital madrasah dalam beberapa waktu terakhir terasa menjadi gaung yang cukup kuat terdengar. Secara faktual, banyak eksponen madrasah, baik siswa, guru, maupun madrasahnya sendiri, menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di berbagai level. Dalam capaian tersebut, madrasah secara jelas menunjukkan diri sebagai entitas yang tidak lagi dapat dilihat sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Madrasah, selain mencetak berbagai prestasi akademik dan non-akademik yang monumental, juga telah berkembang sedemikian rupa dalam interaksi yang intensif dengan semangat dan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Moh Ishom (2022) mengatakan bahwa latar belakang transformasi digital yang ingin dilakukan adalah pertama, mengangkat krediabilitas madrasah dari persepsi sebagai lembaga pendidikan kelas dua dan lembaga pendidikan kampungan menjadi madrasah yang berada di level menengah dan bersiap menjadi yang terdepan. Karenanya, madrasah memiliki peluang yang besar untuk menjadi kebanggaan dan menjadi destinasi pendidikan kelas dunia. Instrumen yang dipakai salah satunya adalah transformasi digital karena inilah semangat zaman.

Dengan spirit ini, harus melakukan berbagai terobosan, di antaranya adalah dengan memperbaiki tampilan fisik madrasah, bekerja sama dengan berbagai pihak (Bappenas, PUPR, Kemenkeu, dan

lainnya). Dari perbaikan tampilan fisik ini lalu bergerak menuju peningkatan mutu, baik dari mutu layanan, kurikulum, guru, siswa, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, layanan digital menjadi pilihan paling tepat karena semangat zaman dan kebutuhan. Di madrasah, banyak hal yang sudah dikembangkan secara digital pada berbagai aspek. Ishom (2022) lebih lanjut mengatakan bahwa madrasah harus menjadi wajah peradaban Indonesia. Ini poin pentingnya. Madrasah harus bisa menjadi inti sari penghargaan kearifan lokal agar mampu merangkai kebhinekaan yang ada. Guru dan tenaga kependidikan (tendik) harus berwawasan nasional. Dari sinilah akan tercipta kerukunan beragama dan kebanggaan terhadap nasionalisme sebagaimana yang diperjuangkan para ulama dan pemuka agama kita dahulu.

Lebih dari itu, madrasah harus siap untuk berdaya saing secara global dan memiliki karakter keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang kuat sebagai pondasi wajah peradaban Indonesia.

Dalam merespon tuntutan era digital dewasa ini, pihak Kementerian Agama sudah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu dan kualitas madrasah antara lain melalui kebijakan penganggaran Lembaga Pendidikan madrasah. Khusus madrasah, Kementerian Agama sejak tahun 2021 sudah menganggarkan Bantuan Afirmasi Madrasah hingga mencapai Rp. 399,9 miliar yang diimplementasikan melalui Program *Realizing Education's Promise Madrasah Education Quality Reform*. Anggaran ini diperuntukkan bagi 2.666 madrasah di berbagai provinsi. Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani (2022) mengatakan masing-masing madrasah dalam program tersebut menerima bantuan Rp150 juta tahun lalu. Bantuan tersebut diberikan kepada madrasah yang sudah menerapkan sistem Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) yang sudah dilatihkan pada 2020 dan mulai diaplikasikan tahun lalu. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dengan penekanan pada pemanfaatan yang harus didasarkan pada kebutuhan mendesak madrasah yang dirumuskan berdasarkan hasil EDM serta sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi (2022) mengatakan bahwa bantuan diharapkan digunakan dalam rangka penguatan digitalisasi madrasah.

Selain itu juga bisa untuk meningkatkan kualitas sanitasi, dan kebutuhan program lainnya dalam rangka mendukung mutu pembelajaran di madrasah di era digital. Isom mengakui bahwa pemberian bantuan afirmasi ini memang belum bisa menyasar ke seluruh madrasah. Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran Kementerian Agama. Untuk soal pelaporan, pihaknya telah menerapkan sistem e-RKAM sebagai *platform e-planning* dan *e-budgeting* madrasah, sehingga akuntabilitas pelaporan bantuan dapat dijamin. Sebelum pandemi Isom Yusqi menjelaskan, program digitalisasi madrasah sudah dilakukan sejak 2019 atau sejak sebelum pandemi.

Sejumlah program yang dilakukan antara lain merevisi petunjuk teknis relaksasi pemanfaatan dana BOS hingga bisa digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran online. Upaya lainnya adalah memberikan bantuan pengadaan server dan Jaringan Komputer CBT (*Computer Based-Test*) untuk semua jenjang, baik itu Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, maupun Ibtidaiyyah. Anggaran untuk bantuan ini memang diakui tidak banyak bahkan sangat terbatas. Pada 2021 saja misalnya kuota penerima bantuan ini sebanyak 200 Madrasah Aliyah, 250 Madrasah Tsanawiyah, dan 100 Madrasah Ibtidaiyah. Sejak 2019,

Kementerian Agama juga memberikan bantuan pembangunan Madrasah Negeri melalui dana SBSN (Surat Berharga Sukuk Nasional). Salah satu pemanfaatan bantuan tersebut adalah untuk menunjang implementasi kelas digital. Sampai tahun ini, bantuan pembangunan madrasah negeri melalui SBSN juga masih berlangsung. Selama pandemi, Kementerian Agama bahkan mengakselerasi digitalisasi madrasah melalui sejumlah program di antaranya program buku digital madrasah dimana siswa dapat membaca dan mengunduh buku secara gratis melalui laman https://madrasah2.kemenag.go.id/buku/. Ada pula E-learning madrasah, bekerja sama dengan *Google* (*Google for Education*), menyediakan *google classroom*, *google meet,* dan lainnya, serta memberikan storage unlimited kepada guru dan siswa madrasah. Kemudian program Bantuan Kuota Terjangkau, berupa kuota internet murah untuk guru, siswa dan karyawan madrasah. Bekerjasama dengan empat provider (Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri). Kemudian akses gratis pada Platform Pembelajaran Dragon learn.org, Layanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring untuk semua madrasah di seluruh Indonesia, hingga menggagas

Gerakan Madrasah Mandiri Berprestasi untuk menggalang Donasi Smart Phone bekas layak pakai untuk siswa yang tidak memiliki perangkat pembelajaran.

Inovasi Selanjutnya, dalam upaya memperluas digitalisasi madrasah, sejumlah pihak dilibatkan termasuk pemberian apresiasi melalui Anugerah Inovasi Madrasah Digital. Upaya ini sudah dilakukan di beberapa daerah termasuk Jawa Timur dan dilakukan pula di Jawa Barat dengan melibatkan start-up edu-tech Infradigital dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Anugerah Inovasi Madrasah juga bertujuan untuk mempercepat dan pemerataan digitalisasi madrasah termasuk juga di Jawa Barat. Ke depannya, program ini akan berjalan di 15 kota/kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2022 dan 12 kota/kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2023.

B. Pemasaran (Marketing) Madrasah di Era Digital

Marketing merupakan strategi mengenalkan produk atau jasa agar bisa diketahui oleh calon konsumen atau masyarakat. Pemasaran di dunia pendidikan sangat diperlukan, dengan tujuan untuk mengenalkan madrasah kepada calon peserta didik baru terkait dengan mutu yang dimiliki madrasah. Persaingan di dunia pendidikan sudah sangat atraktif, sehingga dibutuhkan strategi-strategi khusus dalam pemasaran pendidikan (Alma, Buchori. 1992). Strategi pemasaran pendidikan yang efektif akan memiliki *feedback* yang baik terhadap madrasah, karena citra madrasah di masyarakat menjadi lebih baik dan madrasah akan diminati peserta didik baru.

Istilah 'pemasaran madrasah' mungkin terasa asing di telinga para pengelola madrasah karena dalam istilah itu terkesan adanya anggapan bahwa madrasah adalah usaha bisnis dagang. Kesan ini tentu saja bertentangan dengan pernyataan para pengelola kebanyakan madrasah (dan anggapan masyarakat pada umumnya) bahwa madrasah adalah suatu usaha amal sosial. Tetapi, sebenarnya sudah banyak istilah dan konsep bisnis yang telah masuk dan diterapkan ke dunia pendidikan seperti, 'manajemen', 'supervisi', *cost-benefit analysis*, dan sebagainya.

Manajemen pemasaran bagi lembaga pendidikan terutama madrasah diperlukan seiring adanya persaingan antar madrasah yang semakin atraktif. Pemasaran dibutuhkan bagi lembaga pendidikan

dalam membangun citra yang positif. Apabila madrasah memiliki prestasi yang baik di mata masyarakat, maka besar kemungkinan akan lebih mudah dalam mengatasi persaingan. Pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh madrasah untuk memberikan kepuasaan pada *stakeholder* dan masyarakat. Penekanan kepada pemberian kepuasan kepada stakeholder merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap lembaga, agar mampu bersaing.

Pemasaran tersebut dapat dilihat adanya berbagai upaya kreatif dan inovatif dari para penyelenggaraan pendidikan untuk menggali keunikan dan keunggulan dari madrasah agar dibutuhkan dan diminati oleh pengguna jasa pendidikan. Untuk menarik calon peserta didik diperlukan strategi pemasaran yang bukan saja menjual jasa pendidkan secara apa adanya melainkan pendekatan sesuai dengan keinginan dan kepuasaan pelanggan. Madrasah yang ingin sukses untuk masa depan dalam menghadapi persaingan, harus mempraktikkan pemasaran secara terus menerus.

Sugito (2022) mengatakan bahwa pada dasarnya rumus marketing madrasah dikenal 4 P yaitu *product, price, place dan promotion*.

Pertama, Product /Produk. Produk merupakan hal mendasar yang akan menjadi pilihan bagi masyarakat. Produk madrasah merupakan segala sesuatu yang ditawakan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk dalam konteks jasa pendidikan adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek dan variasi pilihan. Madrasah seyogyanya menawarkan produk sesuai dengan misinya yaitu sebagai proses "*Character Building*", yaitu siswa berakhlak mulia, agamis, religius dan penuh nilai, serta memiliki pengetahuan luas dan keterampilan yang mumpuni. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu Produk

Kedua, Price/ Harga. Strategi harga yang terjangkau untuk semua kalangan dapat berpengaruh terhadap pemilihan madrasah. Umunya orang tua yang berpenghasilan menengah ke bawah , memilih madrasah yang relative murah berkualitas.

Ketiga, Place/ lokasi. Keadaan lokasi strategi yang mudah di jangkau dari segala arah dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi juga kemudahan akses menuju madrasah factor pendukung

kenyamanan siswa, orang tua dan masyarakat sekitar madrasah.Madrasah perlu memiliki lokasi yang strategis, nyaman dan mudah dijangkau. Jika tak memungkinkan, dengan memberikan bantuan layanan transportasi bagi siswa yang jauh atau dengan menyediakan asrama siswa, melaksanakan konsep boarding school.

Keempat, Promosi (Promotion) adalah kegiatan mengomunikasikan penjualan produk di pasaran dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan. Dalam pelaksanaanya, madrasah seyogyanya menggencarkan promosi atau iklan (advertising) melalui media internet, Medis Sosial, TV, radio, surat kabar, buletin, majalah, baliho, brosur, kalender dan lain. People (sumber daya manusia) orang orang yang perlu dilibatkan dalam melakukan marketing. Dalam konteks pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan seperti Tata Usaha (TU), kepala madrasah, guru, dan karyawan serta alumni.

Menurut Arif Furchan (2009), ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan marketing madrasah, yaitu:

1. Pendidikan Sebagai Usaha Penawaran Jasa

Dalam buku-buku pengantar teori ekonomi sering disebutkan bahwa ada dua hal yang diperjuabelikan: barang dan jasa (*goods and services*). Usaha pendidikan yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dapat dikategorikan sebagai usaha penawaran (penjualan) jasa (*service industry*) seperti halnya usaha pelayanan telepon, hotel, pariwisata, pelayanan dokter, rumah sakit, bank, dsb. Ciri khas jasa yang diperjual-belikan, antara lain, adalah jasa tidak berujud, tidak tahan lama (tidak dapat disimpan). Dalam hal usaha pendidikan, yang diperjualbelikan adalah jasa layanan pendidikan.

Usaha pendidikan juga memerlukan modal awal seperti tanah, sumber daya manusia, uang untuk dana operasional. Modal itu kemudian diramu dan dikelola (manajemen) sehingga menjadi produk yang siap untuk ditawarkan kepada konsumen, yaitu layanan pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA, atau kursus bahasa Inggris. Konsumennya adalah masyarakat yang menggunakan jasa layanan pendidikan itu (siswa atau orang tuanya). Untuk itu mereka

harus mengeluarkan uang (uang gedung atau SPP). Agar calon konsumen itu mau menggunakan jasa layanan pendidikan kita, mereka perlu dibangkitkan minatnya terhadap jasa yang kita tawarkan.

Yang mungkin agak menyejukkan adalah bahwa, walaupun sama-sama usaha bisnis, usaha pendidikan berbeda dari usaha dagang biasa. Perbedaannya terletak pada orientasinya. Usaha dagang biasa lebih berorientasi pada keuntungan (laba atau profit) sedang usaha pendidikan tidak. Oleh karena itu, di beberapa negara, usaha pendidikan (dan usaha sosial lainnya) dimasukkan ke dalam kategori lembaga usaha yang tak berorientasi pada keuntungan (*non-profit organization*), walaupun ada juga lembaga pendidikan yang, secara sadar atau tidak, lebih berorientasi pada keuntungan daripada layanan masyarakat (*public service*).

Dalam dunia pemasaran jasa pendidikan juga tidak bisa terlepas dari elemen bauran pemasaran. Pertama, Produk. Produk merupakan hal yang mendasar yang akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang ditawarkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk yang dihasilkan dan ditawarkan harus berkualitas. Produk layanan pendidikan lebih bervariasi seperti kegiatan keagamaan, olah raga, keterampilan, kesenian.

Media digital dalam pemasaran madrasah merupakan media yang baik di era serba digital saat ini. Akar masalah saat ini rendahnya optimalisasi madrasah dalam memanfaatkan media digital sebagai media untuk melakukan pemasaran. Salah satunya madrasah kurang dalam memberikan informasi mengenai lembaga, keunggulan-keunggulan yang dimiliki, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Padahal semua itu adalah salah satu faktor yang mampu menarik minat masyarakat terhadap lembaga tersebut.

2. Dana Sebagai Kendala Utama Perkembangan Suatu Madrasah

Persoalan yang dihadapi oleh madrasah sebenarnya banyak, tergantung dari keadaan madrasah itu sendiri. Umumnya, yang dikeluhkan adalah kalahnya madrasah dalam bersaing dengan sekolah umum untuk memperebutkan calon siswa berprestasi. Siswa berprestasi umumnya lebih memilih sekolah umum daripada madrasah karena mereka beranggapan bahwa sekolah umum lebih menjanjikan harapan bahwa prestasi mereka akan lebih baik di sana. Madrasah

dianggap kalah mutunya jika dibandingkan dengan sekolah umum. Siswa madrasah juga sering merasa rendah diri jika berhadapan dengan siswa sekolah umum yang setara dengan sekolahnya.

Kambing hitam untuk kurang-mutunya madrasah ini bermacam-macam namun ujung-ujungnya adalah 'duit' (dana). Kurangnya dana dianggap menyebabkan madrasah tidak dapat memberikan fasilitas yang lebih baik, mengirim guru ke penataran PBM, memberi gaji yang lebih baik kepada guru, dsb. Penyebab kurangnya dana operasional ini, terutama di madrasah swasta, antara lain, disebutkan, karena sumber utama dana mereka, yaitu orang tua, berasal dari golongan ekonomi lemah. Sementara itu, sumber dana insidentil yang diharapkan datang dari anggota masyarakat juga tidak lancar.

Kunci utama untuk memantapkan kelancaran dana operasional ini adalah apabila kita dapat menarik minat masyarakat golongan menengah untuk bersekolah atau menyekolahkan anaknya ke madrasah kita. Susahnya, masyarakat golongan menengah ke atas ini, karena kemampuannya untuk membayar lebih, biasanya mempunyai selera tinggi. Mereka hanya mau bersekolah (menyekolahkan anaknya) ke sekolah yang lebih bermutu atau lebih bergengsi. Madrasah, yang sering dianggap kalah mutu atau kalah gengsi dengan sekolah umum, sering tidak dipandang sebelah mata. Di sinilah perlunya madrasah menetapkan strategi pemasaran untuk menarik minat calon konsumen yang diharapkan itu.

3. Fungsi Pemasaran dalam Pendidikan

Fungsi pemasaran (*marketing*) dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan citra baik terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan. Tujuannya adalah menarik minat anggota masyarakat untuk menggunakan jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah itu. Cara untuk menciptakan citra ini bermacam-macam, tergantung pada anggota masyarakat yang dituju. Apabila calon konsumen yang kita tuju adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, maka kita harus menciptakan citra bahwa madrasah kita itu tidak mahal. Apabila calon konsumen yang dituju adalah golongan ekonomi menengah ke atas yang berani membayar lebih untuk kualitas layanan yang lebih baik, maka citra yang harus diciptakan adalah bahwa madrasah memberikan layanan yang lebih bagus daripada sekolah lain,

walaupun untuk itu mereka harus membayar lebih mahal sedikit. Penetapan nilai agak tinggi juga sering dimaksudkan untuk menciptakan citra bahwa madrasah yang bersangkutan bersikap selektif dan lebih mementingkan prestasi daripada kemampuan membayar.

Untuk menetapkan strategi pemasaran yang tepat itu pihak madrasah perlu melakukan semacam riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu riset yang ditujukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan oleh pimpinan untuk merumuskan kebijakan pemasaran dan rencana usaha (Converse, Huegy, and Mitchell, 1958). Dalam hal madrasah ini, riset pemasaran itu dapat dilakukan, pertama, dengan menetapkan siapa yang menjadi sasaran pemasaran (calon konsumennya).

Kemudian kelompok konsumen yang dituju itu diteliti mengenai aspirasi pendidikannya, kemampuan membayar layanan pendidikan yang diinginkan, dsb. Tergantung situasinya, ini dapat dilakukan secara formal dan memakan dana yang cukup besar atau secara informal dengan dana yang sedikit.

Dengan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sasaran dalam hal pendidikan serta berapa kemampuan membayar mereka untuk pendidikan itu, maka pimpinan madrasah (yayasan) dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat guna menarik minat mereka.

Daya tarik madrasah yang terutama adalah pendidikan keagamaan. Karena tertarik akan pendidikan keagamaan inilah, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke madrasah, walaupun mereka tahu bahwa mutu pendidikan umumnya kalah dengan pendidikan umum yang diberikan di sekolah umum. Biasanya, orang tua seperti ini berasal dari kalangan santri tradisional, yang lebih mementingkan pengetahuan agama daripada pengetahuan umum. Namun, perkembangan zaman yang semakin didominasi oleh kebutuhan ekonomi konsumtif telah membuat orang tua semacam ini menjadi sangat kurang. Bahkan, anak kiai pun kini lebih banyak yang bersekolah di sekolah umum daripada di madrasah. Mungkin karena mereka beranggapan bahwa anak mereka sudah mendapat pendidikan agama di rumah sehingga mereka cukup mencari pengetahuan umum saja di sekolah. Dari segi teori ekonomi, inilah keunggulan komparatif

madrasah atas sekolah umum dan tampaknya sekolah umum tidak ingin menyaingi madrasah dalam hal ini. Madrasah perlu mempertahankan keunggulan komparatif ini dengan memberikan mutu layanan pendidikan keagamaan yang baik.

Namun, seperti telah dikemukakan di atas, pendidikan agama saja kini mulai dikalahkan oleh keinginan mendapatkan pendidikan umum yang bermutu. Oleh karena itu, kalau madrasah ingin menarik minat kelompok masyarakat ini, maka ia pun harus dapat menawarkan kualitas pendidikan umum yang bersaing. Kurikulum mata pelajaran umum di madrasah kini seratus persen sama (dalam materi dan jumlah jam) dengan kurikulum sekolah umum mungkin dapat mengejar ketertinggalan madrasah dalam mutu pelajaran umum dari sekolah umum.

Peningkatan mutu pelajaran umum di madrasah ini makin penting mengingat siswa yang masuk ke madrasah itu dapat dianggap sebagai asset ummat. Mereka yang masuk ke madrasah dapat dianggap sebagai memiliki motivasi keagamaan yang kuat. Kalau orang seperti ini menjadi pemimpin bangsa kelak pasti masa depan negara ini akan makin baik. Akan sayang sekali kalau anak-anak seperti itu, setelah dewasa, tidak bisa menjadi pemimpin bangsa karena kualitas pendidikan umumnya kalah bersaing dengan mereka yang belajar di sekolah umum

4. Perlunya Komunikasi dengan Masyarakat

Setelah berbagai usaha untuk meningkatkan citra madrasah itu diupayakan, usaha-usaha tersebut perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, terutama kelompok yang menjadi sasaran pemasaran. Banyak madrasah yang walau sudah berusaha meningkatkan fasilitas, kualitas guru, efektivitas kurikulum, serta mutu pendidikannya secara umum, tetap kurang dapat menarik minat masyarakat karena masyarakat tersebut tidak diberi tahu tentang usaha-usaha yang telah dilakukan oleh madrasah tersebut beserta hasil-hasil yang dicapai oleh usaha tersebut. 'Tak kenal maka tak sayang', kata pepatah.

Usaha untuk mengkomunikasikan usaha peningkatan mutu dan keberhasilan madrasah di bidang pendidikan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk masyarakat sasaran tingkat lokal, itu dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang

menyebabkan masyarakat setempat tertarik untuk datang ke madrasah tersebut. Pameran, kegiatan olah raga dan kesenian yang melibatkan masyarakat setempat, kunjungan orang tua dan calon siswa ke sekolah (*open day*), keikut sertaan dalam pawai dan karnaval di kota sendiri, semuanya merupakan sarana untuk memperkenalkan madrasah itu ke masyarakat dan mengkomunikasikan prestasi madrasah. Untuk masyarakat sasaran yang lebih jauh tempatnya, komunikasi ini dapat dilakukan lewat brosur, tanggalan, cinderamata, majalah siswa madrasah, *newsletter*, atau surat kabar umum.

Penyebaran informasi tentang prestasi madrasah secara luas ini juga penting bila madrasah yang bersangkutan ingin menarik minat calon penyumbang dana bagi pengembangan madrasah tersebut. Lembaga pendidikan Islam mempunyai peluang lebih banyak dibanding lembaga pendidikan dari agama lain untuk mendapatkan sumbangan dari pemeluk agamanya karena adanya konsep *'amal jariyah'* yang tak akan putus sampai hari kiamat dalam ajaran agama Islam. Konsep ini telah menggerakkan hati banyak orang Islam untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan gedung sekolah, rumah yatim, ataupun masjid.

Orang-orang Muslim yang berharta itu perlu didekati dengan tepat agar mereka tertarik untuk menyumbangkan uangnya guna kepentingan madrasah kita. Permintaan sumbangan yang berhasil adalah permintaan sumbangan yang dapat membuat orang yang bersangkutan tidak merasa berat melepaskan uangnya (karena jumlahnya relatif kecil menurut ukuran penghasilannya), dapat melihat keuntungan yang akan diperolehnya (baik di akhirat ataupun di dunia ini), dan tahu bagaimana uangnya itu digunakan. Penempelan nama penyumbang pada buku sumbangan, pada barang atau gedung yang disumbangkan, akan merupakan daya tarik tersendiri bagi penyumbang. (Arif Furchan, 2009)

Dengan demikian, marketing madrasah di era digital dapat dilakukan melalui melalui:

Pertama, Website madrasah. *Website* hampir menjadi media wajib yang harus dimiliki oleh semua lembaga baik lembaga yang bergerak dalam industri dan perdagangan lembaga penyelenggara pendidikan di era 4.0. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan memanfaatkan *website* untuk meningkatkan keterlibatan

publik. *Website* dijadikan sebagai media untuk mempromosikan madrasah. Melalui *website* Madrasah mempromosikan dengan menampilkan informasi penting terkait madrasah. Konten *website* madrasah ini menampilkan berbagai menu antara lain profil madrasah, akademik, ekstrakurikuler, kegiatan madrasah, sarana dan prasarana, kegiatan pembiasaan, foto kegiatan. Selain itu *website* madrasah ini juga menampilkan alamat jelas dan nomor telepon madrasah

Kedua, Facebook. madrasah *Facebook* sebagai salah satu media promosi yang digunakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Demikian pula dengan madrasah. Dalam melakukan promosi, terlepas berdampak signifikan terhadap keterlibatan public rekrutmen murid atau tidak. Pada dasarnya *facebook* bukan penentu berhasil atau tidaknuya promosi madrasah namun konten postingan di *facebook* juga ikut menentukan keberhasilan atau gagalnya promosi madrasah

Ketiga, Instagram. Instagram sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh publik dimanfaatkan pula oleh banyak lembaga pendidikan. Madrasah harus memanfatkan *instagram* sebagai media promosinya.

Promosi *via instagram* dilakukan dengan cara menampilkan events atau peristiwa yang berkenaan dengan kesiswaan dan kegiatan madrasah.

Keempat, Twitter Twitter sebagai media yang banyak digunakan oleh public dimanfaatkan oleh Madrasah sebagai media promosi. *Twitter* digunakan untuk menjaring keterlibatan masyarakat. di Negara-negara maju *twitter* menjadi salah satu alternative media yang digunakan untuk media promosi madrasah.

Kelima, Youtube. Youtube salah satu media sosial yang banyak dikunjungi oleh masyarakat banyak dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mempromosikan lembaganya. Video sebagai konten utama dari Youtube dianggap perlu dimanfaatkan oleh Madrasah dengan mengunggah video tentang profil, kegiatan kesiswaan, kegiatan lembaga dan events penting lainnya.

Keenam, Brosur. Brosur Meskipun era digital memberikan kemudahan dalam promosi madrasah namun bukan berarti media konvensional ditinggalkan. Madrasah tetap menggunakan brosur

dalam promosi madrasah. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat masih belum tersentuh oleh teknologi digital. Sebagian masyarakat di desa masih memanfaatkan brosur untuk mengakses informasi melalui brosur/pamphlet . Bagi sebagian masyarakat brosur masih menjadi media pemberi informasi.

Ketujuh, Bazar Madrasah. Pameran pendidikan dapat berupa bazar madrasah atau pameran pendidikan banyak dilakukan juga oleh banyak lembaga pendidikan untuk media promosi. Madrasah juda dapat memanfaatkan Pameran pendidikan sebagai media promosi. Hal ini penting dilakukan karena madrasah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memasarkan Madrasah. Bazar Madrasah biasanya diikuti oleh banyak madrasah. Bazar madrasah dapat dilakukan waktu wisuda, hari ulang tahun madrasah, Kegiatan pengambilan raport,

Kedelapan. Jaringan ikatan alumni. Ikatan alumni merupakan nilai tambah yang menyumbang pada rekrutmen peserta didik. Melalui ikatan alumni promosi madrasah menjadi semakin luas ruang geraknya. Alumni yang tersebar di dalam maupun luar kota menjadi duta madrasah yang secara langsung maupun tidak langsung memberi kontrinusi terhadap promosi madrasah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun yakni reuni akbar. Kegiatan ini dibagi menjadi dua event dalam setahun.

Selain marketing Madrasah dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk memperkenalkan kepada masyarakat tetapi harus dibarengi dengan inovatif, kreatif dari sesuai dengan harapan msayarakat. Semoga madrasah bukan menjadi pilihan kedua melainkan pilihan pertama bagi masyarkat karena kualitas dan prestasi.

C. Konsep Pengembangan Madrasah di Era Digital

Di Indonesia, madrasah baru muncul sekitar abad ke-20. Kendati demikian, latar belakang berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu: semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Timur Tengah dan merupakan respon pendidikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah maka madrasah didirikan selain sebagai upaya penyebaran dan peningkatan pemahaman Islam juga sebagai bentuk counter hegemoni

terhadap dominasi dan sisa penjajahan Belanda (Dewi & Lazwardi, 2022).

Lebih lanjut, dalam perkembangannya madrasah mengalami berbagai bentuk tantangan tersendiri seperti paradigma masyarakat yang menjadikan madrasah sebagai pilihan kedua dalam melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, akan tetapi seiring perjalanan waktu madrasah telah mendapat tempat "mulia" di sisi masyarakat pada umumnya akibat keberhasilan madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan (Alam, 2020). Hal tersebut merupakan modal besar dalam proses tumbuh-kembangkannya madrasah sehingga mampu tetap hidup dan bertahan di tengah tantangan yang menghampiri. Kontribusi madrasah dalam perkembangan pendidikan di Indonesia sangatlah nyata, selain karena Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga karena faktor keberhasilan para lulusan madrasah yang mampu bersaing secara global (Salamun et al., 2021).

Dewasa ini, dapat dikatakan bahwa madrasah telah menghadapi tantangan baru yakni tantangan perkembangan zaman yang mengarah kepada tranformasi pendidikan berbasis digital. Pada era digital, madrasah tidak hanya dituntut dari segi materi pembelajaran tentang keagamaan, akan tetapi juga penekanannya pada aspek model atau desain pembelajaran yang dituntut untuk beradaptasi dengan dunia digital (E Saidi & Harmi, 2022). Secara umum, dinamika pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan signifikan di era digital. Kecenderungan yang hadir adalah gaya hidup baru di kalangan masyarakat yang tidak bisa terlepas dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi digital menjadi instrumen baru yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan dan penggunaan teknologi menawarkan kemudahan tersendiri bagi masyarakat dalam melakukan segala macam pekerjaan (Rosyid, 2019). Kondisi demikianlah yang mengubah sendi-sendi kehidupan dan membawa peradaban manusia memasuki babak baru yang dikenal dengan istilah era digital atau digitalisasi.

Perkembangan era digital di Indonesia membawa poros kehidupan baru dalam kehidupan masyarakat yang bertumpuh pada pemanfaatan teknologi berbasis jaringan atau internet tanpa

pengecualian, juga berlaku di sektor lembaga pendidikan Islam seperti madrasah (Yasmansyah & Zakir, 2022). Kecanggihan teknologi berbasis internet di satu sisi menciptakan kegamangan di lingkup madrasah, akan tetapi di lain sisi memberi peluang kepada madrasah dalam mengembangkan kualitas sesuai tuntutan zaman.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa madrasah dewasa ini menghadapi tantangan baru sehingga membutuhkan Langkah-langkah kreatif untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Di antaranya adalah penelitian dari Babara Susyanto (2022) yang berjudul "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Digital". Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi dari penggunaan teknologi digital dalam mengembangkan kemampuan baik peserta didik maupun tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam. Kecakapan dalam penggunaan teknologi digital dapat menjadi pendukung tersendiri dalam mengembangkan potensi diri peserta didik dan tenaga pendidik, di antaranya inovatif dalam peningkatan kualitas lembaga dan memiliki sikap terbuka dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman (Susyanto, 2022). Persamaan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek lembaga pendidikan islam dan era digital. Dan yang membedakan adalah pada aspek spesifikasi lembaga pendidikan Islam, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada madrasah sedangkan penelitian ini sifatnya umum untuk semua lembaga penelitian Islam. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada model pengembangan madrasah di era digital yang ada di daerah pedalaman di kawasan Indonesia bagian timur dengan jenis penelitian lapangan. Sementara itu, penelitian ini adalah penelitian jenis studi pustaka.

Kedua, penelitian dari Eristiana, dkk (2022) dengan judul "Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Era Digital". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa model dan konsep dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah di era digital dapat dilakukan melalui kemampuan dalam pemanfaatan teknologi, seperti proses pembelajaran berbasis digital dan manajemen pendidikan sesuai tuntutun perkembangan. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran mampu menghadirkan kebebasan tersendiri bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Peserta didik menikmati segala jenis pembelajaran yang disajikan melalui perangkat digital dan mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik dengan

penuh semangat dikarenakan hal tersebut sesuai dengan keinginan peserta didik berdasarkan keseharian peserta didik dengan perangkat digital. Rancangan pembelajaran berbasis digital di madrasah selain dapat meningkatkan kualitas pendidikan di kancah global, juga dapat memberikan stimulasi perkembangan diri bagi peserta didik sehingga mampu melahirkan para lulusan yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi yang menjadi bekal utama saat ini dalam menghadapi perkembangan zaman (Eristiana Saidi et al., 2022). Terdapat perbedaaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, yakni pada aspek jenis penelitian yang digunakan dan aspek peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dan bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dan bertujuan untuk mendemonstrasikan model pengembangan madrasah di era digital di wilayah pedalaman yang ada di Indonesia bagian timur. Persamaan dari keduanya adalah pada aspek madrasah di era digital. Keduanya memiliki konsentrasi utama dalam mengkaji perkembangan madrasah di era digital.

Ketiga, penelitian tentang "Madrasah Berkeadaban di Era 5.0" yang dilakukan oleh Nur Isnaini Albanjari (2021). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi ukuran utama dalam mengembangkan konsep madrasah 5.0 yang tetap mengedepankan aspek moralitas yang beradab, yakni pertama, melalui pengembangan berbasis era 5.0, lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah dapat melakukan *upgrade* metodologi pembelajaran. Kedua, pembaharuan dan reformulasi kurikulum dapat menyesuaikan dengan konteks perkembangan era digital. Ketiga, integrasi sistem pendidikan nasional dengan lembaga pendidikan Islam berbasis perkembangan teknologi. Terakhir, madrasah berbasis teknologi dapat menciptakan SDM berkualitas sesuai tuntutan zaman (Albanjari, 2021). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka dalam mengumpulkan data. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan. Dan persamaannya adalah pada aspek madrasah di era digital. Penelitian lebih menekankan konsep madrasah yang baik dan efektif dalam menghadapi era 5.0, sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada model pengembangan madrasah dalam

menghadapi era digital di beberapa wilayah pedalaman yang ada di kawasan Indonesia timur.

Keempat, penelitian yang berjudul "Digitalisasi Madrasah di Era Revolusi Industri 4.0: Refleksi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ponorogo" yang dilakukan oleh Edi Irawan (2019). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan madrasah digital sebagai bentuk refleksi kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan kepada masyarakat tentang manfaat hadirnya sebuah website di sebuah madrasah. Dari hasil penelitian ini, para tenaga pendidik mampu mengoperasikan platform digital dalam menjalankan aktivitas pembelajaran ditambahlagi dengan penggunaan website madrasah yang dapat merekam segala aktivitas di madrasah tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif yang dilakukan dapat diketahui oleh khalayak. Hal tesebut menjadi salah satu bentuk motivasi bagi madrasah lainnya untuk terus memacu perkembangan lembaga pendidikannya (Irawan, 2019). Digitalisasi madrasah menjadi konsep yang sama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini adalah melakukan pengembangan pada aspek digitalisasi madrasah dengan membuat beberapa platform digital untuk madrasah. Hal senadapun akan dilakukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi, hal yang membedakan adalah lokasi penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengambil beberapa lokasi pedalaman yang ada di kawasan Indonesia bagian timur.

Terakhir, penelitian dengan judul "Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia" yang dilakukan oleh Syamsul Kurniawan (2019). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi madrasah di Indonesia pada abad 21, di antaranya dalam reformulasi kebiasaan para guru dalam hal ini kecakapan penggunaan teknologi di kalangan tenaga pendidik dituntut mengalami perkembangan, hambatan integrasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran dalam hal ini dapat diatasi dengan membuat rancangan dan pelatihan-pelatihan berbasis teknologi yang bertujuan untuk melatih kemelekan teknologi digital sehingga mampu mempermudah dan beradaptasi dengan teknologi berbasis digital, dan tantangan reformasi kurikulum sesuai selera abad 21 dalam hal ini

terdapat beberapa hal dari segi kurikulum yang harus disesuaikan dengan mekanisme pembelajaran atau pendidikan di abad 21 mulai dari penyetaraan kurikulum berbasis digital hingga proses pembelajaran melalui pemanfaat teknologi dan internet (Kurniawan, 2019). Penelitian ini menguraikan beberapa masalah yang dianggap sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi perkembangan madrasah di era digital, akan tetapi terlepas dari hal tersebut juga terdapat peluang madrasah untuk berkembang di era digital. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan lebih kepada model pengembangan madrasah di era digital yang meliputi konsep-konsep yang dapat diterapkan di madrasah dalam menghadapi era digital berikut faktor penghambat dan pendukung proses pengembangan. Hal tersebutlah dinilai sebagai perbedaan tersendiri antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan, persamaannya adalah berfokus pada perkembangan madrasah di era digital.

Dalam menghadapi konteks perkembangan zaman yang mengharuskan transformasi berbasis digital, madrasah dituntut menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital (Efendi, 2021). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya, madrasah di era digital harus memperhatikan beberapa hal untuk diterapkan, di antaranya:

1) Madrasah harus memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan daya saing secara terencana dan sistematis sehingga keluaran dari madrasah baik berupa kualitas lulusan maupun inovasi pengembangan lembaga pendidikan dapat bersaing di kancah global.
2) Madrasah harus melihat dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan era digital sehingga mampu mengorientasikan para lulusan untuk siap menghadapi dunia usaha dan dunia industri. Hal dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan dan atau membuka jurusan sesuai tuntutan dunia industri dan pekerjaan.
3) Madrasah harus tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang inklusif dan terbuka dengan perubahan tanpa mengesampingkan prinsip dan nilai-nilai dasarnya, seperti nilai keislaman dan keindonesiaan.
4) Madrasah dituntut untuk terus melakukan pembaharuan berdasarkan konteks perkembangan agar tetap mampu

mempertahankan kualitas pendidikannya (Santosa & Jazuli, 2022).

Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh madrasah di era digital dalam mengembangkan mutu, yakni:

1) Komitmen madrasah dalam peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas utama dan mampu menampilkan kompetensi dan kapabilitas para lulusannya secara nyata demi kepentingan alokasi lulusan di dunia kerja.
2) Penguatan aspek kolaboratif madrasah dengan lembaga pendidikan Islam lainnya atau lembaga pendidikan umum menjadi ukuran tersendiri bagi madrasah dalam hal mutu pendidikan.
3) Apresiasi dan harapan masyarakat terhadap madrasah semakin meningkat dengan melihat manajemen madrasah yang mengutamakan ketercapaiaan indikator mutu dan relevan dengan dunia kerja.
4) Sebagai lembaga pendidikan masyarakat religius dengan ciri keimanan dan tata nilai yang baik, madrasah mampu tetap menanamkan karakter islami bagi para peserta didik melalui integrasi pendidikan Islam dengan teknologi digital (Hanik, 2020).

Dalam menghadapi tantangan era digital, madrasah memiliki beberapa syarat harus dipenuhi sehingga mampu beradaptasi, yakni:

1) Madrasah harus memanfaatkan pengunaan teknologi berbasis digital dalam segala aspek pembelajaran dan terus melakukan evaluasi pembelajaran sebagai upaya dalam meminimalisir dampak negatif dari penggunaan teknologi. Hal tersebut merupakan komitmen sekaligus bentuk dukungan madrasah terhadap kehadiran era digital.
2) Madrasah harus terus memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi sebagai instrumen yang mendukung proses pembelajaran, seperti pengembangan pembelajaran berbasis *e-learning*, ketersediaan bahan baca berupa *e-book*, aplikasi tafsir digital, dan mengembangkan *digital library* (Nizar, 2022).

Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Madrasah Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Litbang dan Diklat Balai Penelitian dan Pengembangan Agama pada tahun 2019 tentang Modeling Madrasah Digital dapat dikatakan bahwa konsep madrasah digital merupakan sebuah konsep manajemen pendidikan Islam melalui pemanfaatan teknlogi berbasis jaringan, menyelenggarakan pembelajaran digital, menerapkan strategi dan inovasi berbasis digital, sumber dan media pembelajaran berbasis pemanfaatan teknologi (Amreta, 2018). Pelaksanaan sistem dan manajemen pendidikan berbasis digital di madrasah bukan merupakan tujuan akan tetapi sebagai alat bantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran (Haryanto, 2020). Dalam konsep madrasah digital, manusia menjadi subjek sekaligus objek pengembangan.

Selain itu, terdapat pula tujuan penyelenggaraan madrasah di era digital, di antaranya:

1) Meningkatkan mutu manajemen pendidikan madrasah.
2) Mengefektifkan sumber daya yang dimiliki madrasah, seperti pemanfaatan teknologi dalam manajemen madrasah.
3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pendidikan sehingga partisipasi masyarakan dalam penyelenggaraan dan pengembangan madrasah juga meningkat.
4) Menyediakan laporan berbasis digital sebagai bahan rujukan dalam manajemen madrasah.
5) Meningkatkan literasi digital.
6) Meningkatkan akses peserta didik terhadap informasi dan layanan digital.
7) Meningkatkan aspek kolaboratif di dalam dan luar madrasah (Santosa & Jazuli, 2022).

Dalam konsep madrasah digital juga terdapat komponen-komponen penting yang diselenggarakan dengan cara menerapkan perangkat dan aplikasi digital, yakni:

1) Kompetensi Lulusan
   Lulusan madrasah harus memenuhi tutuntutan penguasaan kompetensi pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan menguasai kompetensi literasi digital sesuai dengan tingkatan

satuan Pendidikan. Setidaknya lulusan madrasah menguasai delapan kompetensi generik sebagai berikut:

a. Kreatifitas
b. Berpikir kritis dan *evaluative*
c. Pemahaman budaya digital
d. Kolaborasi
e. Kemampuan memperoleh dan memilih informasi.
f. Komunikasi efektif
g. Keselamatan digital
h. Keterampilan mengoperasikan perangkat digital (Amreta, 2018).

2) Isi Pembelajaran

Ruang lingkup materi ajar pada pembelajaran digital meliputi : literasi digital dan materi ajar. Pertama, materi literasi digital berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terpadu (infused) kedalam mata pelajaran. Kedua, materi ajar pada madrasah digital mengikuti Standar Isi yang dijabarkan kedalam Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan mata pelajaran namun menyisipkan sikap, pengetahuan dan literasi digital kedalamnya secara terintegrasi sesui dengan tingkatan satuan pendidikan dan kelas. UNESCO menetapkan empat tingkatan materi ajar yang harus disajikan untuk Pendidikan dasar menengah sebagai berikut:

a. Discovering ICT tools

   Materi ajar terkait dengan pengenalan TIK dan fungsinya. Pada tingkat ini kepada peserta didik dikenalkan peralatan TIK dan fungsinya, penggunaan fungsi-fungsi sederhana pada TIK dan pemahaman mengenai keselmatan penggunaanya.

b. Learning how to use ICT tools

   Materi ajar terkait dengan pembiasaan penggunaan TIK sebagai sumber belajar dan menyelesaikan tugas-tugas belajar menggunakan aplikasi tertentu sehingga belajar berlangsung efektif dan efisien.

c. Understanding how and when to use ICT tools

   Materi ajar terkait dengan bagaimana dan kapan TIK digunakan untuk menunjang penyelesaian tugas- tugas dalam belajar. Pada tahap ini peserta didik tidak sekedar dapat menggunakan

TIK tetapi memahami strategi penggunaanya lebih optimal dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks.

d. *Specializing in the use of ICT tools*

Materi terkait dengan pengetahuan dan keterampilan spesifik untuk mengembangkan TIK seperti pemrograman (*programming*) (Sanyal, 2020).

3) Proses Pembelajaran

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pembelajaran merupakan komponen paling utama dalam madrasah digital. Kompomen-komponen selain komponen pembelajaran merupakan komponen pendukung terciptanya pembelajaran yang bermutu (Supardi & Hakim, 2021). Pada pembelajaran digital tersebut diterapkan prisip-prinsip pemelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student center*), pembelajaran karakter, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran personal (*individualized*), pembelajaran terbuka, pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order of Thinking Skill*), pembelajaran yang mengembangkan kompetensi Abad 21 yaitu *critical thinking, creativity, collaboration, communication*, pembelajaran menggunakan sumber belajar beragam, pembelajaran berbasis aktifitas dan pembelajaran multicultural (Hermansah, 2022).

Untuk menunjang efisiensi dan efektifitas mencapai standar mutu pembelajaran dan penerapan prinsip-prinsip tersebut digunakan fungsi TIK. Pendidik harus memadukan unsur TIK dengan pedagogi untuk menciptakan pembelajaran yag bermutu. Dalam sistem tersebut penggunaan TIK dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Penggunaan TIK sebagai sumber informasi

   Pembelajaran menggunakan berbagai sumber informasi.Selain sumber informasi cetak, narasumber dan lingkungan, peserta didik meggunakan sumber informasi berbentuk data digital dalam bentuk web dan data elektronik mulai dari modul digtal, video, audio, buku digital, artikel, jurnal dan perpustakaan digital.

b. Penggunaan TIK sebagai alat bantu dan media belajar

Alat bantu dan media belajar menggunakan teknologi digital yang dibuat dapat dan disajikan menggunakan TIK yang bersifiat kecerdasan buatan seperti *virtual laboratory, virtual observation,* dan *virtual simulation*. Alat-alat digital tersebut digunakan sebagai komplemen atau pelengkap alat-alat pembelajaran manual yang digunakan. Selain alat bantu pembelajaran pendidik dapat menggunakan media interaktif berbentuk aplikasi seperti aplikasi untuk presentasi dan untuk permainan (game).

c. Penggunaan TIK untuk menyajikan hasil belajar
   Bentuk penyajian hasil belajar seperti produk dan projek dapat dilakuan menggunakan aplikasi. Produk belajar dapat dipresentasikan dalam bentuk video, web, blog, vlog sejenisnya.
d. Penggunaan TIK untuk diskusi dan kolaborasi
   Komponen penting dalam pembelajaran terbuka adalah diskusi dan kolaborasi. Kegiatan diskusi berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik mengekslorasi gagasan dan pengetahuan serta membagikannya kepada peserta didik lain. Kolaborasi atau kerjasama dengan dengan peserta didik lain dalam bentuk pembuatan produk atau proyek. Kegiatan diskusi dan kolaborasi dapat menggunakan TIK dalam bentuk media sosial.
e. Penggunaan TIK sebagai pengelola pembelajaran

Pembelajaran di madrasah digital dapat disajikan melalui pendekatan online penuh atau campuran tatap muka dengan online yang disebut blended learning. Untuk melaksanakan dua pendekatan tersebut pendidik menyajikan dan mengelola pembelajaran menggunakan aplikasi yang disebut *LMS (learning management system)* atau *MOOC (massive open online course)* (Kesumawati et al., 2022).

D. Role Model Penyelenggaraan Madrasah Digital; Studi Kasus M.TsN 1 Makassar

1. Sejarah MTsN 1 Kota Makassar sebagai Madrasah Digital Berbasis Riset

Madrasah Digital atau Madrasah Digital Berbasis Riset yang diterapkan di MTsN 1 Makassar resmi dilaunching pada Jumat, 9 Oktober 2020 oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi. Proses launching ditandai dengan handscan oleh Wamenag, Kakanwil Kemenag Sulsel, dan perwakilan dari Bank BNI sebagai mitra

Madrasah Digital MTsN 1 Makassar dalam penggunaan aplikasi eduPatrol, yakni aplikasi yang memanfaatkan teknologi untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dan aktivitas siswa di madrasah yang dioperasikan oleh orang tua atau wali siswa. Dari aspek sejarah, madrasah digital di MTsN 1 Makassar memiliki sejarah yang cukup panjang dalam fase perkembangannya. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kepala Madrasah (Kamad) MTsN 1 Makassar, Zulfikah Nur, S.Pd.I., M.Pd.I, fase perkembangan madrasah digital diuraikan ke dalam bentuk Mind Map di bawah ini.
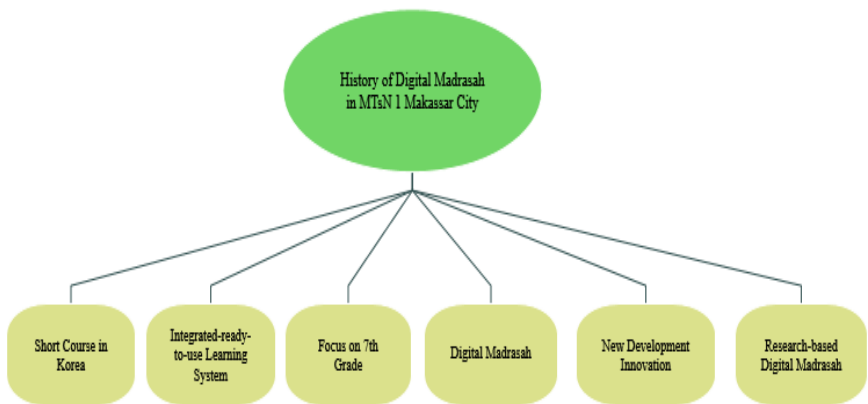
FIGURE 1. Mind Map of Digital Madrasah History in MTsN 1 Makassar City

Berdasarkan Mind Map di atas, terdapat enam fase perkembangan madrasah digital di MTsN 1 Kota Makassar, di antaranya sebagai berikut:

1) Short Course in Korea

Gagasan atau ide tentang pembelajaran dengan integrasi teknologi ke dalam madrasah lahir dari hasil refleksi perjalanan Zulfikah Nur, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Kepala Madrasah MTsN 1 Makassar saat melakukan Short Course di Korea.

> "Awalnya itu kami dikirim Short Course di luar negeri, di Korea sampai di sana kami tertarik dengan sistem pembelajaran SD, SMP dan SMAnya di sana. Kemudian dengan melihat sistem pelajaran di kampusnya sendiri, Seoul National University yang sangat luar biasa

dari segi perbedaan cara mengajar guru dan cara mengajar dosen-dosennya. Itu keren sekali di sana, semuanya berbasis siap saji."

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa inspirasi atau ide utama dari penerapan konsep madrasah digital di MTsN 1 Makassar bersumber dari perjalanan Short Course di Korea. Ketertarikan terhadap model atau sistem pembelajaran pada jenjang SD hingga perguruan tinggi di Korea terintegrasi dengan teknologi sehingga mempengaruhi proses guru dalam mengajar dan siswa dalam menerima pelajaran. Semua materi pembelajaran siap saji atau dalam artian bahwa bahan ajar untuk siswa tersedia secara digital sehingga sangat mempermudah proses pembelajaran dan mempengaruhi hasil belajar.

2) Integrated-ready-to-use Learning System

Ide utama tentang integrasi teknologi dalam dunia pendidikan kemudian berkembang menjadi sistem pembelajaran siap saji terintegrasi dan diterapkan secara berkelanjutan. Hal tersebut langsung diterapkan pada tahun 2020 setelah pulang dari Korea.

"Pada saat itu tahun 2020, saya berada di Gowa langsung saya programkan itu namanya Sistem Pembelajaran Siap Saji Terintegrasi, artinya seluruh pembelajaran itu, bahan ajarnya berbasis digital. Assesmennya juga digital, jadi transparansi dan akuntabel. Tidak ada lagi anak-anak yang pemeriksaannya manual. Semua lewat digital. Jadi setelah kita memberikan assesmen, langsung kelihatan hasilnya. Itu yang saya dapatkan setelah pulang dari sana, formula pembelajaran. Lalu saya siapkan alat multimedia supaya model itu bisa jalan, di kelas itu harus ada televisi android."

Sistem pembelajaran siap saji terintegrasi merupakan kompleksitas sistem pembelajaran berbasis teknologi, mulai dari bahan ajar, proses pembelajaran hingga proses assesmen terintegrasi dan tersedia secara digital. Meskipun dengan memanfaatkan fasilitas seadanya, proses digitalisasi madrasah dilakukan secara bertahap. Hal pertama yang dilakukan adalah menyediakan televisi jenis android di dalam kelas dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

3) Focus on 7th Grade

Setelah pembelajaran siap saji terintegrasi telah tersedia, selanjutnya adalah proses pelaksanaan sistem tersebut. Untuk proses pelaksanaan awal, sistem pembelajaran berbasis teknologi hanya difokuskan pada jenjang kelas tertentu, yakni kelas 7 di madrasah tersebut.

> "Akhirnya kemarin pada saat saya buat itu, pertama kali adalah satu jenjang dulu. Kelas 7 dulu semua, di sana ada sekitar 6 kelas kalau tidak salah, yang saya belikan memang TV Android, kemudian saya koneksikan dengan kabel HDMI dan seluruh siswa kelas 7 itu harus punya tablet, jadi satu klik langsung terkoneksi dengan tabletnya anak-anak."

Dalam upaya mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi di kelas 7, hal yang dilakukan adalah pengadaan televisi android di setiap ruangan kelas 7 dan seluruh siswa harus memiliki tablet, akan tetapi dengan keterbatasan anggaran, pengadaan tablet dibebankan kepada setiap siswa dengan menawarkan beberapa cara, di antaranya kerjasama dengan paguyuban atau lembaga pendidikan yang bersedia. Dan kedepannya diharapkan, terdapat anggaran tetap untuk madrasah dalam pengadaan tablet maupun komputer di setiap ruangan kelas. Penggunaan tablet tersebut telah terkoneksi dengan semua materi pembelajaran di madrasah sehingga siswa hanya mengaplikasikan tablet tersebut untuk mengakses semua materi pembelajaran.

4) Digital Madrasah

Setelah sebelumnya madrasah tersebut hanya menggunakan sistem pembelajaran siap saji dan belum dikategorikan sebagai madrasah digital. Selanjutnya, setelah penggunaan tablet untuk siswa kelas 7 dan evaluasi untuk pengembangan terus dilakukan hingga akhirnya madrasah tersebut masuk dalam kategori madrasah digital.

"Namanya dulu Siap Saji pak, pembelajaran digital berbasis siap saji namun setelah itu, saya bangun berjenjang. Datanglah pejabat, kaget kok bisa ada sekolah kecil yang siswanya hanya 500 an bisa langsung digital semua. Kemudian berkembang lagi, bukan lagi pembelajaran digital berbasis siap saji tapi madrasah digital. Apa itu madrasah digital? adalah layanan digital terpadu, perpustakaan digital,

laboratorium digital, kantin digital, pembelajaran digital. Seluruh menu-menu di madrasah ini layanan berbasis digital. Baru disebut madrasah digital."

Perkembangan MTsN 1 Makassar menjadi madrasah digital ditandai dengan perkembangan dan tata kelola madrasah dengan pemanfaatan teknologi di segala aspek seperti kehadiran layanan digital tepadu seperti pengunaan tablet untuk pembelajaran bagi siswa kelas 7, terdapat perpustakaan digital, laboratorium digital, kantin digital, dan pelayanan berbasis digital.

5) New Development Innovation

Kehadiran sistem pembelajaran digital di madrasah digital MTsN 1 Makassar terlepas dari pada panduan penyelenggaraan madrasah digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 merupakan kolaborasi inovasi dari kepala madrasah dan para pengelola madrasah.

> "Kan ceritanya, ini kan inovasi pak. Ini kan merupakan kreativitas masing-masing lembaga pendidikan. Sebenarnya semua orang menggunakan itu, tapi kan gaya mereka mentransferkan itu berbeda. Kalau saya mau cepat dan tepat. Nah kalau seperti itu, harus menggunakan teknologi. Jadi ada aplikasi yang kami pakai itu, ada Auto play, Microsoft Office, Macro media, Google sites, Crazy, E-Learning. Dan untuk assemennya ada Kahoot, Quizziz, Speech, Google Form."

Inovasi pengembangan madrasah digital di MTsN 1 Makassar merupakan bentuk kreativitas kepala madrasah dan seluruh pengelola madrasah. Selain karena keputusan Kementerian Agama melalui Panduan Pelaksanaan Madrasah Digital pada tahun 2019, pihak MTsN 1 Makassar telah jauh hari merumuskan konsep digitalisasi madrasah dan memanfaatkan perangkat teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan madrasah secara digital. Pada fase ini, pihak MTsN 1 Makassar memanfaatkan beberapa aplikasi teknologi yang dinilai dapat mendukung proses pembelajaran dengan sistem berbasis digital.

6) Research-based Digital Madrasah

Selain konsep madrasah digital yang diterapkan di MTsN 1 Makassar, juga dikembangkan model madrasah digital yang terintegrasi dengan ruang lingkup riset. Inovasi berkelanjutan tersebut lahir bukan tanpa sebab, melainkan karena pemahaman akan pentingnya sinkronisasi dunia digital dengan dunia riset dalam melahirkan lulusan madrasah yang berdaya saing global.

> "Kenapa madrasah digital berbasis riset di sini, karena di sini kan madrasah unggulan akademik Pak dan punya kelas sains, kelas riset di sini ada. Kita kombinasikan. Perjanjian ada dua kelas untuk kelas sains dan riset. Itulah yang dipersiapkan untuk ikut lomba olimpiade dan penelitian."

Dari aspek sejarah, MTsN 1 Kota Makassar merupakan jenis madrasah permodelan di Kota Makassar yang berganti nama pada tahun 2015. Sebagai madrasah permodelan tentunya unggul dalam segi akademik sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan menyematkan riset dalam konsep madrasah digital. Selain itu, MTsN 1 Kota Makassar juga memiliki kelas khusus untuk riset dan pembelajaran sains. Model pengembangan inilah yang menjadi laboratorium khusus dalam mengasah kemampuan para siswa untuk terlibat aktif dalam setiap perlombaan baik skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan enam fase perkembangan madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sejak awal formulasi konsep digitalisasi madrasah, tanggung jawab penuh dalam pengembangan adalah terletak pada manajemen pengelolaan kepala madrasah sehingga mampu mewujudkan sebuah model madrasah digital berbasis riset dengan fasilitas dan anggaran yang kurang memadai. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan sebuah hambatan dalam proses pengembangan madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar.

2. Strategi Pembelajaran berbasis Teknologi

Selanjutnya, dalam hal proses pembelajaran, berdasarkan data hasil wawancara di lapangan, terdapat beberapa strategi yang diterapkan madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar dalam hal pembelajaran berbasis teknologi sebagaimana diuraikan dalam Project Map, sebagai berikut:
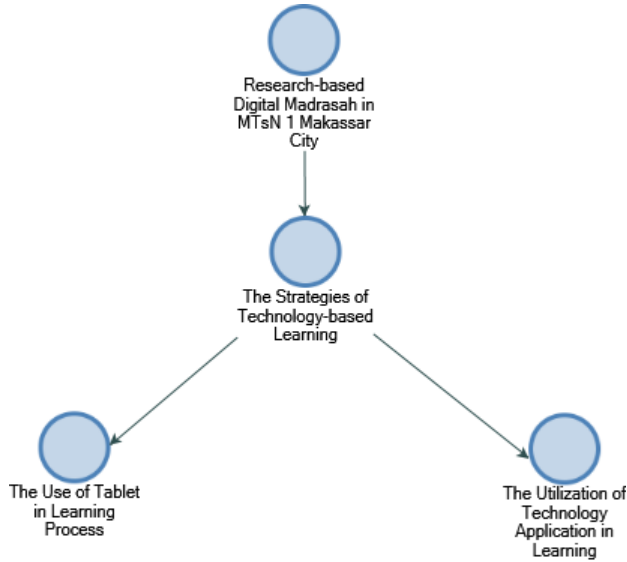
FIGURE 2. Project Map of The Strategies of Technology-based Learning

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan software NVivo dengan Project Map tool, ditemukan dua strategi pembelajaran berbasis teknologi di madrasah digital berbasis riset, MTsN 1 Kota Makassar dan selanjutnya dapat disimak melalui Result of Matrix Coding Query di bawah ini:
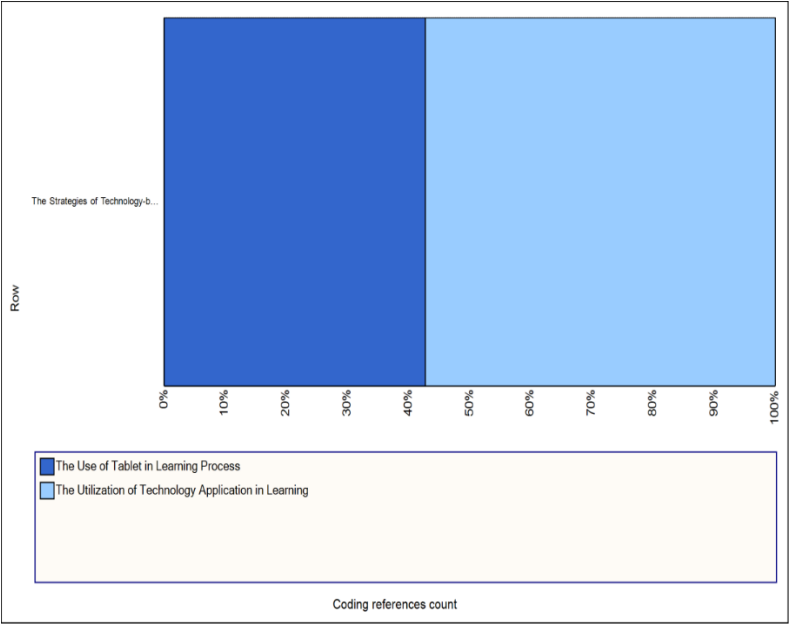
FIGURE 3. Matrix Coding Query of The Strategies of Technology-based Learning

Berdasarkan visualisasi data di atas dengan menggunakan Matrix Coding Query, maka dapat dikatakan bahwa dalam hitungan persen, data hasil wawancara yang merujuk pada bentuk strategi pembelajaran berbasis teknologi dalam hal The Use of Tablet in Learning Process adalah 42,86%. Sementara itu, The Utilization of Technology Application in Learning adalah 57,14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis penggunaan aplikasi teknologi di madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar lebih populer dan dominan digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Lebih lanjut, analisis tentang strategi pembelajaran berbasis teknologi di madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar secara komprehensif diuraikan sebagai berikut:

1) The Use of Tablet in Learning Process

Penggunaan tablet dalam proses pembelajaran pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar merupakan salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan. Di MTsN 1 Makassar, sistem

pembelajaran berbasis digital dilakukan secara penuh dan khusus untuk kelas 7 sebagai tahap awal dalam proses integrasi teknologi digital dalam sistem pembelajaran dan mengenai proses pembelajaran dengan pemanfaatan tablet diuraikan oleh Abd. Rahman, S.Pd selaku guru Bahasa Arab:

> "Proses pembelajaran dimulai dan setiap siswa membuka tablet yang sudah disetting dari awal hanya dikhususkan untuk pembelajaran di kelas, jadi isinya itu tablet hanya materi pembelajaran."

Dalam mendukung proses pembelajaran di dalam ruang kelas, para siswa kelas 7 menggunakan tablet yang telah diatur khusus untuk proses pembelajaran. Tablet tersebut hanya berisi materi pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mengakses aplikasi lain yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Lebih lanjut, Asykin, S.Ag yang juga merupakan guru Bahasa Arab di kelas 7 mengutarakan bahwa:

> "Jadi pembelajaran itu ditransferkan ke masing-masing tablet siswa. Jadi begitu masuk di kelas diberikan materi pembelajaran dan dikerjakan, guru bisa mengetahui pemahaman awal para siswa sehingga memberikan penjelasan tambahan. Masing-masing siswa punya tablet dan tidak disediakan oleh madrasah karena belum mampu dari segi anggaran. Itu kebijakan dan kerjasama antara madrasah dan orang tua siswa. Pembelajaran digitalnya masih terbatas hanya untuk kelas 7."

Sebagai upaya dalam mencapai indikator keberhasilan melalui penggunaan tablet dalam proses pembelajaran, maka beberapa langkah-langkah dan mekanisme strategis juga diterapkan seperti melakukan transformasi materi atau bahan ajar ke dalam tablet masing-masing siswa, memberikan pemahaman dalam hal penggunaan tablet sebagai medium pembelajaran, memberikan pelatihan dan simulasi penggunaan tablet kepada setiap siswa, hingga memberikan penilaian terhadap pemahaman awal siswa terkait materi atau soal-soal yang telah diberikan dan dikerjakan oleh siswa sebagai bentuk evaluasi pemahaman awal yang selanjutnya akan diberikan pembahasan mendalam berdasarkan hasil penilaian. Zulfikah Nur, S.Pd.I., M.Pd.I

selaku kepala madrasah MTsN 1 Kota Makassar juga mengutarakan bahwa:

> "Kelas 7 dulu semua, di sana ada sekitar 6 kelas kalau tidak salah, yang saya belikan memang TV Android, kemudian saya koneksikan dengan kabel HDMI dan seluruh siswa kelas 7 itu harus punya tablet, jadi satu klik langsung terkoneksi dengan tabletnya anak-anak. Jadi materi itu disajikan lebih awal karena prinsip kami adalah sebenarnya mengajar itu, anak-anak gampang sekali kalau membutuhkan referensi tinggal klik saja di Google dan akan kelihatan semua kalau dari segi konseptualnya tapi kalau dari segi pengalamannya, itu yang susah makanya pengalaman itu harus disajikan dalam bentuk video tayangan kemudian seluruh materi-materi pembelajaran harus terintegrasi ada harus Al-Quran dan Hadis yang menopang apapun materinya, jadi guru harus punya ensiklopedia. Ketika misalnya menjelaskan tentang jual beli, Qur'an surah berapa yang menjelaskan tentang jual beli, hadis apa yang mengajarkan tentang jual beli karena kita madrasah kalau pendidikan umum tidak ada masalah tapi kalau kita madrasah harus terintegrasikan dengan basisnya."

Berdasarkan uraian analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan tablet dalam proses pembelajaran di madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar dapat mempermudah proses pembelajaran dan mempengaruhi hasil belajar siswa, serta terbilang efisien dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat melalui langkah-langkah taktis yang dilakukan di ruang kelas, mulai dari pemberian materi awal sebelum proses pembelajaran berlangsung hingga penilaian terhadap pemahaman siswa dalam menggunakan tablet sebagai medium pembelajaran. Selanjutnya, guru akan memberikan penjelasan tambahan terkait penilaian awal sesuai yang dimonitoring langsung dari tablet siswa sehingga siswa yang memiliki kesulitan dalam hal pembelajaran dapat diketahui oleh guru dan diberikan pembinaan intensif.

2) The Utilization of Technology Application in Learning

Strategi kedua yang diterapkan dalam proses pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar adalah The Utilization of Technology Application in Learning, dalam hal ini selain penggunaan tablet dalam proses pembelajaran, juga terdapat beberapa aplikasi teknologi yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran berbasis digital, seperti yang diungkapkan oleh Abd. Rahman, S.Pd.I bahwa:

> “Seperti biasa, cuman kan kalau digital, perangkat-perangkat itu mereka harus persiapkan. Pertama masuk kelas harus mengabsen melalui Scan Barcode.”

Selain penggunaan tablet, pihak pengelola madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar juga menggunakan aplikasi teknologi dalam mendukung ekosistem digital di madrasah tersebut seperti mengubah sistem absensi menjadi Scan Barcode sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh siswa saat memasuki ruangan kelas. Selain itu, dalam hal pelayanan bimbingan konseling, juga diterapkan layanan digital bimbingan konseling untuk seluruh siswa kelas 7 seperti virtual konseling, ruang konseling formal, outdoor konseling, dan spiritual religius konseling. Selanjutnya, juga terdapat aplikasi yang dimanfaatkan oleh pihak pengelola dan guru di madrasah tersebut seperti materi pembelajaran khususnya pembelajaran Bahasa Arab.

> “Selain itu kami juga memiliki aplikasi khusus untuk pembelajaran bahasa arab yang di dalamnya terdapat RPP, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi dan video pembelajaran.”

Aplikasi khusus berbasis Android dalam mendukung pembelajaran Bahasa Arab dirancang oleh pihak madrasah dan berisi beberapa komponen inti, seperti kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi terintegrasi, video pembelajaran, materi pembelajaran, ice breaking, latihan/kuis, dan LKPD. Untuk tampilan aplikasinya, ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

FIGURE 4. (a) The Main Appearance, (b) The Homepage Appearance, (c) and (d) The Menu Appearance of Application

Selanjutnya, dalam hal pembelajaran khusus tentang Bahasa Arab juga terdapat aplikasi teknologi yang digunakan dan juga merupakan program kerjasama dengan Kementerian Agama.

> "Ow kalau misalnya dalam bahasa arab, ada aplikasi yang terintegrasi dengan Kemenag, namanya itu Alefed yang diprogramkan oleh Kemenag untuk mata pelajaran Bahasa Arab. Di dalam aplikasi itu, sudah ada materinya di dalam. Jadi modelnya itu, kita buat kelas di dalam aplikasi tersebut, tersebut siswa dapat mengakses pembelajaran yang berkaitan dengan materi pelajaran di dalam tabletnya. Aplikasi ini mirip seperti Lentera kalau di perguruan tinggi dan Google Classroom dan diaplikasikan khusus pengembangan bahasa arab di madrasah."

Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran digital pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar khusus dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah Alef atau Alefed, yakni aplikasi pembelajaran digital berbasis Artificial Intelligence (AI). Aplikasi ini telah hadir di Indonesia melalui keputusan kerjasama antara Alef Education dan Kementerian Agama pada November 2021 sebagai upaya untuk mewujudkan industri pendidikan global. Sejauh ini, aplikasi Alef telah terintegrasi dengan kurikulum pembelajaran di Indonesia untuk mendukung prestasi siswa. Berikut ini tampilan aplikasi Alef dalam pembelajaran Bahasa Arab dan terintegrasi dengan madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar:

(a)	(b)
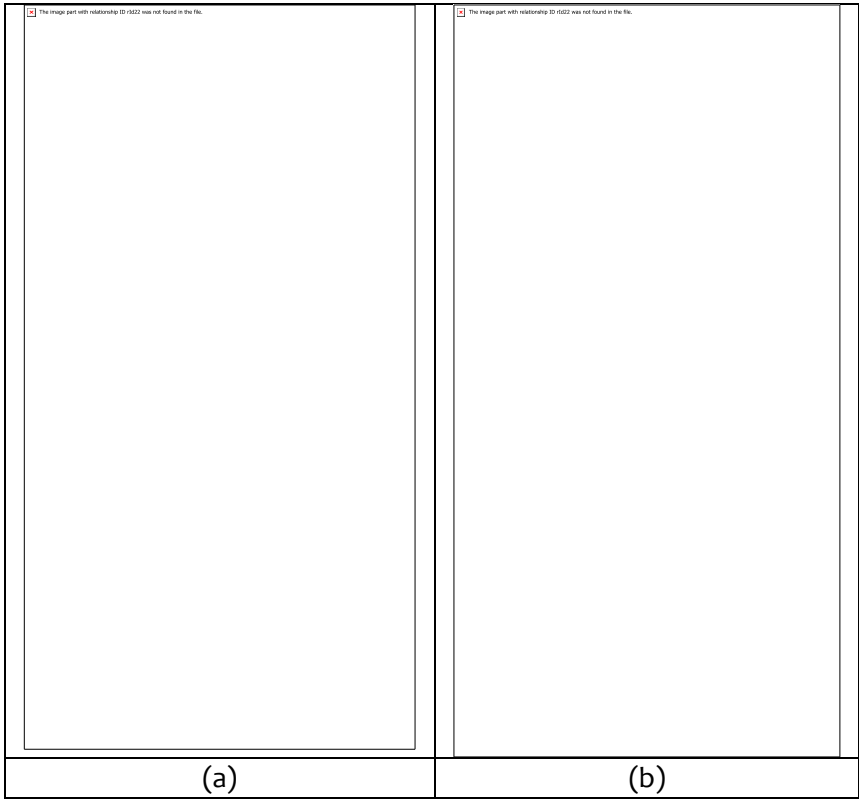
FIGURE 5. Tampilan Aplikasi Alef dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 1 Kota Makassar

Sementara itu, terdapat pula beberapa aplikasi lainnya yang digunakan di madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar baik untuk kebutuhan pembelajaran maupun assesmen. Hal tersebut diutarakan oleh Zulfikah Nur, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Kepala Madrasah MTsN 1 Makassar bahwa:

> "Sebenarnya semua orang menggunakan itu, tapi kan gaya mereka mentransferkan itu berbeda. Kalau saya mau cepat dan tepat. Nah kalau seperti itu, harus menggunakan teknologi. Jadi ada aplikasi yang kami pakai itu, ada Auto play, Microsoft Office, Macro media, Google sites, Crazy, E-Learning. Dan untuk assemennya ada Kahoot, Quizziz, Speech, Google Form."

Komitmen pengelola madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar dalam mengembangkan pembelajaran dan pengelolaan

madrasah berbasis digital terlihat dari upaya berkelanjutan dalam memanfaatkan aplikasi teknologi. Aplikasi seperti Autoplay hingga perangkat E-Learning lainnya terus dimaksimalkan penggunaannya dalam sistem pembelajaran, begitupula dengan penggunaan aplikasi dalam melakukan penilaian atau assesmen keberhasilan pembelajaran seperti Kahoot hingga Google Form.

Berdasarkan uraian analisis data tentang strategi pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar, maka dapat dikatakan bahwa dalam mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar, terdapat dua strategi utama yang diterapkan yakni The Use of Tablet in Learning Process and The Utilization of Technology Application in Learning. Kedua strategi tersebut membawa dampak positif dalam manajemen pengelolaan madrasah digital berbasis riset dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital sehingga mampu memberikan perubahan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, dampak positif lainnya adalah siswa kelas 7 di MTsN 1 Makassar mampu beradaptasi dengan konteks perkembangan zaman melalui sistem pembelajaran berbasis teknologi, belajar sesuai keinginan dan kontekstual, serta menikmati pembelajaran yang tidak kaku dan lebih kepada fun learning berbasis digital.

Selain itu, terdapat pula manfaat tersendiri dari penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar sejauh ini. Hal tersebut diutarakan oleh Asykin, S.Ag selaku guru Bahasa Arab bahwa: "Dari sisi kecepatan dalam menangkap pembelajaran, itu berhasil."

Salah satu manfaat dari implementasi sistem pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Makassar adalah kemudahan dalam memahami pembelajaran di kalangan siswa. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keinginan dan minat siswa dewasa ini yang terbiasa dan nyaman dalam mengaplikasikan perangkat teknologi sehingga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, manfaat lainnya juga diutarakan oleh Zulfikah Nur, S.Pd.I,. M.Pd.I selaku kepala madrasah MTsN 1 Kota Makassar bahwa:

> "Anak-anak gampang sekali kalau membutuhkan referensi tinggal klik saja di Google dan akan kelihatan semua kalau dari segi

konseptualnya tapi kalau dari segi pengalamannya, itu yang susah makanya pengalaman itu harus disajikan dalam bentuk video tayangan kemudian seluruh materi-materi pembelajaran harus terintegrasi ada harus Al-Quran dan Hadis yang menopang apapun materinya, jadi guru harus punya ensiklopedia."

Selain siswa mudah memahami muatan pembelajaran, juga siswa dapat belajar sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi berbasis digital dalam mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manfaat dari pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar dapat dilihat dari dua aspek yakni kemudahan dalam memahami pembelajaran dan model pembelajaran yang bersentuhan langsung dengan kenyataan.

3. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi: Hambatan dan Solusi

Dalam proses pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi pada madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar, tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penghambat tersendiri. Berdasarkan hasil analisis data wawancara di lapangan, faktor-faktor yang menjadi penghambat pengembangan pembelajaran berbasis teknologi di MTsN 1 Kota Makassar digambarkan melalui Matrix Coding di bawah ini:
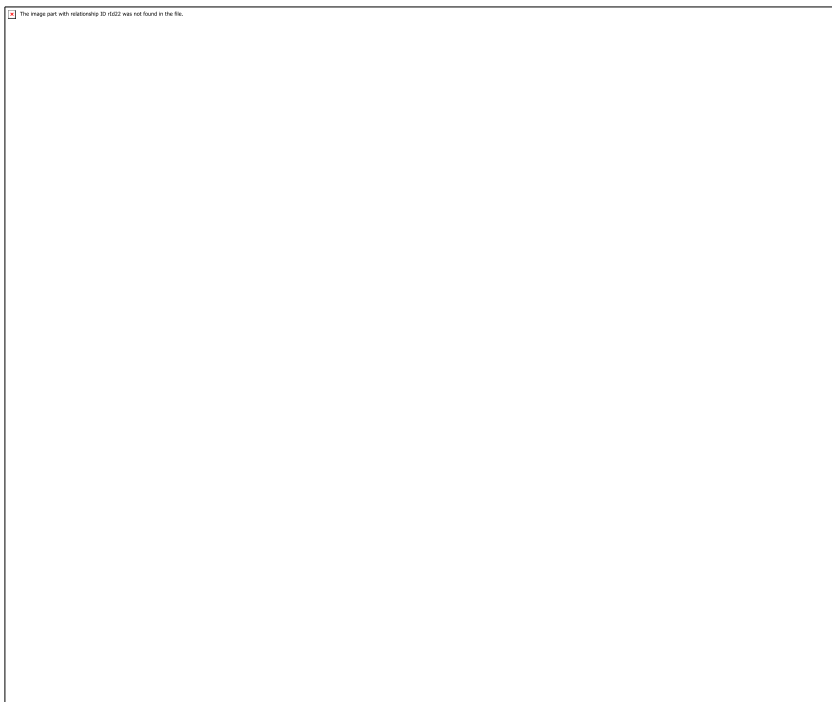
FIGURE 6. The Obstacles in Developing Technology-based Learning

Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat pengembangan pembelajaran berbasis teknologi di MTsN 1 Kota Makassar, yakni Operational Estimate and Digital Literacy. Hal tersebut diungkapkan oleh Asykin, S.Ag bahwa:

"Masing-masing siswa punya tablet dan tidak disediakan oleh madrasah karena belum mampu dari segi anggaran."

Kendala anggaran dalam pengembangan madrasah merupakan penghambat utama dan umumnya berlaku juga hampir di setiap lembaga pendidikan. Di MTsN 1 Kota Makassar, kendala pengadaan tablet untuk para siswa belum mampu diwujudkan oleh pihak madrasah sehingga hal yang dilakukan dalam mensiasati hal tersebut adalah membangun jalinan kerjasama antara orang tua dengan paguyuban atau lembaga pemerintahan lainnya yang bersedia membantu dalam pengadaan tablet pembelajaran. Akan tetapi, sejauh ini dalam hal pembelajaran dengan menggunakan tablet, semua orang tua siswa mendukung secara penuh inovasi pembelajaran yang

diterapkan oleh pihak MTsN 1 Kota Makassar. Selain itu, faktor lainnya adalah Digital Literacy. Hal tersebut diungkapkan oleh Zulfikah Nur, S.Pd.I,. M.Pd.i bahwa kendala melek teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghambat lainnya dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi di MTsN 1 Kota Makassar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa kelas 7 melainkan juga para guru. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal tersebut, pihak MTsN 1 Kota Makassar menerapkan program rutin tentang pelatihan penggunaan teknologi pembelajaran.

Lebih lanjut, dalam mengatasi kendala khususnya persoalan anggaran adalah dengan memanfaatkan kreativitas para pengelola madrasah. Zulfikah Nur, S.Pd.I,. M.Pd.i mengutarakan bahwa:

> "Tapi kan kalau sarana kita manfaatkan kreatifitas saja. Ternyata dana BOS itu bisa dipakai untuk pengembangan digital. Maksudnya ternyata dengan mengggunakan dana BOS, bisa juga digital, buktinya kami di sini. Itu kan mengedukasi madrasah seluruh Indonesia bahwa tanpa ada dana pemerintah, tetap bisa digital. Caranya dengan mengubah dari anggaran operasional seperti beli ATK, kertas, dan tinta, ini kan tidak ada lagi pak. Itulah dananya yang dialihkan ke perlengkapan digital."

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa solusi dalam mengatasi setiap hambatan dalam pengembangan sistem pembelajaran dan pengelolaan madrasah berbasis teknologi khususnya dalam hal kekurangan anggaran adalah dengan melakukan restrukturisasi alokasi anggaran dana BOS ke dalam kebutuhan berbasis digital. Hal tersebut terbukti berhasil dilakukan di MTsN 1 Kota Makassar sehingga proses pengembangan pendidikannya terus mengalami peningkatan dan berjalan tanpa menjadikan kekurangan anggaran sebagai alasan utama yang menghambat proses pengembangan.

Pada akhirnya, madrasah digital berbasis riset di MTsN 1 Kota Makassar merupakan sebuah inovasi madrasah dalam menghadapi konteks perkembangan zaman sehingga lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah dapat koeksistensi di era digital dan melahirkan generasi muda islami dan qurani yang bermutu sesuai tuntutan zaman. Dalam upaya memaksimalkan proses digitalisasi madrasah, pihak MTsN

1 Kota Makassar menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia teknologi.

BAB VI
PENUTUP

Madrasah sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia, mau tak mau harus mengikuti perkembangan pendidikan dewasa ini. Adopsi manajemen pendidikan berbasis sekolah menjadi manajemen berbasis madrasah merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Namun keniscayaan itu tampaknya menjadi persoalan krusial bagi madrasah. Berbeda dari lembaga pendidikan umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, keberadaan madrasah secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, meski madrasah memiliki karakteristik dan struktur seperti sekolah umum.

Dalam perkembangannya, madrasah yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, secara perlahan-lahan telah berhasil mendapat perhatian dari masyarakat. Apresiasi ini menjadi modal besar bagi madrasah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dalam konteks kekinian, sekarang ini banyak sekali madrasah-madrasah yang menawarkan konsep pendidikan modern. Konsep ini tidak hanya menawarkan dan memberikan pelajaran atau pendidikan agama. Akan tetapi mengadaptasi mata pelajaran umum yang diterapkan di berbagai sekolah umum. Kemajuan madrasah tidak hanya terletak pada SDM-nya saja, namun juga desain kurikulum yang lebih canggih, dan sistem manajerial yang modern. Selain itu, perkembangan kemajuan madrasah juga didukung dengan sarana infrastruktur dan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan KBM di madrasah.

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL 'ULAMA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR PUSTAKA

al-Abrasyi, Moh. Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam,* Bulan Bintang.

al-Yasu'I*, Abu* Luwis, *al-Munjid Fi al-LughahWa al-Munjid Fi al-A'lam,* Cet.-23, Dar al-Masyriq, Beirut, tt.

Ali Muhammad, Syalabi, *Tarikh al-Ta'lim fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah,* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987); Stanford J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); dan BadriYatim, *Sejarah SosialKeagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925,* Jakarta: Logos, 1999.

Anggani, Sudono, M.A., Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Berpartisipasi Meningkatkan Pendidikan Anak Bangsa, dalam Membangun Masyarakat Pendidikan, Bahan Bacaan Inservice Training BP-3 MI & MTs, INSEP bekerjasama dengan BEP Depag Jakarta, 2001.

Arifin, M, *Kapita Selekta Pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta, 1991,

Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta:Logos, 1999.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.

------------, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru,* Logo Macana Ilmu, Jakarta. 1999.

Bloom, B.5. *Taxomony of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals*, Hand Book I: Cogniti Domain. New York: Long mans, Green and Co.

Darmuin, Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah terhadap Pesantren dan Madrasah. Dalam Chabib Thoha dan

Abdul Muth'i. PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sarna dengan Fakultas Tarbiyah lAIN Walisongo Semarang. 1998.

Depag RI dan PPIM, *Menteri-menteri Agama RI, Biografi Sosial Politik*, Jakarta, INIS, PPIM dan Balitbang Depag, 1998.

Dewantoro, Hajar., "*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*", dalam : Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ [Penyunting], *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Aditiya Media, Yogyakarta. 1997.

Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES. 1982.

--------------. *K.H. Hasyim Asy'ari, Penggalang Islam Tradisional*, Jakarta: Prisma, 1984.

Dradjat, Z. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia,* Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Ensiklopedi Islam – 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Fadjar, A. Malik, *Reformasi Pendidikan Islam,* Jakarta: Fajar Dunia, 1999.

-------------. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam,* Jakarta: LP3NI, 1998.

-------------. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1998.

Ghulam Farid Malik, *Pedoman Manajemen Madrasah, Basis Education Project (BEP)* Depag RI kerjasaman dengan FKBA, Yogyakarta, 2000.

H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* Jakarta: LP3ES, 1985.

Hassan, S. (2009). *Integrating ICT in Teaching and Learning: Country Report Malaysia.* Kuala Lumpur: Minsitry of Education Malaysia.

Hermawan, H. D., Yunita, D. N., & Deswila, N. (2018). Implementation Of ICT in Education in Indonesia During 2004-2017. *2018 International Symposium on Educational Technology* (pp. 108-112). Hongkong: IEEE.

Ibrahim Musa, DR, M.A., Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Penelitian Kelembagaan Universitas Terbuka, Jakarta, 2000.

Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. UNESCO. (2018). *Unesco ICT Competency Framework for Teacher.* Paris: Unesco

Jalaluddin dan Said, U. (1996). Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan. Jakarta: Grafindo Persada.

Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia,* Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

--------, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, LP3M, Jakarta, 1984.

Kemdikbud. (2016). Standar Isi. *Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tnetang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud.

Kemdikbud, Standar Isi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud, 2018.

Kemdiknas, Standar Sarana dan Prasarana. *Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dsar dan Mnengah*. Kemdiknas, 2007.

Kristanto, A. *Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Gava Media Limantara, N dan Jingga, F. 2014. Perancangan Model Learning Management System untuk Madrasah. *ComTech. Vol. 5 No. 1, h.l 203-212,* 2003.

Martin, Florence. 2014. "Use of Synchronous Virtual Classrooms: Why, Who, and How?" *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 10 No. 2: 192-209*

Maarif, A.Syafii, "*Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah",* makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta, 1996.

Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* Jakarta: Parama-dina, 1997.

Makdisi, George "*Madrasah And The University In the Middle Ages*", Studia Islamica 32 (1970): 257-262.

Maksum, *Madrasah:Sejarah dan Perkembangannya* Jakarta: Logos, 1999.

Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Jakarta, CV. Amisco, 1996.

Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia Surabaya: Risalah Gusti: 1996.

Nashir, H. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Panduan Modeling Madrasah Digital Seamolec (Online) Saimroh, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kelas *Computer Based,* 2018.

Raharjo, *Madrasah Sebagai The Centre Of Excellence*, download tanggal 24 Desember 2022.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual,* Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka,

Riyadi, Ahmad Ali. *Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-ruz, 2006.

Rosyada, Dede*, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Kencana Groups, 1997.

Sarijo, M., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. Jakarta: Dharma Bakti, 1980.

Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah dan Sekolah; *Pendidikan Islam dalam Kurun Modern Jakarta*: LP3ES, 1986.

Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, Cet. Kedua, Jakarta: LP3ES, 1994.

Sternbrink. K.A. (1986). Pesantren, Madrasah dan Sekolah. Jakarta: LP3ES.

Sudiro, M. Irsyad., *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal, 30 Agustus – 1 September 1995.

Suparlan, Parsudi (peny.), *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama* Jakarta: Balitbang Depag RI, 1981/1982.

Suparta, Mundzir. dan Amin Haedari, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.

Suroyo, *Perbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsepo Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volem 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta, , 1991.

Syafii Maarif, Ahmad. "*Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa,* dalam: Muslih Usa [Penyun.], *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi,* Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta, 1997.

Test (Studi MAN 1 Kota Bekasi). *Jurnal Penamas, Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018*
Saimroh, dkk. 2018. TIK Dalam Pembelajaran: Peluang dan Tantangan. *Policy Brief.*

Thoha, Chabib, dan Muth'i, A. PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Fak. Tarbiyah lAIN Walisongo Sernarang, 1998.

Tibawi, A.L "*Origin and Character of Al-Madrasah*", Bulletin of The School of Oriental and African Studies 25 (1962

Tim Depag, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, 2IJKL. MNO, 1993.

Zamakhsyari Dhofier, K.H. Hasyim Asy'ari, Penggalang Islam Tradisional, Prisma 1, Januari 1984.

Referensi online:

R. Ariani and F. Festiyed, "Analisis landasan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan dalam pengembangan multimedia interaktif," *J. Penelit. Pembelajaran Fis.*, 2019, [Online]. Available: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jppf/article/view/107439.

T. Al Aslamiyah, P. Setyosari, and ..., "Blended learning dan kemandirian belajar mahasiswa teknologi pendidikan," *… Teknol. Pendidik.*, 2019, [Online]. Available: http://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/article/view/7862.

Y. M. Jamun, "Dampak teknologi terhadap pendidikan," *J. Pendidik. dan Kebud. Missio*, 2018, [Online]. Available: http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/54.

U. H. Salsabila, P. F. Fitrah, and ..., "Eksistensi teknologi pendidikan dalam kemajuan pendidikan islam abad 21," *J. EDUSCIENCE …*, 2020, [Online]. Available: https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/eduscience/article/view/1913.

V. R. Mokalu, J. K. Panjaitan, N. I. Boiliu, and ..., "Hubungan Teori Belajar dengan Teknologi Pendidikan," *… J. Ilmu Pendidik.*, 2022, [Online]. Available: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/8961.

M. D. Solviana, "Pemanfaatan Teknologi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Penggunaan Gamifikasi Daring di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung," *Al Jahiz J. Biol. Educ. …*, 2020, [Online]. Available: https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Al-Jahiz/article/view/2082.

N. N. Fadilah, P. Setyosari, and ..., "Motivasi Belajar Mahasiswa Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Online," *… Teknol. Pendidik.*, 2021, [Online]. Available: http://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/article/view/15636.

A. Hilir and S. Kom, *PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Peranan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran*. books.google.com, 2021.

M. G. Efgivia, "Pemanfaatan Big Data dalam Penelitian Teknologi Pendidikan," *Educ. J. Teknol. Pendidik.*, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/EDUCATE/article/view/3381.

S. Salim, K. Anwar, and A. T. Kuncoro, "Pemanfaatan Teknologi Pendidikan untuk Mendukung Layanan Pendidikan Daring," *Pros. Semin. Nas. …*, 2020, [Online]. Available:

https://ocs.machung.ac.id/index.php/senam/article/view/39.
R. R. Widyasari, "Reposisi Dan Reaktualisasi Pendidikan Madrasah Dalam Memperkuat Eksistensi Pendidikan Di Era 4.0," *Edukasia J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 1, no. 1, pp. 55–65, 2020.
H. Borker, "Journeys of Madrasa Students," *Madrasas and the Making of Islamic Womanhood*. Oxford University Press, pp. 58–85, 2018, doi: 10.1093/oso/9780199484225.003.0003.
R. Lukens-Bull, "Pesantren, Madrasa and the Future of Islamic Education in Indonesia," *Kawalu: Journal of Local Culture*, vol. 6, no. 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, p. 29, 2019, doi: 10.32678/kawalu.v6i1.2044.
Diskominfo, "Madrasah Digital MAN 1 Jepara Resmi Diluncurkan," *jepara.go.id*, 2022. https://jepara.go.id/2022/06/09/madrasah-digital-man-1-jepara-resmi-diluncurkan/.
L. M. Anwar, A. W. Jufri, and L. Muhaimi, "Application of Madrasah Based Management in Improving the Quality of Aliyah Madrasah Education," *Int. J. Multicult. Multireligious Underst.*, vol. 6, no. 5, p. 257, 2019, doi: 10.18415/ijmmu.v6i5.1086.
R. Firdaus, "Sulsel Pioner Madrasah Digital di Indonesia," *sulsel.kemenag.go.id*, 2021. https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/sulsel-pioner-madrasah-digital-di-indonesia-4IriC.
Kim, "MTsN 1 Kota Makassar Menjadi Madrasah Digital Berbasis Riset," *regionalsulawesi.id*, 2022. https://regionalsulawesi.id/mtsn-1-kota-makassar-menjadi-madrasah-digital-berbasis-riset/.
Y. Bilgin, "Qualitative Method Versus Quantitative Method in Marketing Research: An Application Example at Oba Restaurant," *Qualitative versus Quantitative Research*. InTech, 2017, doi: 10.5772/67848.
K. Löhr, M. Weinhardt, and S. Sieber, "The 'World Café' as a Participatory Method for Collecting Qualitative Data," *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 19. SAGE Publications, p. 2147483647, 2020, doi: 10.1177/1609406920916976.
N. Burton, T. Culham, and M. C. Vu, "Spiritual Practice and Management Education Pedagogy: Exploring the Philosophical Foundations of Three Spiritual Traditions," *J. Manag. Educ.*, vol. 45, no. 2, pp. 206–242, 2021, doi: 10.1177/1052562920945739.
M. K. Alam, "A systematic qualitative case study: questions, data

collection, NVivo analysis and saturation," *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, vol. 16, no. 1. Emerald, pp. 1–31, 2020, doi: 10.1108/qrom-09-2019-1825.

D. Mortelmans, "Analyzing Qualitative Data Using NVivo," *The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research*. Springer International Publishing, pp. 435–450, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-16065-4_25.

P. Adu, "Using NVivo 12 to analyze qualitative data," *A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding*. Routledge, pp. 221–277, 2019, doi: 10.4324/9781351044516-11.

K. Karpin and A. Mahmudatussa'adah, "Student Response - Based Learning: A Strategy for Improving Student Participation in Learning," *Innovation of Vocational Technology Education*, vol. 16, no. 1. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), pp. 42–52, 2020, doi: 10.17509/invotec.v16i1.23512.

P. Suwasono, A. Suyudi, N. A. Pramono, and E. Saniso, "The use of blended learning as an attempt to improve students' higher order thinking skills," *AIP Conf. Proc.*, vol. 2330, no. March, 2021, doi: 10.1063/5.0043872.

H. H. B. Dalimunthe, A. Sutisna, L. Zakiah, and S. Handayani, "Transformative science education: Empowering self-regulated learners during pandemic COVID-19," *AIP Conf. Proc.*, vol. 2331, no. April, 2021, doi: 10.1063/5.0041666.

BIOGRAFI PENULIS

Hasyim Haddade, lahir pada tanggal 5 bulan 5 tahun 1975, pada jam 5 dini hari dan anak ke 5 dari 7 bersaudara, di Coppeng-Coppeng, Desa Barae (Sekarang: Desa Soga) Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng. Di kampung inilah pertama kalinya menginjakkan kaki di lembaga pendidikan formal tingkat dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) DDI Coppeng-Coppeng (tamat, 1987). Beranjak usia remaja, penulis melanjutkan studinya di Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Pondok Pesantren Yasrib Soppeng di bawah asuhan kepemimpinan 'Anregurutta' K.H. Basri Daud Ismail (almarhum). Di pesantren inilah mengenal lebih jauh ilmu Bahasa Arab dan mulai belajar membaca 'kitab 'kuning' serta buku-buku literature keislaman lainnya (tamat, 1990).

Setelah itu, penulis melanjutkan studinya di Madrasah Aliyah DDI Cab. Pattojo. Selama tiga tahun di madrasah ini di bawah kepemimpinan 'Anregurutta' K.H. M. Arsyad Lannu, (Ustaz Masse), penulis menghabiskan waktunya untuk memperdalam disiplin ilmu-ilmu agama dan Bahasa Arab hingga tamat pada tahun 1993.

Dengan *basic* pengetahuan agama dan bahasa Arab yang diperolehnya selama kurang lebih 10 tahun belajar di madrasah, memasuki dunia perguruan tinggi, pilihan satu-satunya penulis adalah IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dengan melalui proses SPMB yang cukup ketat, *Alhamdulillah* berhasil lulus pada tahun 1993 dan menyelesaikan studinya dalam waktu 4 setengah tahun tepatnya pada Wisuda sarjana periode November tahun 1997 dengan judul skripsi: *Al-Huruf wa Aqsamuhaa fi Surah al-Qiyamah.* (Klasifikasi *al-Huruf* dalam Surah al-Qiyamah). Lima bulan setelah menyandang gelar sarjana (S.Ag.), penulis kemudian mengikuti

program Prapasca selama 2 bulan sebagai persiapan untuk memasuki Program Pascasarjana (S.2). Dengan bekal itulah, penulis berhasil lulus seleksi ujian masuk Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar tahun 1998, meskipun dengan biaya mandiri. Oleh karena di PPs IAIN Alauddin pada tahun 1998 belum dibuka program studi Bahasa Arab, dan diharuskan memilih 2 konsentrasi, maka *penulis* memilih Konsentrasi; Tafsir-Pendidikan dan sempat menyelesaikan studinya dalam waktu 1 tahun 11 bulan, tepatnya pada Wisuda Periode Oktober tahun 2000, dengan judul tesis; *Tujuan Pendidikan Qur'ani*; Sebuah Kajian Tafsir Tematik).

Pada tahun 2001, penulis mengikuti seleksi CPNS formasi Dosen dan *Alhamdulillah* dinyatakan lulus seleksi CPNS, dan ditempatkan di Fakultas Ushuluddin pada jurusan Tafsir Hadis. 4 tahun kemudian, penulis memutuskan untuk mengikuti sunnah rasul dengan menikahi gadis yang bernama Widiawati pada bulan Oktober 2004. *Alhamadulillah* sekarang telah dikaruniai 2 putra, dan 1 putri; Ahmad Zuhry Hasyim (16 th), dan Hawiz Ma'arif (11 th), dan Gaitsa Grytha Hasyim (6 th).

Selama kurang lebih 6 tahun, setelah resmi menjadi PNS formasi dosen dan mengajar mata kuliah bahasa Arab di fak. Usuluddin dan Filsafat, *penulis* mendapat izin dari Pimpinan Fakultas untuk melanjutkan studinya pada Program S3 di UIN Alauddin Makassar.

Akhirnya pada tahun 2007, penulis resmi menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) dengan konsentrasi Pendidikan dan Keguruan. Setelah berjalan 2 tahun masa studi di Program Doktor (S3), tepatnya dipenghujung tahun 2009, penulis mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk mengikuti *sandwich program* di Uni Hamburg Jerman selama 1 bulan. Di saat yang sangat singkat itulah, penulis menyempatkan diri untuk *rihlah* ke beberapa Negara di Eropa seperti Belanda, Prancis, Itali bahkan sampai ke Negara terkecil dunia yaitu Vatikan.

Selama menjadi Mahasiswa S1 maupun S2, penulis aktif di beberapa lembaga/organisasi kemahasiswaan. Seperti organisasi

IMDI (Ikatan Mahasiswa DDI). Tahun 1998-2000, dipercaya sebagai salah satu pengurus Pucuk Pimpinan IMDI (PP-IMDI). *penulis* juga diposisikan sebagai Pembina IMPS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng) Koperti UIN Alauddin Makassar.

Selama kurang lebih 20 tahun berkiprah di UIN Alauddin, penulis pernah diserahi amanah oleh pimpinan universitas, di samping sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fak. Usuluddin dan Filsafat. Yaitu pada tahun 2011-2015 sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fak. Sains dan Teknologi. Tahun 2016-2017 sebagai Manajer Asrama yang merupakan salah satu unit pengembangan bisnis UIN Alauddin Makassar. Juga pernah diserahi tugas sebagai Sekretaris Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Pascasarjana, tahun 2018-2019. Sekarang penulis sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora periode 2019-2023.